LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2021. Laporan ini disusun dan disampaikan guna memenuhi ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan ini pada dasarnya memuat pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan, yang diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak tentang kinerja satu tahun kepemimpinan kami, baik makro maupun mikro dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Pangkalpinang. Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka buku LPPD ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN
II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
III. CAPAIAN TUGAS PEMBANTUAN
IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
V. PENUTUP

Kami sampaikan rasa terima kasih serta penghargan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat menjadi dorongan dan motivasi bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang ke depannya dalam mewujudkan masyarakat Pangkalpinang yang Sejahtera Nyaman Unggul Makmur.

Pangkalpinang, Maret 2022
WALIKOTA PANGKALPINANG

H. MAULAN AKLIL

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Daftar Tabel iv
Daftar Gambar vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.1.1. Penjelasan Umum 2
1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 10
1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal 66
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 72
2.1. Capaian Kinerja Makro 72
2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 76
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran 77
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil 107
2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 116
2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 118
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 163
3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan oleh Kota Daerah Kab/Kota 163
3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan oleh Kab/Kota 164
3.3. Permasalahan dan Kendala 164
3.4. Saran dan Tindak Lanjut 164
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 165
4.1. Urusan Pendidikan 165
4.2. Urusan Kesehatan 170
4.3. Urusan Pekerjaan Umum 181
4.4. Urusan Perumahan Rakyat 182
4.5. Urusan Trantibumlinmas 185
4.6. Urusan Sosial 188
4.7. Program dan Kegiatan 190
BAB V PENUTUP 196

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Data Penduduk Per Kecamatan	4
Tabel I.2	Penduduk Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Usia	4
Tabel I.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan KK	5
Tabel I.4	Data Penduduk Kota Pangkalpinang Berdasarkan Pendidikan Terakhir	5
Tabel I.5	Data Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pangkalpinang	6
Tabel I.6	Jumlah RT dan RW menurut Kecamatan dan Kelurahan	6
Tabel I.7	Komposisi Pegawai Kota pangkalpinang Tahun 2020 - 2021	8
Tabel I.8	Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021	9
Tabel I.9	Rumusan Permasalahan dan Faktor Penentu Berdasarkan Urusan Kinerja Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang	13
Tabel I.10	Keterkaitan Unsur Visi dengan Uraian Misi Pembangunan Jangka Menegah Tahun 2018-2023	20
Tabel I.11	Integrasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Serta Program Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023	22
Tabel I.12	Program dan Kegiatan Kota Pangkalpinang tahun 2021	29
Tabel I.13	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pangkalpinang Tahun 2021	68
Tabel II.1	Capaian Indikator Kinerja Makro (2020 -2021)	72
Tabel II.2	Komponen Pembentuk IPM Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2021	73
Tabel II.3	PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Pangkalpinang Tahun 2019-2021	74
Tabel II.4	PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Pangkalpinang tahun 2019-2021	75
Tabel II.5	Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	118
Tabel II.6	Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2021	120
Tabel II.7	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020	122
Tabel II.8	Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Tahun RPJMD	124
Tabel II.9	Realisasi Belanja Kota Pangkalpinang Tahun 2021	126
Tabel II.10	Rincian Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020	142
Tabel III.1.	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Kota Pangkalpinang	164
Tabel III.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Kota Pangkalpinang	164
Tabel IV.1	Target Pencapaian SPM Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2021	168
Tabel IV.2	Dukungan Personil Pelaksana SPM Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2021	168
Tabel IV.3	Realisasi SPM Pendidikan Tahun 2021	169
Tabel IV.4	Target Capaian dan Indikator SPM Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021	171
Tabel IV.5	Dukungan Personil Penerapan SPM Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021	172

Tabel IV.6	Realisasi SPM Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021.....	173
Tabel IV.7	Target Capaian dan Indikator SPM Pekerjaan Umum Tahun 2021	181
Tabel IV.8	Capaian Penerapan SPM Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021.....	181
Tabel IV.9	Target Capaian dan Indikator SPM Perumahan Rakyat Kota Pangkalpinang Tahun 2021	183
Tabel IV.10	Realisasi Penerapan SPM Perumahan Rakyat Kota PangkalpinangTahun 2021	184
Tabel IV.11	Target Capaian dan Indikator SPM Trantibumlinmas Kota PangkalpinangTahun 2021	185
Tabel IV.12	Realisasi Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2021	186
Tabel IV.13	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Trantibumlinmas.....	187
Tabel IV.14	Target Capaian dan Indikator SPM Sosial Tahun 2021.....	188
Tabel IV.15	Realisasi Penerapan SPM Sosial Tahun 2021	189
Tabel IV.16	Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sosial	190
Tabel IV.17	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan SPM Tahun 2021.....	190

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Peta Wilayah Kota Pangkalpinang 3

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah atau yang kemudian disebut dengan LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib disusun dan disampaikan oleh kepala daerah, baik itu Gubernur di tingkat provinsi ataupun Bupati/Walikota di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana tertuang dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Gubernur menyampaikan LPPD Provinsi kepada Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Bupati/Walikota melalui Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir yang di dalamnya memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan capaian pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliputi capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan, capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan capaian penerapan standar pelayanan minimal. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan meliputi capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah provinsi.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan LPPD adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
b. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6041);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Adapun sistematika penyusunan LPPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab III : Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Bab IV : Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bab V : Penutup

1.1.1. Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebagai sebuah wilayah pemerintahan, Pangkalpinang pada awalnya merupakan sebuah kota kecil yang terdiri dari 2 (dua) gementee yaitu gemeente Pangkalpinang dan gemeente Gabek dengan Luas 31,7 km^2 sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Nomor 57 tahun 1956). Dalam perkembangannya Undang-undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 dicabut dan diganti dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1957, dan kemudian ditambah dengan Undang-undang Nomor 6 dan 8 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Selanjutnya pada tahun 1959 dikeluarkan Undang-Undang nomor 28 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, yang berimplikasi terhadap perubahan Status Kota Pangkalpinang dari kota kecil menjadi kotapraja.

Seiring dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi ke-31 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, maka Kota Pangkalpinang menjadi daerah otonom sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

b. Data Geografis Wilayah

Pangkalpinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terletak pada bagian timur Pulau Bangka dengan posisi 106°04′ - 106° 07′ BT dan 02°04′ - 02°10′ LS, dan total luas wilayah sebesar ± 104,405 km^2, luas Kota Pangkalpinang relatif kecil yaitu hanya sebesar 0,72 persen dari total keseluruhan luas daratan wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Batas wilayah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

a. Sebelah utara : Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka
b. Sebelah timur : Selat Karimata
c. Sebelah selatan : Kecamatan Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah
d. Sebelah barat : Kecamatan Mendo barat, Kabupaten Bangka

Gambar I.1
Peta Wilayah Kota Pangkalpinang

Sumber : Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2011

Secara topografis, Kota Pangkalpinang memiliki bentang alam dataran dengan kondisi berbukit dan memiliki kontur yang pada umumnnya bergelombang dengan ketinggian antara 20 - 50 meter dari permukaan laut dan kemiringan 0 - 25%. Daerah-daerah berbukit berada di bagian barat dan selatan Pangkalpinang, diantaranya Bukit Girimaya dan Bukit Menara.

Dari kategori lereng, Kota Pangkalpinang terbagi menjadi 6 (enam) kelas lereng, yaitu :

- Kelas lereng 0-2 % (topograsi sangat datar hingga cekungan) meliputi wilayah Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui dan Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng 2-8 % (topografi datar), lokasi ini meliputi pantai timur hingga kaki perbukitan terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng 8–15 % (topografi landai agak miring), meliputi kaki perbukitan, daerah perbukitan kecil dan dataran berombak, yang terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari serta Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng 15–25 % (topografi agak curam), Terdapat pada perbukitan bergelombang, terdapat menyebar antara perbukitan kecil di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Tamansari dan Kecamatan Gerunggang
- Kelas lereng 25–40 % (topografi curam), Terdapat di perbukitan, terdapat di Kecamatan Bukit Intan, Kecamatan Pangkalbalam dan Kecamatan Gerunggang;
- Kelas lereng > 40 % (topografi sangat curam), Terdapat di puncak-puncak perbukitan di Kecamatan Gerunggang.

Kota Pangkalpinang memiliki iklim tropis kering, dengan kelembaban udara berkisar antara 61 % - 96 % dan temperatur udara berkisar antara 23,4°C – 32,1°C. Adapun curah hujan dalam setahun mencapai 254 hari.

c. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kepndudukan dan Catatan Sipil, jumlah penduduk Kota Pangkalpinang di tahun 2021 adalah 225.162 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 113.733 jiwa (50,51 %) dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 111.429 jiwa (49,49%). Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah kecamatan Gerunggang dan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Girimaya. Sebaran jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.1
Jumlah Penduduk per Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Bukit Intan	20.677	19.998	40.675
2	Taman Sari	10.401	10.277	20.678
3	Pangkalbalam	11.471	11.134	22.605
4	Rangkui	19.602	19.258	38.860
5	Gerunggang	24.371	23.851	48.222
6	Gabek	17.572	17.334	34.906
7	Girimaya	9.639	9.577	19.216
	Total	113.733	111.429	225.162

Sumber data : Disdukcapil Kota Pangkalpinang Tahun 2021

Jika dilihat dari sebaran penduduk menurut kelompok usia, jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) adalah sebesar 152.092 jiwa atau sebesar 67,91% dan jumlah penduduk non produktif (0-14 tahun dan >64 tahun) adalah sebanyak 72.260 jiwa atau sebesar 32,09%. Secara lebih rinci, jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel I.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

Struktur umur	Jumlah
0-4	15.304
5-9	21.699
10-14	21.498
15-19	17.058
20-24	16.596
25-29	17.147
30-34	19.168
35-39	20.281
40-44	19.157
45-49	14.409
50-54	11.509
55-59	9.203
60-64	8.374
65-69	6.341
70-74	3.853
>74	3.565
Total	**225.162**

Sumber data : Disdukcapil Kota Pangkalpinang Tahun 2021

Sedangkan untuk jumlah kepala keluarga (KK) di tahun 2021 per kecamatan di Kota Pangkalpinang, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel I.3
Jumlah KK per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah KK
1	Bukit Intan	12.537
2	Taman Sari	6.705
3	Pangkalbalam	7.339
4	Gerunggang	14.334
5	Rangkui	12.425
6	Gabek	10.767
7	Girimaya	6.329
Total		**70.436**

Sumber Data : Disdukcapil Kota Pangkalpinang Tahun 2021

Dari sisi pendidikan formal, jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan SLTA/sederajat menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah sebanyak 62.721 orang atau sebesar 27.9886%, disusul kemudian oleh tamatan Sekolah Dasar/sederajat sebanyak 34.218 orang atau sebesar 15,20% dan yang paling kecil adalah lulusan doctoral/strata-3 yaitu sebanyak 70 orang atau sebesar 0,03%. Secara rinci, komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.4
Data Penduduk Kota Pangkalpinang Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	Belum sekolah	51.251	22,76
2	Tidak tamat SD	25.991	11,54
3	Tamat SD	34.218	15,20
4	SLTP/sederajat	26.958	11,97
5	SLTA/sederajat	62.721	27,86
6	D-II	1.840	0,82
7	D-III	5.952	2,64
8	Strata 1	14.915	6,62
9	Strata 2	1.246	0,55
10	Strata 3	70	0,03
Total		**225.162**	**100%**

Sumber data : Disdukcapil Kota Pangkalpinang Tahun 2021

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan pembentukan Kecamatan di Wilayah Kota Pangkalpinang, maka Kota Pangkalpinang terbagi menjadi 7 kecamatan dan 42 kelurahan. Berikut adalah data kecamatan dan kelurahan di Kota Pangkalpinang beserta luas wilayah per kecamatan.

Tabel I.5
Data Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pangkalpinang

No	Kecamatan	Kelurahan		Luas Wilayah
1	Bukit Intan	a. Sinar bulan b. Temberan c. Air itam d. Air Mawar	e. Bacang f. Pasir putih g. Semabung Lama	35,420 km^2
2	Taman Sari	a. Gedung Nasional b. Opas Indah	c. Batin Tikal d. Rawa Bangun e. Kejaksaan	3.190 km^2
3	Pangkalbalam	a. Pasir Garam b. Rejosari	c. Lontong Pancur d. Ampui e. Ketapang	4.723 km^2
4	Rangkui	a. Parit Lalang b. Keramat c. Bintang d. Asam	e. Masjid Jamik f. Gajah Mada g. Melintang h. Pintu Air	5.039 km^2
5	Gerunggang	a. Kacang Pedang b. Bukit Merapin c. Bukit Sari	d. Air Kepala Tujuh e. Tua Tunu Indah f. Taman Bunga	31.143 km^2
6	Gabek	a. Gabek Satu b. Gabek Dua c. Jerambah Gantung	d. Selindung e. Selindung Baru f. Air Selemba	20.393 km^2
7	Girimaya	a. Sriwijaya b. Pasar Padi c. Batu Intan	d. Bukit Besar e. Semabung Baru	4.497 km^2
Total				**104.405 km^2**

Sumber data :
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2019
- Perda Kpta Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik, Camat dan Lurah dibantu oleh Pengurus RT dan RW. Untuk periode 2020-2025, jumlah RT sebanyak 355 dan RW sebanyak 114, tidak mengalami perubahan jumlah dari periode sebelumnya. Hanya saja terdapat perubahan dalam periodisasi, dari yang tadinya masa kepengurusan RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun, berubah menjadi 5 (lima) tahun. Secara detil untuk jumlah RT dan RW per kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel I.6
Jumlah RT dan RW menurut Kelurahan dan Kecamatan

No.	Kecamatan	Kelurahan	RT	RW
1	**Bukit Intan**	Air Itam	9	3
		Bacang	9	3
		Semabung Lama	14	3
		Pasir Putih	9	3
		Temberan	7	2
		Sinar Bulan	9	3
		Air Mawar	4	2
		Sub Total	**61**	**19**
2	**Taman Sari**	Opas Indah	8	2
		Gedung Nasional	8	2

No.	Kecamatan	Kelurahan	RT	RW
		Batin Tikal	9	3
		Rawa Bangun	9	3
		Kejaksaan	12	4
		Sub Total	**46**	**14**
3	**Pangkalbalam**	Rejosari	10	3
		Ketapang	8	3
		Lontong Pancur	7	2
		Pasir Garam	7	2
		Ampui	6	2
		Sub Total	**38**	**12**
4	**Rangkui**	Pintu Air	9	3
		Bintang	9	3
		Gajah Mada	8	3
		Masjid Jamik	6	3
		Asam	6	2
		Melintang	9	3
		Keramat	9	3
		Parit Lalang	9	3
		Sub Total	**65**	**23**
5	**Gerunggang**	Taman Bunga	10	3
		Bukit Merapin	13	3
		Air Kepala Tujuh	9	3
		Bukit Sari	9	3
		Tua Tunu Indah	10	3
		Kacang Pedang	10	3
		Sub Total	**61**	**18**
6	**Gabek**	Gabek Satu	8	2
		Gabek Dua	8	2
		Selindung	8	2
		Selindung Baru	7	2
		Air Selemba	6	2
		Jerambah Gantung	7	2
		Sub Total	**44**	**14**
7	**Girimaya**	Pasar Padi	6	3
		Batu Intan	7	2
		Bukit Besar	9	3
		Sriwijaya	9	3
		Semabung Baru	9	3
		Sub Total	**40**	**14**
	Total		**355**	**114**

Sumber data : Bagian Pemerintahan Kota Pangkalpinang Tahun 2021

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang maka total perangkat daerah di Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 33 perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD

3. Inspektorat
4. Dinas Daerah sebanyak 18 dinas, yang terdiri atas :
   a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   b. Dinas Sosial
   c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB
   d. Satpol PP
   e. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
   f. Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
   g. Dinas Kesehatan
   h. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   i. Dinas pangan dan Pertanian
   j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
   k. Dinas Lingkungan Hidup
   l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
   m. Dinas Komunikasi dan Informatika
   n. Dinas Pariwisata
   o. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
   p. Dinas Kelautan dan Perikanan
   q. Dinas Perhubungan
   r. Dinas Pemuda dan Olahraga
5. Badan Daerah sebanyak 5 badan, yang terdiri atas :
   a. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
   b. Badan Keuangan Daerah
   c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
   d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
   e. Badan Kesbangpol
6. Kecamatan sebanyak 7 kecamatan, yang terdiri atas :
   a. Kecamatan Bukit Intan
   b. Kecamatan Taman Sari
   c. Kecamatan Pangkalbalam
   d. Kecamatan Rangkui
   e. Kecamatan Gerunggang
   f. Kecamatan Gabek
   g. Kecamatan Girimaya

Sedangkan jumlah sumber daya manusia pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di Pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 3.011 orang PNS yang terdiri dari 1.137 orang pegawai laki-laki dan 1.874 orang pegawai perempuan, 7 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PHL sebanyak 3.824 orang. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ini berada di Dinas Pangan dan Pertanian Kota pangkalpinang untuk jabatan Penyuluh Pertanian.

Tabel I.7
Komposisi Pegawai Kota Pangkalpinang Tahun 2020-2021

No	Uraian	Tahun	
		2020	2021
1	PNS	2.993 orang	3.011 orang
2	PPPK	-	7 orang
3	PHL	3.765 orang	3.824 orang

Sumber data :
- BKPSDMD Kota Pangkalpinang tahun 2021
- Bakeuda Kota Pangkalpinang Tahun 2021

f. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021, ditetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang sebesar Rp. 935.086.606.670,00 namun dalam perjalanannya terjadi perubahan terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang menjadi Rp. 1.006.937.975.700,30 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang.

Tabel I.8
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2021

No. Urut	Uraian	Tahun 2021 (Unaudited)		%
		Anggaran	Realisasi	
4.	**Pendapatan Daerah**	**915.125.027.188,41**	**869.691.319.126,65**	**95,04**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**143.391.826.819,00**	**131.031.623.250,54**	**91,38**
4.1.1	Pajak daerah	87.160.000.000,00	92.405.530.322,00	106,02
4.1.2	Retribusi daerah	11.383.200.000,00	11.523.323.524,67	101,23
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.018.000.000,00	6.032.648.895,15	100,24
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	38.830.626.819,00	21.070.120.508,72	54,26
4.2	**Pendapatan Transfer**	**733.687.210.236,00**	**720.516.182.059,11**	**98,20**
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	675.769.799.041,00	674.255.166.446,00	99,78
4.2.1.1	Dana Perimbangan	637.889.343.041,00	636.374.710.446,00	99,76
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	37.880.456.000,00	37.880.456.000,00	100
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	57.917.411.195,00	46.261.015.613,11	79,87
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	54.375.211.195,00	43.202.015.613,11	79,45
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	3.542.200.000,00	3.059.000.000,00	86,36
4.3	**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**38.045.990.133,41**	**18.143.513.817,00**	**47,69**
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	655.977.955,00	0,00
4.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	38.045.990.133,41	17.487.535.862,00	45,96
5	**Belanja Daerah**	**1.006.937.975.700,30**	**838.260.121.430,75**	**83,25**
5.1.	Belanja Operasi	784.303.705.373,30	662.415.078.363,81	84,46
5.1.1	Belanja Pegawai	399.144.192.325,30	374.060.077.733,00	93,72
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	329.756.385.865,00	268.257.830.566,81	81,35
5.1.5	Belanja Hibah	48.481.742.183,00	14.634.263.064,00	30,19
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.921.385.000,00	5.462.907.000,00	78,93
5.2	**Belanja Modal**	**220.634.270.327,00**	**175.609.917.201,94**	**79,59**
5.2.1	Belanja modal tanah	24.895.460.000,00	11.347.000.368,00	45,58
5.2.2	Belanja modal peralatan dan mesin	38.339.414.358,00	32.522.225.181,00	84,83
5.2.3	Belanja modal gedung dan bangunan	79.460.319.569,00	57.985.658.878,94	72,97
5.2.4	Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	63.797.433.500,00	61.572.305.145,00	96,51
5.2.5	Belanja modal aset tetap lainnya	14.141.642.900,00	12.182.727.629,00	86,15

No. Urut	Uraian	Tahun 2021 (Unaudited)		%
		Anggaran	Realisasi	
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**2.000.000.000,00**	**235.125.865,00**	**11,76**
5.3.1	Belanja tidak terduga	2.000.000.000,00	235.125.865,00	11,76
5.4	**Belanja Transfer**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.4.2.	Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	**(91.812.948.511,89)**	**31.431.197.695,90**	**(34,23)**
6	**Pembiayaan Daerah**			
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**95.812.948.511,89**	**95.812.948.511,89**	**100,00**
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	95.812.948.511,89	95.812.948.511,89	100,00
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**4.000.000.000,00**	**0,00**	**0,00**
6.2.1	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan netto	**91.812.948.511,89**	**95.812.948.511,89**	**104,36**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	**0,00**	**127.244.146.207,79**	**0,00**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan karena urgensinya terhadap pembangunan daerah masa kini dan mendatang. Isu strategis dirumuskan melalui berbagai informasi kebijakan pembangunan yang berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal, yakni kondisi yang menciptakan kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman bagi implementasi rencana pembangunan pada periode berjalan. Permasalahan dan isu strategis jika diprioritaskan penanganan maupun antisipasinya dapat meningkatkan peluang tercapainya berbagai target pembangunan daerah sehingga memberi nilai lebih pada setiap pelaksanaan tahapan pembangunan. Namun sebaliknya, jika permasalahan dan isu strategis tidak diindahkan dapat memicu beberapa kegagalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pada dasarnya identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan aksesibilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatory.

Setelah menelaah kajian data dan informasi, hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan di Kota Pangkalpinang sejak

tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah, diperoleh gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kota Pangkalpinang yaitu "**BELUM OPTIMALNYA KUALITAS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA PANGKALPINANG**"

Dari permasalahan utama pembangunan daerah tersebut maka berdasarkan hierarkinya disusun beberapa permasalahan pokok Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pembangunan perekonomian sektor unggulan daerah

   Beberapa faktor penyebab belum optimalnya pembangunan perekonomian sektor unggulan antara lain terbatasnya pengembangan UMKM sektor unggulan, rendahnya promosi dan pemasaran produk unggulan daerah, belum optimalnya peningkatan kualitas IKM, minimnya upaya pengembangan kawasan pariwisata, minimnya peningkatan penanaman modal daerah dan penurunan aktivitas perekonomian akibat pandemi Covid-19 yang pada akhirnya menyebabkan belum optimalnya peningkatan nilai tambah produksi unggulan daerah dalam menopang perekonomian.

2. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat

   Hal ini disebabkan antara lain karena masih terjadinya perubahan harga kebutuhan pokok secara fluktuatif, belum optimalnya kebijakan pengentasan kemiskinan dan minimnya tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing.

3. Belum optimalnya perwujudan kondusivitas wilayah

   Faktor perwujudan kondusivitas wilayah yang belum optimal di Pangkalpinang diantaranya berakar dari masalah tingginya potensi bencana alam, khususnya banjir, tingginya kasus tindak kejahatan dan minimnya pengetahuan demokrasi masyarakat yang berujung pada belum optimalnya implementasi ketertiban, keamanan dan kenyamanan masyarakat.

4. Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi

   Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Pangkalpinang dipengaruhi oleh 2 (dua) permasalahan utama yaitu:
   - belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah yang disebabkan oleh kurangnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan organisasi perangkat daerah, belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah, belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah dan belum optimalnya sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan.
   - belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis sistem informasi yang disebabkan oleh belum optimalnnya penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik, belum optimalnya kualitas kesejahteraan pegawai perangkat daerah maupun pengurus RT/RW dan belum optimalnya kapasitas, penempatan dan kinerja ASN dalam pembangunan.

5. Daya saing kualitas sumber daya manusia belum optimal

   Daya saing kualitas sumber daya manusia belum optimal dipicu oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan yang dipengaruhi oleh belum optimalnya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, belum optimalnya kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan, belum efektifnya manajemen pengelolaan pendidikan pada tingkat sekolah, belum meratanya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan formal maupun non formal, minimnya perhatian bagi masyarakat berprestasi dalam mengenyam pendidikan, minimnya kesadaran masyarakat dalam membaca dan belum optimalnya pendidikan penanaman akhlak dan budi pekerti.
- belum optimalnya peningkatan kualitas kesehatan yang dipengaruhi oleh faktor belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak, minimnya perhatian pemerintah pada pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, minimnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam meningkatkan kesehatan lingkungan, belum optimalnya pelayanan kesehatan pada faskes dan belum optimalnya kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
- rendahnya upaya peningkatan daya saing masyarakat yang dipengaruhi oleh Masih kurangnya pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perlindungan perempuan dan anak, Minimnya pengembangan dan pembinaan peran perempuan terhadap pembangunan, Rendahnya keaktifan organisasi kepemudaan dalam pembangunan dan Minimnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga.

6. Belum optimalnya kualitas infrastruktur pembangunan berkelanjutan

Pembangunan infrastruktur merupakan aspek penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Permasalahan belum optimalnya kualitas infrastruktur pembangunan berkelanjutan dipengaruhi oleh :

- belum optimalnya pengelolaan fasilitas pemukiman layak yang disebabkan oleh belum optimalnya penyediaan pemakaman umum yang layak, belum optimalnya pelayanan infrastruktur penunjang kehidupan layak, khususnya air bersih dan listrik, belum optimalnya penataan kawasan permukiman dan pemenuhan rumah layak huni dan rendahnya pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi sehat.
- tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh minimnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola lingkungan, kurangnya pengawasan pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan sosial ekonomi yang berpotensi merusak lingkungan, belum optimalnya pengelolaan sampah, minimnya pengembangan ruang terbuka hijau dan belum optimalnya penyelarasan pembangunan sesuai RTRW.

Tabel I. 9
Rumusan Permasalahan dan Faktor Penentu
Berdasarkan Urusan Kinerja Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu
1	Pendidikan	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan daerah, khususnya terkait sarana dan prasarana	Peningkatan kualitas layanan pendidikan melalui penyediaan tenaga pendidik, kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan secara memadai
		Masih ditemukannya kasus anak putus sekolah	
		Belum optimalnya kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan	
2	Kesehatan	Kualitas sebagian sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan belum sesuai standar	Peningkatan layanan kesehatan kepada masyarakat melalui penyediaan tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
		Masih terdapat kasus kematian ibu melahirkan dan balita	
		Belum optimalnya kualitas tenaga kesehatan	
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya kualitas prasarana jalan dan jembatan jalan	Pembangunan infrastruktur sesuai RTRW daerah
		Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir	
		Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum dan pengelolaan air limbah	
		Belum terlaksananya rencana pembangunan infrastruktur sesuai RTRW	
4	Perumahan dan Pemukiman	Penanganan pemukiman kumuh belum optimal	Peningkatan kualitas perumahan masyarakat dan infrastruktur pendukungnya
		Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni	
		Belum seluruh rumah tinggal memiliki sanitasi yang layak	
		Masih terbatasnya penyediaan fasilitas dasar bagi masyarakat khususnya PSU (Prasarana Sarana Utilitas)	
5	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Belum optimalnya kesadaran aparatur pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan pemeliharan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada
6	Sosial	Belum optimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Meningkatnya Penanganan dan Pembinaan terhadap PMKS
		Minimnya kapasitas kesiapsiagaan terhadap bencana alam/sosial	
7	Tenaga Kerja	Masih kurangnya kesesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan (kesempatan kerja)	Peningkatan kesempatan lapangan usaha mandiri
		Tingginya kasus konflik industrial	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah	Peningkatan sosialisasi terkait perlindungan anak dan penanganan korban kekerasan
		Minimnya partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan	Peningkatan kesempatan perempuan dalam partisipasi pelaksanaan pembangunan
9	Pangan	Menurunnya kemampuan penguatan cadangan pangan	Penyediaan pangan secara kontinu dan transparan
		Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	
10	Pertanahan	Masih minimnya fasilitasi pemerintah daerah dalam proses penerbitan sertifikat tanah warga	Peningkatan kualitas regulasi pertanahan daerah
		Masih ditemukannya kasus konflik pertanahan/ sengketa tanah	
11	Lingkungan Hidup	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam	Peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam mengelola

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu
		pengelolaan lingkungan hidup	lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup	
		Minimnya pengelolaan persampahan	
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan pelayanan administrasi dokumen kependudukan dan catatan sipil
		Belum optimalnya sarana prasarana pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya peran lembaga pemberdayaan desa	Peningkatan pelibatan masyarakat dalam setiap program pemberdayaan desa
		Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih belum optimal	
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Peningkatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
15	Perhubungan	Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat terhadap peraturan lalu lintas menyebabkan angka kecelakaan lalu lintas	Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan fasilitas perhubungan
		Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraaan urusan perhubungan kurang memadai	
16	Komunikasi dan Informasi	Belum optimalnya penggunaan layanan komunikasi dan informasi dalam pendistribusian informasi daerah (OPD)	Peningkatan kualitas SDM yang melek IT
17	Koperasi dan Industri Kecil Menengah	Kurangnya daya saing KUMKM untuk meningkatkan akses, pangsa pasar, menjalin kemitraan, mengembangkan jaringan usaha, penguasaan dan pemanfaatan teknologi serta pengembangan manajemen	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi K-UKM
		Menurunnya jumlah koperasi aktif	
18	Penanaman Modal	Belum efektifnya promosi investasi	Peningkatan infrastruktur dan regulasi yang membuat daya tarik investor
		Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menarik investor	
19	Pemuda dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi dan kegiatan kepemudaan	Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olahraga
		Kurangnya sarana dan prasarana olahraga	
20	Statistik	Belum optimalnya kualitas data dari segi update dan validitas	Koordinasi secara intens dengan instansi statistik nasional (BPS)
21	Persandian	Mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal	Peningkatan kualitas persandian di setiap OPD
22	Kebudayaan	Masih kurangnya penggalian, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur	Pengembangan pelestarian budaya dan kearifan lokal daerah
		Masih rendahnya penyerapan dan pengembangan nilai-nilai budaya daerah maupun budaya nasional yang unggul dan dapat menunjang percepatan peningkatan pembangunan daerah	
23	Perpustakaan	Kurangnya tenaga ahli dan terampil perpustakaan (pustakawan, tenaga teknis dan penilai)	Peningkatan kualitas tenaga perpustakaan beserta pelayanannya
		Keterbatasan koleksi buku perpustakaan	
24	Kearsipan	Masih terbatasnya aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah	Peningkatan kualitas kearsipan daerah melalui IT
		Kurangnya perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku	
		Minimnya ketersediaan arsiparis	
25	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan sumber daya perikanan tangkap belum optimal dilakukan dibanding potensi lestarinya	Peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu
26	Pariwisata	Terbatasnya daya tarik wisata dan kurangnya daya saing kepariwisataan	Peningkatan akses dan fasilitas obyek wisata
		Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata	
		Belum optimalnya koordinasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	
27	Pertanian	Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan	Peningkatan intensifikasi dan diversifikasi pertanian
		Menurunnya produksi beberapa komoditas pertanian dan peternakan	
28	Perdagangan	Belum optimalnya pemasaran berbagai produk unggulan daerah	Peningkatan kualitas pemasaran dan sarana prasarana penunjangnya
		Belum semua pasar memenuhi syarat	
29	Perindustrian	Belum optimalnya kualitas sektor industri daerah (khususnya sektor unggulan)	Meningkatkan kualitas industri kecil mikro daerah
		Belum optimalnya pengembangan inovasi dan sarana prasarana penunjang industri	
		Belum optimalnya fasilitas pemerintah kota dalam peningkatan pembinaan IKM	
30	Penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang	Peningkatan kualitas SDM litbang
31	Perencanaan	Belum optimalnya kualitas rumusan perencanaan pembangunan, sistem pengawasan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah	Peningkatan kualitas sistem perencanaan pembangunan daerah
32	Keuangan Daerah	Belum optimalnya kontribusi PAD terhadap APBD Kota pangkalpinang	Peningkatan ketertiban pengelolaan keuangan daerah
33	Kepegawaian	Masih rendahnya SDM ASN yang menempati jabatan sesuai dengan kompetensi	Pemetaan klasifikasi ASN eksisting dan kebutuhan formasi kepegawaian
34	Pengawasan	Belum optimalnya fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Meningkatkan kualitas SDM dan struktur organisasi pengawasan internal
		Respon OPD terhadap rekomendasi BPK maupun inspektorat wilayah belum optimal	
35	Sekretariat Dewan	Belum optimalnya pelayanan terhadap aktivitas dewan	Peningkatan koordinasi Sekreariat Dewan dengan Anggota Dewan

❖ **Isu – Isu Strategis**

Berdasarkan telaahan dan analisis dari isu-isu strategis internasional, nasional hingga regional, maka ditetapkanlah isu-isu strategis Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM melalui pemerataan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan

   Sebagai pusat rujukan pendidikan dan kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang terus berupaya membenahi pelayanan pendidikan maupun kesehatan sehingga mampu menjadikan SDM Provinsi Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkalpinang, mampu bersaing secara nasional bahkan internasional. Pada dasarnya, pendidikan merupakan kunci utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak pembangunan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah pusat maupun daerah

   Demikan juga halnya dengan bidang kesehatan. Kota Pangkalpinang menerima cukup banyak pasien rujukan dari wilayah di sekitarnya, oleh karena itu cakupan pelayanan kesehatan harus diperluas secara kuantitas dan ditingkatkan secara kualitas.

2. Peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat

   Kesejahteraan masyarakat yang berkualitas dan merata di seluruh kawasan Kota Pangkalpinang merupakan tujuan utama dari dilaksanakannya pembangunan daerah semenjak Kota Pangkalpinang berdiri sebagai suatu wilayah administratif. Dalam melihat kesejahteraan rakyat, indikasi tertinggi untuk melihat kualitasnya adalah dengan menganalisa fenomena kemiskinan yang mampu memberikan sinyal awal dalam melihat kesejahteraan masyarakat.

   Kemiskinan adalah kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari secara layak. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya kesempatan kerja, beban ekonomi keluarga, keterbatasan akses permodalan, tingkat pendidikan yang rendah. Pembangunan penanganan kemiskinan dilakukan melalui gerakan bersama penanggulangan kemiskinan daerah secara komprehensif dan terpadu yang dilakukan melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan kemampuan dan keterampilan pencari kerja agar memiliki daya saing serta perluasan jaringan kerja.

   Meskipun angka kemiskinan di Kota Pangkalpinang tergolong rendah di bawah 5 persen, namun pola fluktuasinya selama beberapa tahun terakhir menyebabkan kekhawatiran tersendiri terlebih lagi adanya pandemi COVID-19 yang memiliki dampak negatif pada perekonomian makro maupun mikro. Perlu adanya strategi khusus dalam pemulihan kesejahteraan masyarakat pasca Pandemi COVID-19 meskipun pandemi belum berakhir.

3. Perwujudan *Sustainable Development Goals* (*SDGs*)

   Dalam perwujudan *SDGs* di Kota Pangkalpinang, pemerintah harus mengupayakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan capaian pembangunan berkelanjutan. Modal dasar yang merupakan potensi daerah telah ada, sedangkan pengelolaan yang baik perlu ditingkatkan kualitasnya. Dominasi sektor perekonomian yang mampu menopang ekonomi kerakyatan menjadi salah satu awal yang baik

untuk mewujudkan SDGs sehingga dalam implementasinya, pengawasan dalam menjalankan roda perekonomian dibarengi dengan meningkatkan kesejahteraan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup akan menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang.

4. Pembangunan perekonomian berkelanjutan melalui optimalisasi sektor unggulan

   Sebagai wilayah perkotaan sekaligus ibukota provinsi, Kota Pangkalpinang memiliki ancaman dalam degradasi lingkungan hidup khususnya permasalahan limbah industri maupun limbah rumah tangga. Selain itu, potensi pencemaran udara yang cukup tinggi juga ikut menyumbang menurunnya kualitas lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup inilah yang harus diperhatikan dalam menyeimbangkan antara stabilitas ekonomi daerah dengan kondisi lingkungan di masa mendatang. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus memiliki komitmen khusus untuk keberlangsungan kualitas lingkungan hidup. Setiap perangkat kebijakan, tata kelola pemerintahan, serta program kegiatan pembangunan daerah harus menjamin dan memberikan perlindungan sosial dan ekologis terhadap keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan lingkungan hidup sehingga generasi mendatang dapat merasakan kenyamanan dalam menjalankan aktivitasnya.

5. Perwujudan *Good Governance* melalui Reformasi Birokrasi

   Reformasi Birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik. Hal penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi, secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintah yang bersih (*clean government*), dan bebas KKN. Reformasi Birokrasi memberikan sebuah harapan masyarakat pada pemerintah agar mampu memerangi tindakan KKN dan membentuk pemerintahan yang bersih serta keinginan masyarakat untuk menikmati pelayanan publik yang efisien, responsif dan akuntabel. Dengan ini partisipasi masyarakat diperlukan agar reformasi birokrasi yang dilakukan saat ini berjalan dengan semestinya.

6. Infrastruktur publik berbasis Rencana Tata Ruang Wilayah

   Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan didukung oleh aset infrastruktur yang baik, maka pelayanan publik yang berkualitas dapat dilaksanakan.

   Kota Pangkalpinang selaku ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menjadi barometer berbagai aspek pembangunan termasuk dalam pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan termasuk drainase, peningkatan kualitas rumah tinggal sehingga mampu menjadi rumah layak huni, peningkatan distribusi dan kualitas air bersih, hingga penyediaan ruang terbuka hijau

bagi perwujudan kualitas lingkungan hidup guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

7. Penanganan dan Pemulihan Pandemi COVID-19 di Kota Pangkalpinang

Di Kota Pangkalpinang, berbagai penanganan untuk pencegahan COVID-19 dilakukan demi meminimalisir pasien positif COVID-19 yang terus bertambah. Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam pencegahan penyebaran virus Corona dengan dibantu oleh masyarakat melalui berbagai program, khususnya *physical distancing* dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Physical distancing mengakibatkan masyarakat tidak dapat melakukan aktifitas kesehariannya dengan normal yang tentu saja berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah, perlu adanya perhatian khusus dalam penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19 untuk mengembalikan kehidupan masyarakat menjadi normal seperti sedia kala.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan menjadi penting untuk menyatukan cita dan cipta bersama seluruh komponen dalam pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kota Pangkalpinang. Sesuai dengan analisis isu strategis pembangunan Kota Pangkalpinang, rencana pembangunan tidak hanya dititikberatkan pada pengelolaan sumber daya yang berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan mempertimbangkan segala aspek bidang pembangunan, kemampuan dan kemauan serta Visi jangka panjang "Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan yang berbasis perdagangan dan jasa dengan dukungan industri unggulan", maka dengan terpilihnya walikota dan wakil walikota yang mempunyai visi membangun dan menyejahterakan setiap masyarkat Kota Pangkalpinang, maka dirumuskan visi pembangunan Kota Pangkalpinang dalam RPJMD Tahun 2018-2023 adalah:

"Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"
(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang **Sejahtera, Nyaman, Unggul** dan **Makmur**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kota Pangkalpinang yang Sejahtera, Sejahtera merupakan sebuah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang dapat memenuhi standar kehidupan yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Sejahtera juga dimaknai sebagai sebuah kondisi derajat kehidupan masyarakat Kota Pangkalpinang yang semakin membaik pada terutama pada sektor ekonomi.

Pangkalpinang **Nyaman,** merupakan kondisi kota yang memberikan kenyamanan bagi seluruh warganya. Suatu kota dengan kondisi lingkungan dan suasana kota yang aman dan nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik.

Unggul, merupakan kondisi dimana kondisi SDM yang ada di Kota Pangkalpinang adalah SDM yang memiliki keunggulan daripada SDM di daerah lain. SDM yang berbudi pekerti luhur, memiliki kebebasan menentukan sikap dan tindakannya (*self determination*), memiliki kesadaran sosial tentang kesamaan (*equality*) dan pemerataan (*equity*).

Makmur, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya banyak hasil; serba kecukupan; tidak kekurangan. Masyarakat yang makmur adalah cita-cita yang harus diwujudkan melalui serangkaian kewenangan yang dipunyai pemerintah. Kondisi makmur di Kota Pangkalpinang tercapai jika seluruh masyarakatnya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak sesuai dengan strata sosial masing-masing.

Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah Visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus berdiri dengan komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh segenap *stakeholders* pembangunan. Berdasarkan visi di atas, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kota Pangkalpinang sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*.
4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

Sedangkan penjelasan dari masing-masing misi di atas dapat dilihat dari uraian di bawah ini.

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan

   Misi ini akan menjadi paying dalam usaha akan mengembangkan perekonomian berbasis potensi lokal dan penanggulangan kemiskinan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kualitas usaha mikro menjadi usaha kecil, meningkatkan kualitas koperasi, meningkatkan pelayanan perijinan, meningkatkan nilai investasi (penanaman modal), meningkatkan kualitas klaster-klaster industri dan meningkatkan sarana perdagangan. Serta pemanfaatan dan pemberdayaan potensi pariwisata, pertanian, peternakan dan perikanan. Selain itu dilakukan pula upaya pengurangan pengangguran dan penanganan PMKS sesuai standar pelayanan.

2. Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana

   Pada misi ini Kota Pangkalpinang akan meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peningkatan kenyamanan dan keamanan daerah, peningkatan wawasan kebangsaan, peningkatan penanganan bencana.

3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*

   Pada misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dengan meningkatkan nilai akuntabilitas, mewujudkan perencanaan

yang terukur dan sinergi dengan penganggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik (administrasi kependudukan catatan sipil, penanganan pertanahan, pelayanan kecamatan serta kelurahan), peningkatan kualitas Aparatur Sipil, peningkatan pemanfaatan persandian dalam komunikasi pemerintahan, pengelolaan arsip yang baik, dan peningkatan reformasi birokrasi, serta penggunaan teknologi informatika dalam mendukung transparansi dengan *e-government* (*e-planning, e-budgeting, e-sakip, e-monitoring evaluasi, dan e-procurement*)

4. Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan

   Pada Misi ini pemerintah Kota Pangkalpinang akan mencapai kondisi pendidikan yang berkualitas, derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender, peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga, peningkatan minat baca masyarakat serta pelestarian seni dan kebudayaan

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

   Pembangunan wilayah dimulai dengan kualitas infrastruktur yang baik (jalan, jembatan, permukiman, pertanahan dan sumber daya air), pengelolaan konektifitas antar wilayah dengan didukung oleh kualitas lingkungan yang memadai, dan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan

Tabel I.10
Keterkaitan Unsur Visi dengan Uraian Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023

Unsur Visi	No Misi	Uraian Misi
Sejahtera	1	Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.
Makmur		
Nyaman	2	Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana
Unggul	3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya *Good Governance*
	4	Meningkatkan kualitas pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan.
	5	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Menengah

Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan perubahan dokumen RPJMD melalui Peraturan Daerah Kota pangkalpinang Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota pangkalpinang Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023. Indikasi rencana program perangkat daerah Kota Pangkalpinang berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayan Minimal (SPM) dalam

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan rencana Strategis OPD.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh OPD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap perangkat daerah ke dalam kegiatan prioritas.

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, maka program pembangunan daerah Kota Pangkalpinang dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel I.11
Integrasi Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan Serta Program Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
VISI : MEWUJUDKAN PANGKALPINANG SEBAGIA KOTA SENYUM (Sejahtera, Nyaman, Unggul, Makmur)					
Misi 1 : Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan					
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan daerah	1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Peningkatan nilai tambah sektor unggulan melalui penguatan sektor industri pengolahan dan UMKM	Peningkatan ekspor dan penguatan pasar dalam negeri	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
				Program Pengem-bangan Ekspor	
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
			Pengembangan IKM (Industri Kecil dan Menengah) sebagai penggerak ekonomi berbasis kerakyatan	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Pemberian bantuan modal kepada pelaku UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan
				Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	
				Program Pengembangan UMKM	
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
				Program Diklat Perkoperasian	
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
	2. Meningkatnya penggalian, pemanfaatan dan pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	Pengembangan potensi wisata daerah	Optimalisasi Kawasan Kampung Wisata dan Pengembangan Detinasi Wisata Baru	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan HAKI	
			Peningkatan implementasi	Program Pemasaran Pariwisata	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
			protokol kesehatan pada aktivitas ekonomi sektor pariwisata		
	3. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan	Pengembangan kondusivitas penanaman modal wilayah untuk pengembangan sektor ekonomi unggulan	Program Promosi Penanaman Modal	DPMPTSP & Tenaga KErja
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
				Program Pelayanan Penanaman Modal	
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	4. Menurunnya tingkat kemiskinan	Percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan kapasitas produksi dan hasil pengolahan perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan & Perikanan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
			Peningkatan kesejahteraan petani	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pangan & Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Program Penyuluhan Pertanian	
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
			Diversifikasi konsumsi pangan pokok berbasis potensi lokal	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	
				Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
			Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
				Program Pemberdayaan Sosial	
				Program Rehabilitasi Sosial	
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
				Program Penanganan Bencana	
	5. Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal	Peningkatan jiwa kewirausahaan masyarakat	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	DPMPTSP & Tenaga Kerja
			Peningkatan harmonisasi kebijakan kinerja perusahaan dan tenaga kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Program Hubungan Industrial	
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	
Misi 2: Meningkatkan Kualitas Keamanan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana					
3. Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketentraman dan kenyamanan lingkungan	6. Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Penanggulangan bencana alam	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
	7. Meningkatnya kondisi keamanan daerah	Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
			Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Badan Kesbangpol
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
			Pembinaan Pembangunan Politik daerah	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	
Misi 3 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Menuju Tercapainya Good Governance					
4. Meningkatkan implementasi reformasi birokrasi pemerintahan daerah	8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Pemantapan Reformasi Birokrasi	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Program Penelitian dan	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
				Pengembangan Daerah	
			Peningkatan kualitas koordinasi, fasilitasi kinerja pemerintah daerah, bina mental spiritual serta perekonomian dan pembangunan daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
				Program Administrasi Umum Sekretariat Daerah	
			Optimalisasi BUMD Pangkalpinang	Program Perekonomian dan Pembangunan	
			Optimalisasi pengelolaan Keuangan, pendapatan dan barang milik daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
			Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	
	9. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas ASN	Peningkatan pelayanan publik	Optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Diskominfo
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
				Program Pendaftaran Penduduk	Disdukcapil
				Program Pencatatan Sipil	
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
				Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kab/Kota	
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
				Program Pemberdayaan	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
				Masyarakat Desa dan Kelurahan	
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	
			Peningkatan kapasitas dan kinerja ASN	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDMD
				Program Pengembangan SDM	
Misi 4 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkeadilan					
5. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender	10. Meningkatnya kualitas pendidikan	Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter	Peningkatan kualitas tata kelola/manajemen pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	
			Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
			Pengembangan sistem pendidikan berbasis budaya	Program Pembinaan Sejarah	
				Program Pengembangan kebudayaan	
				Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			Peningkatan minat baca masyarakat	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	
				Program Pengelolaan Arsip	
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	
	11. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
			Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular		
			Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menciptakan gerakan masyarakat hidup sehat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
			Standarisasi pelayanan kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	
			Pengendalian dan pengawasan produksi alat kesehatan dan produk makanan yang higienis	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	
	12. Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	Peningkatan kesejahteraan perempuan dan pemenuhan hak-hak anak	Pendidikan, penguatan dan perlindungan hak-hak kaum perempuan dan anak	Program Perlindungan Perempuan	DPPPAKB
				Program Perlindungan Khusus Anak	
				Program Pemenuhan Hak Anak	
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	
			Pemberdayaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan	Program Pengendalian Penduduk	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
			Keluarga		
			Peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan daerah	Program Pembinaan KB	
			Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	
	13. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Peningkatan kualitas organisasi kepemudaan dan olahraga	Optimalisasi pembinaan pemuda dan olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda & Olahraga
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	
Misi 5 : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					
6. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal	14. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah	Penataan prasarana, sarana dan utilitas umum	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Disperkim
				Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			Penataan kawasan kumuh perkotaan	Program Kawasan Permukiman	
			Peningkatan kapasitas rumah layak huni	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
			Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Program Pengembangan Perumahan	
	15. Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
				Program Penyelenggaraan Jalan	
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
				Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	
				Program Pengembangan Permukiman	
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	
			Peningkatan kualitas tata ruang wilayah	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	

VISI/MISI/TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	OPD PENGAMPU
				Program Penataan Bangunan Gedung	
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
			Penataan dan Penyediaan tanah untuk pembangunan daerah	Program Penatagunaan Tanah	
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	
				Program Pengelolaan Izin Lokasi	
				Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garap	
				Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	
				Program Pengelolaan Tanah Kosong	
				Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	
	16. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan dan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kualitas lingkungan hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	DLH
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	
				Program Pengelolaan Persampahan	
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	
				Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	

d. Kegiatan Pembangunan Tahunan Daerah

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Pangkalpinang 2018-2023. Dengan memperhatikan dampak pandemi COVID-19 yang terus berlanjut serta berbagai kebijakan yang terus dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah guna mengatasi dampak pandemi ini, maka tema pembangunan di tahun 2021 tetap berfokus pada upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dasar masyarakat yang mendorong percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan peningkatan pelaksanaan pelayanan dasar seperti peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan, mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial dan jaringan pengaman nasional. Disamping itu upaya peningkatan pelayanan kesehatan tetap terus dilaksanakan sesuai kebijakan nasional dalam upaya mempercepat terwujudnya *herd immunity* atau kekebalan komunitas guna menekan laju pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia.

Rencana Kerja Pemerintah Kota Pangkalpinang (RKPD) Tahun 2021 disusun dengan memperhatikan sasaran/arah kebijakan serta target kerja pada Perubahan RPJMD. Sasaran pembangunan daerah tahun 2021 yang hendak dicapai adalah sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dari visi, misi dan program unggulan Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2018-2023. Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapaianya target sasaran pembangunan daerah. Sesuai dengan hal tersebut maka Prioritas Pembangunan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat
2. Perwujudan kemudahan investasi untuk pengembangan sektor pariwisata, industri dan perdagangan
3. Percepatan pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan kualitas angkatan kerja lokal
5. Pemantapan Reformasi Birokrasi
6. Peningkatan pelayanan publik
7. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas
8. Rehabilitasi kerusakan lingkungan hidup

Berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan RKPD Tahun 2021, maka Rencana Kerja Tahun 2021 Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Tabel I.12
Program dan Kegiatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR		
A. PENDIDIKAN	**1. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** **1.1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar** - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - Penambahan Ruang Kelas Baru - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pengadaan Mebel Sekolah - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar **1.2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama** - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) - Penambahan Ruang Kelas Baru - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah - Pengadaan Mebel Sekolah - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa - Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama **1.3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD **1.4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan** - Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan **2. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** **2.1. Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal/kesetaraan** - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
B. KESEHATAN	**1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** **1.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** - Pembangunan Puskesmas - Pengembangan Rumah Sakit - Pengembangan Puskesmas - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi - Pengadaan Obat, Vaksin - Pengadaan Bahan Habis Pakai - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas kesehatan lainnya **1.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Dinas Kesehatan

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya - Pengelolaan Surveilans Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA - Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat - Deteksi Dini Penyalahguna an NAPZA di Fasyankes dan Sekolah - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat - Operasional Pelayanan Rumah Sakit - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya - Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) - Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah **1.3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi** - Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan - Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan **1.4. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya - Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Ko ta - Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan - Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan **2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** 2.1. **Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	Kesehatan **3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** 3.1. **Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)** - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) - Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) **3.2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga** - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga **3.3. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)** - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restor an dan Depot Air Minum (DAM) **3.4. Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan** - Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan **4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** **4.1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat **4.2. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat **4.3. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembanga n dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	
	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT **1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - "Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat"	Puskesmas Gerunggang

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT **1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Selindung
	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT **1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat" - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya - Pengelolaan Surveilans Kesehatan - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pasir Putih
	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Puskesmas Air Itam

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT **1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT **1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Puskesmas Girimaya
	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT **1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Puskesmas Taman Sari

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	- Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Pengelolaan Surveilans Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular - Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional - Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	
	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT **1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya - Pengelolaan Surveilans Kesehatan - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Pangkalbalam
	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT **1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Puskesmas Kacang Pedang
	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT **1.1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Puskesmas Melintang

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
	1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT **1.1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan **1.2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan - Operasional Pelayanan Rumah Sakit **2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** **2.1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota** - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSUD Depati Hamzah
C. PEKERJAAN UMUM	**1. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)** **1.1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai - Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota - Pembangunan Tanggul Sungai - Normalisasi/Restorasi Sungai - Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya - Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota **2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** **2.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota** - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM - Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/ Perbaikan SPAM - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan **3. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL** **3.1. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota**	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	- Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS - Penyediaan Sarana Persampahan **4. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** **4.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota** - Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja **5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** **5.1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota** - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan - Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan - Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan - Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan **6. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN** **6.1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota** - Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota **7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** **7.1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung** - Penyelenggar aan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota - Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota **8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA** **8.1. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota** - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota - Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan **9. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** **9.1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota** - Survey Kondisi Jalan/Jembatan - Pembangunan Jalan - Rekonstruksi Jalan - Rehabilitasi Jalan - Pemeliharaan Berkala Jalan - Pembangunan Jembatan - Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan **10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI** **10.1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi** - Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi **11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** **11.1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota** - Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang - Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang **11.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota - Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang **11.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah - Sistem Informasi Penataan Ruang **11.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota** - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang - Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
D. PERUMAHAN RAKYAT	**1. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN** **1.1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** - Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan - Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani - Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana - Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota - Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus **1.2. Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** - Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan - Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP - Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator - Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana - Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan **1.3. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** - Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana - Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota **1.4. Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota** - Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota - Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota **1.5. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus** - Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	Pemilik/Penghuni Rumah Susun - Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus **1.6. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan** - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik - Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan - Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum **1.7. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)** - Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB) **2. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** **2.1. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman** - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik - Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh **2.2. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** - Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh - Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh - Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh **2.3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha** - Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh - Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh - Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh **3. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** **3.1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan** - Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	
E. TRANTIBUMLINMAS	**1. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **1.1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan	Satpol PP

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan - Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia - Kerjasama Antar Lembaga Dan Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum - Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada **1.2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota** - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota **1.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota** - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS **2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran** 2.1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri **2.2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran** - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran **2.3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran** - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
	3. Program Penanggulangan Bencana **3.1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota** - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) **3.2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana** - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota **3.3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana** - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit **3.4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana** - Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	BPBD
F. SOSIAL	**1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** **1.1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota** - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	Dinas Sosial

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota **2. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** **2.1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial** - Pemberian Layanan Kedaruratan - Pemberian Layanan Rujukan **2.2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial** - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan - Pemberian Layanan Kedaruratan - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga **3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** **3.1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota **4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA** **4.1. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota** - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR		
A. KETENAGAKERJAAN	**1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** 1.1. **Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi** - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi **1.2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta** - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta **2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** **2.1. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja** - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online **2.2. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **3. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** 3.1. **Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan **3.2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota** - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	DPMPTSP & Tenaga Kerja
B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	**1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** **1.1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**	DPPPAKB

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG **1.2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota** - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi **2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** **2.1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota **2.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota** - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota **3. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** **3.1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota** - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota **4. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** **4.1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota **4.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
C. PANGAN	**1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** **1.1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan** - Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan - Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan - Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia **1.2. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi** - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dinas Pangan & Pertanian

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	2. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN **2.1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan** - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan **2.2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota** - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **3. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** **3.1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota** - Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
D. PERTANAHAN	**1. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN** **1.1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota** - Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **2. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN** **2.1. Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota **3. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** **3.1. Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota** - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
E. LINGKUNGAN HIDUP	**1. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** **1.1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota** - Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota **1.2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota** - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang **2. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** **2.1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota** - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim **3. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** **3.1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota** - Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati - Pengelolaan Kebun Raya - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Dinas Lingkungan Hidup

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	4. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) **4.1. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan **5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)** **5.1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **6. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT** **6.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** - Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **7. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP** **7.1. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota** - Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota **8. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** **8.1. Pengelolaan Sampah** - Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota - Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan - Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	
F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	**1. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** **1.1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk** - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk **1.2. Penataan Pendaftaran Penduduk** - Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan **1.3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk** - Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependuduka n dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk - Fasilitasi Pendaftaran Penduduk **2. PROGRAM PENCATATAN SIPIL** **2.1. Pelayanan Pencatatan Sipil** - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dinas Dukcapil

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	- Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil - Pengadaan Dokumen Kependuduka n selain Blangko KTP- El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan **2.2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil** - Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil **3. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** **3.1. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** - Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan - Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA 1.1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga - Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga) 1.2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pembangunan Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Penguatan Kebijakan Daerah Dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organiasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	DPPPAKB
H. PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	**1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** **1.1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk** - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK **1.2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota** - Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan - Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	DPPPAKB

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK **2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** **2.1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal** - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK - Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang - Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK **2.2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)** - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB - Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) **2.3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota** - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya **2.4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB **3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** **3.1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota **3.2. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) **3.3. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga** - Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi	

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	Keluarga/UPPKS) - Pendayaguna an Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakat an dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) - Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	
I. PERHUBUNGAN	**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** **1.1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota** - Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota **1.2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota** - Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan **1.3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C** - Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C - Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal **1.4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir** - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota **1.5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor** - Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor - Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor **1.6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota** - Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota **1.7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota** - Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin - Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Dinas Perhubungan
J. KOMUNIKASI & INFORMATIKA	**1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** **1.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik - Pelayanan Informasi Publik - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas **2. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA** **2.1. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah **2.2. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah**	Dinas Kominfo

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	Daerah Kabupaten/Kota - Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	
K. KOPERASI & UMKM	**1. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** **1.1. Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota** - Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota **2. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** **2.1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota - Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota **3. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** **3.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota** - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi **4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** **4.1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota** - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kab/Kota **5. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** **5.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan** - Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro **6. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** 6.1. **Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil** - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan
L. PENANAMAN MODAL	**1. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** **1.1. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota** - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota **2. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** 2.1. **Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal **3. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** **3.1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan	DPMPTSP & Tenaga Kerja

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik **4. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** 4.1. **Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota** - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal **5. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** 5.1. **Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
M. STATISTIK	**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** 1.1. **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dinas Kominfo
N. PERSANDIAN	**1. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** **1.1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** - Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik **1.2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik **1.3. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo
O. KEBUDAYAAN	**1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** **1.1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan **1.2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota** - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional 2. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 2.1. Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah **3. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA** **3.1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya - Penetapan Cagar Budaya **3.2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota** - Perlindungan Cagar Budaya - Pengembangan Cagar BudayaPemanfaatan Cagar	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	Budaya	
P. PERPUSTAKAAN	**1. PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** **1.1. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota - Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota **1.2. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
Q. KEARSIPAN	**1. PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** 1.1. **Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota** - Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis - Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota **1.2. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota** - Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis **1.3. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota** - Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota **2. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP** **1.1. Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang** - Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Dinas Perpustakaan & Kearsipan
URUSAN PILIHAN		
A. KELAUTAN & PERIKANAN	**1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** 1.1. **Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota** - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap - Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap **1.2. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)** - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) **1.3. Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** - Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT **2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** **2.1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau	Dinas Kelautan dan Perikanan

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	Tenaga Kerja Asing **2.2. Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil** - Pemberian Pendampinga n, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan **2.3. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota **2.4. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan** - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota - Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat **3. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** 3.1. Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
B. PARIWISATA	**7. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** **1.2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** - Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota **1.3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota** - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota **8. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** **2.1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota** - Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota - Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri 9. **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** **3.1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar** - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata - Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif **3.2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif** - Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Dinas Pariwisata
C. PERTANIAN	**1. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** **1.1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian** - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Dinas Pangan dan Pertanian

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	1.2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman **1.3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota** - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil **1.4. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota** - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak **2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** **2.1. Pengembangan Prasarana Pertanian** - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya **2.2. Pembangunan Prasarana Pertanian** - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya **2.3. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota** - Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak **3. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** **3.1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota** - Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis **3.2. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota** - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner **3.3. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner** - Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan **4. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** **4.1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota** - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan **5. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** **5.1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
D. PERDAGANGAN	**1. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN** **1.1. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat** - Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN **2.1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan** - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan **3. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** **3.1. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota** - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota **3.2. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota** - Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan **4. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** **4.1. Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota** - Pameran Dagang Nasional **5. PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** **5.1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan** - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
E. PERINDUSTRIAN	**1. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** **1.1. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota** - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota - Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat **2. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA** 2.1. **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota** - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota **3. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** **3.1. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota** - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) - Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	
UNSUR PENDUKUNG PEMERINTAHAN		
A. SEKRETARIAT DAERAH	**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** **1.1. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah** - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **1.2. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah** - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah - Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah **1.3. Penataan Organisasi** - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan - Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana - Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah **1.4. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan** - Fasilitasi Keprotokolan - Fasilitasi Komunikasi Pimpinan - Pendokumentasian Tugas Pimpinan **2. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** **2.1. Administrasi Tata Pemerintahan** - Penataan Administrasi Pemerintahan - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah **2.2. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat** - Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial - Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat **2.3. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum** - Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah - Fasilitasi Bantuan Hukum - Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum **2.4. Fasilitasi Kerjasama Daerah** - Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri - Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri - Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama **3. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** 3.1. **Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian** - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil - Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD **3.2. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan** - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan **3.3. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa** - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa - Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Sekretariat Daerah

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa **3.4. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam** - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	
B. SEKRETARIAT DPRD	**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** **1.1. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD** - Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD - Pelaksanaan Medical Check Up DPRD **1.2. Layanan Administrasi DPRD** - Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD **2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** **2.1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD** - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah **2.2. Peningkatan Kapasitas DPRD** - Orientasi DPRD - Bimbingan Teknis DPRD - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi **2.3. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat** - Pelaksanaan Reses **2.4. Pembahasan Kerja Sama Daerah** - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi **2.5. Fasilitasi Tugas DPRD** - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD - Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Sekretariat DPRD
UNSUR KEWILAYAHAN		
A. KEC. BUKIT INTAN	**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** **1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan **1.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Evaluasi Kelurahan **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** 3.1. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia **4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** **4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kecamatan Buit Intan

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	- Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK **1.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan se-Kecamatan Bukit Intan
B. KEC. TAMAN SARI	**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** **1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan **1.2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** 3.1. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah** - Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia **4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** **4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** - Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Taman Sari
	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK **1.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	Kelurahan se-Kecamatan Taman Sari

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
C. KEC. PANGKALBALAM	**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** **1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan **1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan **1.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa** - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan **2.2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Evaluasi Kelurahan **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat **4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** **4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** - Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Pangkalbalam
	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK **1.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan se-Kecamatan Pangkalbalam

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
D. KEC. RANGKUI	**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** **1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan **1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan **1.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Evaluasi Kelurahan **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat **4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** **4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** - Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Rangkui
	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK **1.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan**	Kelurahan se-Kecamatan Rangkui

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	Ketertiban Umum - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
E. KEC. GERUNGGANG	**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** **1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan **1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan **1.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Evaluasi Kelurahan **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat **4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** **4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** - Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Kecamatan Gerunggang
	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK **1.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan se-Kecamatan Gerunggang
F. KEC. GABEK	**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN**	Kecamatan Gabek

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	PELAYANAN PUBLIK **1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan** - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan **1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan **1.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Evaluasi Kelurahan **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat **4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** **4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** - Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK **1.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan se-Kecamatan Gabek
G. KEC. GIRIMAYA	**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** **1.1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di**	Kecamatan Girimaya

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	Tingkat Kecamatan - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan **1.2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan **1.3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat** - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan - Evaluasi Kelurahan **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat **4. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** **4.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah** - Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	
	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK **1.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan** - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan **2. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** **2.1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan** - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan **3. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** **3.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum** - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kelurahan se-Kecamatan Girimaya
UNSUR PENGAWASAN		
A. INSPEKTORAT	**1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** **1.1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal** - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah - Reviu Laporan Kinerja - Reviu Laporan Keuangan - Kerjasama Pengawasan Internal - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Inspektorat

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP **1.2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu** - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah - Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu **2. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** **2.1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan** - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan **2.2. Pendampingan dan Asistensi** - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	
UNSUR PENUNJANG PEMERINTAHAN		
A. PERENCANAAN	**1. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** **1.1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan** - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota **1.2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah **1.3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah** - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah **2. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** **2.1. Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD,RPJMD dan RKPD) - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia **2.2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)** - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) **2.3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan** - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	Bappelitbangda

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
B. KEUANGAN	**1. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** **1.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah** - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran - Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan - Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah **1.2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah** - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait **1.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah** - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungj awaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota **1.4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah** - Analisis Investasi Pemerintah Daerah - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak **1.5. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah** - Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota **2. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** **2.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah** - Inventarisasi Barang Milik Daerah - Pengamanan Barang Milik Daerah - Penilaian Barang Milik Daerah - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,	Badan Keuangan Daerah

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota **3. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** **3.1. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah** - Perencanaan pengelolaan pajak daerah - Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah - Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah - Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah - Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Penagihan Pajak Daerah - Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	
C. KEPEGAWAIAN	**1. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** **1.1. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN** - Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN - Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK - Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian - Fasilitasi Lembaga Profesi ASN - Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN - Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian - Pengelolaan Data Kepegawaian **1.2. Mutasi dan Promosi ASN** - Pengelolaan Mutasi ASN - Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN - Pengelolaan Promosi ASN **1.3. Pengembangan Kompetensi ASN** - Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN - Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN - Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional **1.4. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur** - Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur - Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai - Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKPSDMD
D. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**1. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** **1.1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan** - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi **1.2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan** - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial **1.3. Pengembangan Inovasi dan Teknologi** - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Bappelitbangda
E. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	**1. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** **1.1. Pengembangan Kompetensi Teknis** - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKPSDMD

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	1.2. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional - Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
A. PEMERINTAHAN UMUM	**1. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** **1.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan** - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan **2. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** **2.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik** - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah - Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah **3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** 3.1. **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan** - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaa n Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah **4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** **4.1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya** - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah **5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** 5.1. **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan**	Badan Kesbangpol

URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OPD PELAKSANA
	Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

8.1.1. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 18 ayat (1) bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib memprioritaskan pelaksanaan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang meliputi : a). Pendidikan, b). Kesehatan, c). Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, d). Perumahan Rakyat, e). Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, f). Sosial. Ketentuan ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan pedoman penerapannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Sedangkan untuk pedoman teknis masing-masing urusan diatur melalui :

a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhna Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal BIdang Sosial Di Daerah Provinsi dan Di Daerah Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Urusan Trantibumlinmas pada Sub Urusan Bencana Daerah kab/Kota;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan DasarPada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
g. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar pelayanan Minimal, jumlah layanan dasar yang menjadi kewajiban pemerintah di tingkat kabupaten/kota adalah sebanyak 29 layanan dasar, meliputi:

a. pendidikan anak usia dini;
b. pendidikan dasar;

c. pendidikan kesetaraan;
d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
e. pelayanan kesehatan ibu melahirkan;
f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
g. pelayanan kesehatan balita;
h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
l. pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
n. pelayanan kesehatan orang terduga *tuberculosis*;
o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*);
p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
u. pelayanan informasi rawan bencana;
v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Untuk tahun 2021, di lingkup pemerintah Kota Pangkalpinang keseluruhan jenis layanan ini dilaksanakan oleh 7 (tujuh) perangkat daerah, yaitu : Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Sosial. Dalam tabel berikut, dapat dilihat arah kebijakan Kota Pangkalpinang yang mendukung penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

Tabel I.13

Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Yang Mendukung Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pangkalpinang Tahun 2021

Visi : "Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM" (Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	OPD Pengampu
Misi : Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dan Penanggulangan Kemiskinan						
Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya tingkat kemiskinan	Percepatan pengentasan kemiskinan	Pemberian bantuan kepada rumah tangga sasaran, warga lanjut usia dan masyarakat terdampak bencana	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase peningkatan perlindungan dan jaminan sosial kemasyarakatan	Dinas Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saata dans etelah tanggap darurat bencana daerah kab/kota	
Misi : Meningkatkan Kualitas Keamanan Ketertiban, Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan Kesiapsiagaan Dalam Menghadapi Bencana						
Meningkatkan kualitas perlindungan masyarakat untuk ketenteraman dan kenyamanan lingkungan	Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam resiko bencana	Penanggulangan bencana alam	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi bencana - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana - Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	BPBD
	Meningkatnya kondisi keamanan daerah	Optimalisasi perlindungan keamanan dan kenyamanan masyarakat	Peningkatan penegakan hukum dan perundang-undangan	Program Peningkatan dan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Cakupan pelanggaran trantibum yang ditindaklanjuti - Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum dan perda dan perkada - Persentase peningkatan kompetensi PPNS	Satpol PP
				Program Pencegahan, Penanggulangan,	- Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	OPD Pengampu
				Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
Misi : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berkeadilan						
Meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesetaraan gender	Meningkatnya kualitas pendidikan	Perwujudan kualitas pendidikan berbasis karakter	Peningkatan tata kelola/ manajemen pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	- Capaian SPM PAUD - APK SMP - APK SD - APK PAUD - Capaian SPM Pendidikan Kesetaraan - Capaian SPM Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	- Persentase guru pendidikan dasar yang berkualifikasi S1 / D-IV - Persentase guru PAUD dan PNF yang berkualifikasi S1 / D-IV	
	Meningkatnya derajat kesehatan	Peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan masyarakat	- Peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak - Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	- Persentase ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar - Persetase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil - Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar - Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar - Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining pelayanan kesehatan sesuai standar - Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan - Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator	OPD Pengampu
					- Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar - Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir - Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	
Misi : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						
Peningkatan kualitas infrastruktur dasar pembangunan melalui pengelolaan lingkungan hidup yang handal	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	Peningkatan pengelolaan tata kota wilayah	Pemenuhan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program	Program Pengembangan Perumahan	Persentase peningkatan kualitas perumahan	Disperkim
	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar kehidupan masyarakat	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyediaan Air Minum	- Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak - Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau - Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan	Dinas PUPR
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	- Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic - Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak - Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa arah kebijakan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 sudah mengakomodir penerapan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan Peraturan Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Arah kebijakan ini sudah diturunkan sampai pada level perangkat daerah melalui perencanaan dan pelaksanaan program prioritas yang menjadi cantolan dalam penyelenggaraan layanan dasar. Hal-hal yang lebih rinci terkait penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Pangkalpinang Tahun 2021, baik itu terkait target, capaian, dukungan personil, penganggaran maupun permasalahan yang dihadapi dalam masing-masing layanan di setiap urusan pemerintahan wajib layanan dasar, akan diuraian lebih rinci dalam tersendiri.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan yang disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas capaian kinerja makro, capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Bagian pertama yang dilaporkan dalam LPPD adalah Capaian Kinerja Makro. Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, yang dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Indikator kinerja makro meliputi indeks pembangunan manusia, angka kemiskinan, angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan. Secara ringkas, capaian kinerja makro Kota Pangkalpinang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel II. 1
Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Pangkalpinang
Tahun 2020-2021

No	Indikator	Capaian Kinerja		Perubahan
		2020	2021	
1	Indeks Pembangunan Manusia	78,22	78,57	0,45
2	Angka kemiskinan (%)	4,36	4,76	0,4
3	Angka Pengangguran (%)	6,93	6,81	-0,12
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-3,01	9,27	407,97
5	Pendapatan per kapita (%)	-7,63	7,15	14,8
6	Ketimpangan pendapatan (gini ratio)	0,271	0,259	-0,12

Sumber : BPS Kota Pangkalpinang, Tahun 2021

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks pembangunan manusia digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dibangun melalui tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian yang sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Tabel II.2
Komponen Pembentuk IPM Kota Pangkalpinang
Tahun 2019-2021

No.	Komponen	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Umur harapan hidup	73,17	73,30	73,41
2	Harapan lama sekolah	12,99	13,15	13,16
3	Rata-rata lama sekolah (tahun)	9,80	9,92	10,13
4	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah)	15.883	15.663	15.716

Sumber : BPS Pangkalpinang tahun 2021

b. Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam periode 3 tahun terakhir, angka kemiskinan di Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan dari 4,25% di tahun 2019, menjadi 4,36% di tahun 2020 dan 4,76% di tahun 2021 atau sebesar 0,4% dari tahun sebelumnya. Kenaikan angka kemiskinan ini sebagain besar masih disebabkan oleh dari pandemi Covid-19 yang melanda. Perilaku masyarakat dan kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas serta interaksi masyarakat di luar rumah, mengakibatkan sebagian masyarakat berkurang pendapatannya, bahkan ada yang kehilangan pekerjaannya.

c. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu wilayah, maka semakin sempit kesempatan kerja di wilayah tersebut. Angka pengangguran di Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dalam kondisi fluktuatif. Pada tahun 2019, angka pengangguran Kota Pangkalpinang adalah 5,01% dan mengalami kenaikan sebesar 1,92% di

tahun 2020 menjadi sebesar 6,93%. Akan tetapi di tahun 2021, angka tersebut kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 6,81% atau turun sebesar 0,12%.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah beserta stake holder lainnya dalam mengatasi dampak dari pandemi Covid-19, seperti pemberian bantuan baik itu berupa keuangan, keterampilan maupun pendampingan bagi masyarakat yang terdampak pandemi, turut menyumbang dalam menurunkan angka penangguran ini.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan Perkembangan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian pada tahun tertentu terhadap nilai tahun sebelumnya yang dihitung berdasarkan PDB/PDRB atas dasar harga konstan. Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita , indeks gini serta rasio penduduk miskin. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Sedangkan dari versi penilaiannya, PDRB disajikan dalam 2 versi penilaian yaitu "atas dasar harga berlaku" (PDRB-ADHB) dan "atas dasar harga konstan" (PDRB-ADHK).

PDRB ADHB Kota Pangkalpinang tahun 2021 adalah 15.385,65 milar rupiah. PDRB ADHB Kota Pangkalpinang dalam periode 3 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel II.3
PDRB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Pangkalpinang (miliar rupiah)
Tahun 2019-2021

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	682,41	742,48	813,67
B	Pertambangan dan penggalian	-	-	-
C	Industri pengolahan	1 823,16	1 723,91	2 644,57
D	Pengadaan listrik dan gas	14,24	14,51	14,78
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,34	4,67	4,81
F	Konstruksi	1 655,65	1 638,85	1 767,88
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3 668,29	3 498,40	3 782,92
H	Transportasi dan pergudangan	894,26	841,27	948,63
I	Penyediaan akomodasi makanan dan minuman	530,07	552,42	638,13
J	Informasi dan komunikasi	473,54	560,06	612,62
K	Jasa keuangan dan asuransi	669,90	626,18	683,49
L	Real estate	743,19	782,44	840,60
M,N	Jasa perusahaan	72,60	64,50	72,23
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	1 029,52	999,68	1 049,55

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
P	Jasa pendidikan	807,02	826,86	864,14
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	280,17	288,10	341,43
R,S,T,U	Jasa lainnya	300,60	291,62	306,20
	Product Domestic Regional Bruto (PDRB)	**13 648,93**	**13 455,95**	**15 385,65**

Sumber : BPS Pangkalpinang Tahun 2022

Sedangkan untuk PDRB ADHK 2010 Kota Pangkalpinang untuk periode 2019-2021 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.4
PDRB Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Pangkalpinang (miliar rupiah) Tahun 2019-2021

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021
A	Pertanian, kehutanan dan perikanan	410,45	434,80	447,41
B	Pertambangan dan penggalian	-	-	-
C	Industri pengolahan	1 446,48	1 381,16	1 787,96
D	Pengadaan listrik dan gas	8,09	8,16	8,36
E	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	2,45	2,59	2,63
F	Konstruksi	1 022,11	1 007,33	1 049,70
G	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	2 412,06	2 261,42	2 369,45
H	Transportasi dan pergudangan	574,94	520,95	566,74
I	Penyediaan akomodasi makanan dan minuman	327,27	311,67	344,09
J	Informasi dan komunikasi	427,00	505,47	551,21
K	Jasa keuangan dan asuransi	437,81	408,38	425,51
L	Real estate	471,98	490,17	520,68
M,N	Jasa perusahaan	41,95	34,83	36,98
O	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	654,09	609,86	636,79
P	Jasa pendidikan	456,38	452,36	462,31
Q	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	191,01	193,38	222,38
R,S,T,U	Jasa lainnya	185,23	174,04	179,69
	Product Domestic Regional Bruto (PDRB)	**9 069,28**	**8 796,58**	**9 611,88**

Sumber : BPS Pangkalpinang Tahun 2022

Bila dilihat dari komposisi tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2021 perekonomian Kota Pangkalpinang ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan di mana masing sektor memberikan kontribusi sebesar 24,59 persen dan 17,19 persen.

e. Pendapatan Per Kapita

Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimilki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Bila pendapatan regional ini dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu pendapatan perkapit yang biasanya digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah secara umum.

Sesuai data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, laju pertumbuhan PDRB per kapita Kota Pangkalpinang tahun 2020 adalah adalah Rp. 61.811.000 dan di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp. 69.308.000 atau sebesar 12,13 persen.

f. Ketimpangan Pendapatan

Rasio gini atau koefisien gini sebagai indikator ketimpangan pendapatan adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan diantara populasi. Indeks gini memiliki kisaran nilai 0 sampai 1. Nilai 0 menunjukkan distribusi yang sangat merata yaitu setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang sama. Sedangkan nilai 1 menunjukkan distribusi yang timpang atau tidak sempurna yaitu satu orang memiliki segalanya sementara orang lain tidak memiliki apa-apa.

Sesuai dengan ketersediaan data, ketimpangan pengeluaran penduduk perkotaan pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,259, lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020 yang tercatat sebesar 0,271.

2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran (IKK *Output*)

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
WAJIB TERKAIT LAYANAN DASAR					
PENDIDIKAN	1	Jumlah satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi	72 lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	2.567 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	3	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggaran untuk pembebasan biaya pendidikan PAUD direfocussing untuk penanganan COVID-19
	4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD	325 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	5	Jumlah pendidik pada PAUD	429 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	6	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	45 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	7	Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dan lembaga pemerintah yang berwenang	16 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	8	Jumlah SD dan SMP Negeri terakreditasi	76 sekolah (66 SD + 10 SMP)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggaran untuk perlengkapan dasar peserta didik SD direfocussing untuk penanganan COVID-19
	10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggaran untuk perlengkapan dasar peserta didik SMP direfocussing untuk penanganan COVID-19
	11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	18.015 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	7.871 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.147 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	554 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	1.231 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	504 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	540 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	243 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	470 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	212 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang mempunyai ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	364 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang mempunyai ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	253 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	71 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	15 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/sederajat	437 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat	187 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	27	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi	5 lembaga	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	28	Jumlah peserta didik kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	1.848 siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	29	Jumlah peserta didik kesetaraan yang menerima pembebasan biaya pendidikan	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggaran untuk pembebasan biaya peserta didik kesetaraan ddirefocussing untuk penanganan *Covid 19*
	30	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	487 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	31	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	46 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	32	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	31 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	33	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	34	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1	8 orang	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
KESEHATAN	35	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	7 rumah sakit	Dinas Kesehatan	
	36	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	3 rumah sakit	Dinas Kesehatan	
	37	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan antenatal)	8.450 buku KIA	Dinas Kesehatan	
	38	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan antenatal	931 orang	Dinas Kesehatan	
	39	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan persalinan standar)	8.450 buku KIA	Dinas Kesehatan	
	40	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan standar	931 orang	Dinas Kesehatan	
	41	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan kesehatan neonatal esensial)	8.450 buku KIA	Dinas Kesehatan	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	42	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar	926 orang	Dinas Kesehatan	
	43	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan kesehatan balita)	8.450 buku KIA	Dinas Kesehatan	
	44	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	1.238 orang	Dinas Kesehatan	
	45	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar)	1.200 rapor kesehatan	Dinas Kesehatan	
	46	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	1.312 orang	Dinas Kesehatan	
	47	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (skrining kesehatan orang usia 15-59 tahun)	9 posbindu kit	Dinas Kesehatan	
	48	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (skrining kesehatan orang usia 15-59 tahun)	1.312 orang	Dinas Kesehatan	
	49	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (skrining kesehatan orang usia 60 tahun ke atas)	17 lansia kit, 1.510 buku kesehatan lansia, 54 Exl instrument P3G	Dinas Kesehatan	
	50	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (skrining kesehatan orang usia 60 tahun ke atas)	1.312 orang	Dinas Kesehatan	
	51	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (HT)	9 set tensi meter	Dinas Kesehatan	
	52	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (HT)	1.312 orang	Dinas Kesehatan	
	53	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (DM)	574 box BMPH strip tes glucose	Dinas Kesehatan	
	54	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (DM)	1.312 orang	Dinas Kesehatan	
	55	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (ODGJ berat)	159.895, yg terdiri atas : 5800 tablet haloperizol 5 mg; 80 ampul diazepam 5mg/ml; 15 ampul haloperidol dekanoat injeksi 50 mg/ml; 3.100 tablet klorpromazin HCL 5 mg; 20.800 ampul klozapine 25 mg; 79.300 tablet risperidol; 49.200 tablet triheksifenidil 2 mg; 1.600 tablet trifluoperazine HCL	Dinas Kesehatan	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
			5mg		
	56	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (ODGJ berat)	16 orang	Dinas Kesehatan	
	57	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (TBC)	7.392 yang terdiri atas : 15 X Banner; 849 TCM; 20 reagent Zn TB; 6.399 pot dahak; 109 kaca slide	Dinas Kesehatan	
	58	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (TBC)	888 orang	Dinas Kesehatan	
	59	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia (HIV)	5.425 buah yang terdiri atas : 15 X Banner; 2.700 rapid HIV; 2700 rapid sivilis	Dinas Kesehatan	
	60	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar (HIV)	1.104 orang	Dinas Kesehatan	
PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	61	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat WS di Kota Pangkalpinang
	62	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (m)	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat WS di Kota Pangkalpinang
	63	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat WS di Kota Pangkalpinang
	64	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kab/kota (ha)	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat WS di Kota Pangkalpinang
	65	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/[oa pengelolaan SD Air WS kewenanangan kab/kota	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat saluran irigasi di Kota Pangkalpinang
	66	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kab/kota	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat saluran irigasi di Kota Pangkalpinang
	67	Data prasarana dan sarana pengamanan pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota	4	Dinas PUPR	
	68	Persentase panjang jaringan irigasi primer kondisi baik	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat saluran irigasi di Kota Pangkalpinang
	69	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat saluran irigasi di Kota Pangkalpinang
	70	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat saluran irigasi di Kota Pangkalpinang
	71	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten/kota (Ada/Tidak ada)	Ada	Dinas PUPR	
	72	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA	Ada	Dinas PUPR	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kab/Kota (Ada/Tidak)			
	73	Jumlah BUMD dan/atau UPTD Kab/Kota Penyelenggara SPAM (Ada/Tidak)	Ada	Dinas PUPR	
	74	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan Penyelenggaraan SPAM	0	Dinas PUPR	
	75	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	1	Dinas PUPR	
	76	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar penggunaan SPALD S	36.823 unit	Dinas PUPR	
	77	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	917 unit	Dinas PUPR	
	78	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	37.740 unit	Dinas PUPR	
	79	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	35 rumah	DLH	
	80	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0	Dinas PUPR	Masyarakat sudah dilakukan sosialisasi tentang pengolaha lumpur tinja di septic tank dengan zat pengurai, tetapi masyarakat menolak dan meminta layanan penyedotan lumpur tinja
	81	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengoahan air limbah domestik	917	Dinas PUPR	
	82	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	96,9%	Dinas PUPR	
	83	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	96,9%		
	84	Kinerja pemyediaan pelayanan SPALD T akses aman	18		
	85	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	1		
	86	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	2		

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	87	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	2		
	88	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	53,9%		
	89	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	0		
	90	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	0		
	91	Jumlah IMB yang diberikan oleh Kab/Kota dalam tahun eksisting	1.709	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	92	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Ada, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung	Dinas PUPR	
	93	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan Gedung (Ada/Tidak)	Ada, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Bangunan Gedung	Dinas PUPR	
	94	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	17 bangunan	Dinas PUPR	
	95	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah kab/kota	0	Dinas PUPR	
	96	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	2.704	Dinas PUPR	
	97	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kab/kota yang dipelihara/dirawat	23	Dinas PUPR	
	98	Panjang jalan berdasarkan SK yang diterbitkan Kepala Daerah dalam SK jalan Kewenangan Kab/Kota	403.137 km	Dinas PUPR	
	99	Panjang jalan yang dibangun	20.714	Dinas PUPR	
	100	Panjang jembatan yang dibangun	0,015 km	Dinas PUPR	
	101	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	11,133 km	Dinas PUPR	
	102	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	0	Dinas PUPR	Tidak ada jembatan yang diganti/dilebarkan selama tahun 2021
	103	Panjang jalan yang direkonstruksi/ direhabilitasi	0,694 km	Dinas PUPR	
	104	Panjang jembatan yang direhabilitasi		Dinas PUPR	
	105	Panjang jalan yang dipelihara	5.244 km	Dinas PUPR	
	106	Panjang jembatan yang dipelihara	0.024 km	Dinas PUPR	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	107	Jumlah pelatihan tenaga ahli konstruksi di wilayah kab/kota	0	Dinas PUPR	Tidak ada kegiatan pelatihan tenaga ahli konstruksi di tahun 2021
	108	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota	0	Dinas PUPR	Tidak dilakukan pendataan ttg tenaga konstruksi di Pangkalpinang
	109	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kab/kota	0	Dinas PUPR	
	110	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kab/kota yang aktif dengan data termutakhir	Tidak Ada	Dinas PUPR	Belum terdapat sistem informasi pembina jasa konstruksi di Kota Pangkalpinang
	111	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	Ada, RUP	Dinas PUPR	
	112	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Tidak ada	Dinas PUPR	Belum tersedia data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi yang bersumber dari APBN di Kota Pangkalpinang tahun 2021
	113	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kab/kota untuk tahun berjalan yang bersumber pada pendanaan lainnya	Tidak ada	Dinas PUPR	Belum tersedia data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi yang bersumber dari APBD di Kota Pangkalpinang tahun 2021
	114	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Tidak ada	Dinas PUPR	Belum terdapat sistem informasi tentang pasar jasa konstruksi di Pangkalpinang tahun 2021
	115	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kab/kota	Tidak ada	Dinas PUPR	Belum terdapat website Dinas PUPR Kota Pangkalpinang tahun 2021
	116	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analis konstruksi di wilayah kab/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK)yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya	Ada, 8 pelatihan	Dinas PUPR	
	117	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab/kota yang dibuktikan dengan	8 orang	Dinas PUPR	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis			
	118	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	Tidak ada	Dinas PUPR	Belum dilakukan pendataan tenaga kerja konstruksi terlatih
	129	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	Tidak ada	Dinas PUPR	Belum dilakukan pendataan badan usaha bidang konstruksi di Kota Pangkalpinang, sehingga belum dilakukan pembinaan
	120	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak terdapat data dan informasi terkait pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui
	121	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak terdapat informasi mengenai hasil pegawasan ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi
	122	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak terdapat kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasan
	123	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, kalsifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa kontruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak terdapat data pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan
	124	Jumlah badan usaha memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	Tidak ada	Dinas PUPR	Belum dilakukan pendataan
	125	Jumlah usaha perorangan yang memiliki TDUP di wilayah kab/kota	Tidak ada	Dinas PUPR	Belum dilakukan pendataan
	126	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah kab/kota	Tidak ada	Dinas PUPR	
	127	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak ada badan usaha yang mendapatkan pembinaan pada tahun 2021
	128	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak ada data terkait pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP pada tahun 2021

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	129	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak ada data terkait pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan
	130	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada	Dinas PUPR	Tidak terdapat kecelakaan konstruksi pada tahun 2021
	131	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak ada	Dinas PUPR	Tidak ada data terkait pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasan
PERUMAHAN RAKYAT	132	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan banjir dan rencana penanganannya	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 belum ada SK Penetapan Bencana serta Dokumen Rencana Aksi Penanganan Bencana pada Disperkim Kota Pangkalpinang
	133	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 belum ada SK Penetapan Bencana serta Dokumen Rencana Aksi Penanganan Bencana pada Disperkim Kota Pangkalpinang
	134	Jumlah RT, KK dan jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 belum ada SK Penetapan Bencana serta Dokumen Rencana Aksi Penanganan Bencana pada Disperkim Kota Pangkalpinang
	135	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 belum ada SK Penetapan Bencana serta Dokumen Rencana Aksi Penanganan Bencana pada Disperkim Kota Pangkalpinang
	136	Jumlah unit rumah korban bencana dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 belum ada SK Penetapan Bencana serta Dokumen Rencana Aksi Penanganan Bencana pada Disperkim Kota Pangkalpinang
	137	Jumlah unit rumah korban bencana dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 belum ada SK Penetapan Bencana serta Dokumen Rencana Aksi Penanganan Bencana pada Disperkim Kota Pangkalpinang
	138	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 belum ada SK Penetapan Bencana serta Dokumen Rencana Aksi Penanganan Bencana

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
					pada Disperkim Kota Pangkalpinang
	139	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 belum ada SK Penetapan Bencana serta Dokumen Rencana Aksi Penanganan Bencana pada Disperkim Kota Pangkalpinang
	140	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 belum ada SK Penetapan Bencana serta Dokumen Rencana Aksi Penanganan Bencana pada Disperkim Kota Pangkalpinang
	141	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitas ganti kerugian aset property berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 belum ada SK Penetapan Bencana serta Dokumen Rencana Aksi Penanganan Bencana pada Disperkim Kota Pangkalpinang
	142	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian ha katas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 belum ada SK Penetapan Bencana serta Dokumen Rencana Aksi Penanganan Bencana pada Disperkim Kota Pangkalpinang
	143	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 belum ada SK Penetapan Bencana serta Dokumen Rencana Aksi Penanganan Bencana pada Disperkim Kota Pangkalpinang
	144	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 belum ada SK Penetapan Bencana serta Dokumen Rencana Aksi Penanganan Bencana pada Disperkim Kota Pangkalpinang
	145	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 belum ada SK Penetapan Bencana serta Dokumen Rencana Aksi Penanganan Bencana pada Disperkim Kota Pangkalpinang
	146	Jumlah total luasan (ha) pengadaan tanah	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 belum ada SK Penetapan Bencana serta Dokumen Rencana Aksi Penanganan Bencana pada Disperkim Kota Pangkalpinang
	147	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh < 10 ha	150,09 ha	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
	148	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	169 unit	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
	149	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan rumah	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Pada tahun 2021 tidak terdapat penanganan infrastruktur kawasan kumuh
	150	Jumlah rumah di kab/kota	39.858 unit	Dinas Perumahan &	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
				Kawasan Permukiman	
	151	Jumlah unit PK RTLH	169 unit	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
	152	Jumlah rumah tidak layak huni	1.5.11 unit	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
	153	Jumlah rumah yang tidak dihuni	2.237 unit	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
	154	Rasio rumah dan KK	40.907 : 39.858 = 1,026	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
	155	Jumlah rumah pembangunan baru	227 unit	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
	156	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	15.222 perumahan	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
	157	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	31.182 unit	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
	158	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	36.200 unit	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
	159	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site/ off site)	37.304 unit	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
	160	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	2.004 perumahan	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
	161	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	15.536 unit	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
	162	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	96	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
	163	Jumlah pengembang yang terregistrasi	0	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	Belum dilakukan pendataan terhadap pengembang
	164	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	35 pengembang	Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman	
TRANTIBUMLINMAS	165	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kab/kota yang ditangani	80 pelanggaran	Satpol PP	
	166	Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	0	Satpol PP	
	167	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	47 perda	Satpol PP	
	168	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	2	Satpol PP	
	169	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	1 SOP	Satpol PP	
	170	Tersedianya sarana prasarana minimal	209 buah (7 jenis)	Satpol PP	
	171	Persentase penyelesaian dokumen KRB	0	BPBD	Dokumen KRB direncanakan disusun

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sampai dinyatakan sah/legal			tahun 2022
	172	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	$\frac{5.034}{6.000} x\ 100\% = 84\%$	BPBD	
	173	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	RPB disusun setelah adanya dokumen KRB, sedangkan KRB direncanakan disusun tahun 2022
	174	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	0	BPBD	Dokumen Renkon disusun setelah adanya dokumen KRB, sedangkan KRB direncanakan disusun tahun 2022
	175	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	$\frac{84}{84} x\ 100\% = 100\%$	BPBD	
	176	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	0	BPBD	Tahun 2021 terdapat sub kegiatan mitigasi bencana, akan tetapi dengan pertimbangan kondisi pandemi Covid 19, maka kegiatan yang melibatkan / mengumpulkan masyarakat tidak dilaksanakan
	177	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalpos penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	50 %	BPBD	
	178	Persentase warga negara yang mendapatkan peralatan perlindungan	1000	BPBD	
	179	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 untuk setiap status KLB	0	BPBD	Tidak ada penetapan KLB
	180	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100 %	BPBD	
	181	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	$\frac{110}{110} x\ 100\% = 100\%$	BPBD	
	182	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	96 %	BPBD	
	183	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kab/Kota	84 kejadian	Bidang Damkar, Satpol PP	
	184	Tersedianya pos sektor damkar yang	0	Bidang Damkar, Satpol PP	Kurangnya SDM, Sarana Prasarana dan

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan			Efisiensi Anggaran
	185	Tersedianya aparatur selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	Bidang Damkar, Satpol PP	
	186	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	0	Bidang Damkar, Satpol PP	Kurangnya SDM, Sarpras dan Anggaran
	187	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	12 jenis	Bidang Damkar, Satpol PP	
	188	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam kebakaran	11 orang	Bidang Damkar, Satpol PP	
	189	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	Bidang Damkar, Satpol PP	Efisiensi anggaran dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi relawan kebakaran
	190	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	0	Bidang Damkar, Satpol PP	Efisiensi anggaran dan peningkatan virus Covid-19
SOSIAL	191	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	1 layanan, SLRT	Dinas Sosial	
	192	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	0	Dinas Sosial	Data belum bisa terpilah dalam menu sistem aplikasi terpadu DTKS Kemensos RI dan masih menunggu update selanjutnya
	193	Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk	1 tim	Dinas Sosial	
	194	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	45 orang	Dinas Sosial	
	195	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	0	Dinas Sosial	Dinsos Kota pangkalpinang belum memiliki kendaraan roda 4 akses khusus layanan darurat
	196	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	21 orang	Dinas Sosial	
	197	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat	1 unit	Dinas Sosial	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar			
	198	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	0	Dinas Sosial	Tidak ada penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang
	199	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	31 orang	Dinas Sosial	
	200	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	0	Dinas Sosial	Alat bantu belum tersedia di shelter / rumah singgah karena anggaran belum memadai untuk penyediaan alat bantu
	201	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	0	Dinas Sosial	Ketersediaan anggaran belum mencukupi
	202	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	0	Dinas Sosial	Paket perbekalan kesehatan belum tersedia karena anggaran belum mencukupi
	203	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	0	Dinas Sosial	Belum terdapat tenaga kesehatan yang ditempatkan di rumah singgah
	204	Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	67 orang	Dinas Sosial	
	205	Jumlah penyandang disablitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, di masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	45 orang	Dinas Sosial	
	206	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	41 orang	Dinas Sosial	
	207	Jumlah penyandang disablitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	0	Dinas Sosial	Keterbatasan anggaran
	208	Jumlah penyandang disablitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan dasar	71 orang	Dinas Sosial	
	209	Jumlah penyandang disablitas terlantar,	45 orang	Dinas Sosial	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga			
	210	Jumlah penyandang disablitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	45 orang	Dinas Sosial	
	211	Jumlah penyandang disablitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	4 orang	Dinas Sosial	
	212	Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	88 KK	Dinas Sosial	
	213	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	159 KK	Dinas Sosial	
	214	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	0	Dinas Sosial	Belum terdapat tempat penampungan pengungsi permanen pada tahun 2021
	215	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	340 paket	Dinas Sosial	
	216	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	159 orang	Dinas Sosial	
	217	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	51 orang	Dinas Sosial	
WAJIB TIDAK TERKAIT LAYANAN DASAR					
KETENAGAKERJAAN	218	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kab/Kota	1 dokumen RTKD DPMPTSP dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2024	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	219	Presentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	Tidak dilaksanakan karena tidak ada anggaran
	220	Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kab/Kota	616 perusahaan	- DPMPTSP & Tenaga Kerja - WLKP	
	221	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	$\frac{1}{2}\ x\ 10\% = 50\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	222	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	$\frac{3}{3}\ x\ 100\% = 100\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	223	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	$\frac{3}{45}\ x\ 100\% = 6{,}67\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	224	Persentase LPK yang terakreditasi	$\frac{7}{9} x\ 100\% = 77{,}78\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	225	Persentase LPK yang memiliki perizinan	$\frac{9}{9}\ x\ 100\% = 100\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	226	Jumlah penganggur yang dilatih	45 orang	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	227	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	$\frac{45}{45}\ x\ 100\% = 100\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	228	Persentase penyerapan lulusan	$\frac{13}{45}\ x\ 100\% = 28{,}89\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	229	Lulusan bersertifikat kompetensi	$\frac{9}{45}\ x\ 100\% = 20\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	230	Jumlah Calon Peserta Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	Tidak ada CPMI/CTKI yang dilatih karena yang bersangkutan tidak lolos wawancara sehingga tidak jadi diberangkatkan
	231	Jumlah pelatihan Calon Peserta Migran Indonesia (CPMI) / Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	CPMI/CTKI yang terdaftar belum lolos ke tahap seleksi pelatihan bahasa
	232	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	Pada tahun 2021 tidak ada perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas
	233	Data tingkat produktivitas total	-59%	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	234	Persentase perusahaan yang telah memiliki peraturan perusahaan (PP)	$\frac{22}{324}\ x\ 100\% = 6{,}79\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	235	Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	Tidak ada perusahaan yang mendaftarkan PKB pada tahun 2021
	236	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB diluar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	62	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	237	Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	$\frac{5}{22}\ x\ 100\% = 22{,}73\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	238	Persentase perusahaan yang telah terdaftar segai peserta BPJS Ketenagakerjaan	$\frac{1.217}{616}\ x\ 100\% = 197{,}56\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	239	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	$\frac{33}{616}\ x\ 10\% = 5{,}36\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	240	Jumlah mogok kerja	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	Selama tahun 2021 tidak terdapat laporan mogok kerja
	241	Jumlah penutupan perusahaan	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	Tidak terdapat penutupan perusahaan di tahun 2021
	242	Jumlah perselisihan kepentingan	1 kasus	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	243	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 perusahaan	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	Tidak ada perusahaan yang melaporkan perselisihan antar SP/SB
	244	Jumlah perselisihan PHK	22 kasus	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	245	Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	71 orang	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	246	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	5 kasus	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	247	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kab/Kota yan diberdayakan	Ada, 1 LKS	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	248	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama Mediator Hubungan Industrial	$\frac{16}{33} x\ 100\% = 48{,}48\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	249	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kab/Kota	252 lowongan	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	250	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kab/Kota	142 + 5.961 = 6.103	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	251	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kab/Kota	2 BKK	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	252	Jumlah tenaga kerja khusus terdaftar dalam satu Kab/Kota	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	Tidak ada tenaga kerja khusu yang terdaftar di Kota Pangkalpinang pada tahun 2021
	253	Jumlah pejabat fungsional Pengantar Kerja	2 orang	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	254	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja 940cal dalam satu wilayah Kab/Kota	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	Tidak ada pengajuan LPTKS pada tahun 2021
	255	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagkaerjaan Kab/kota	9 perjanjian kerja	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	256	Jumlah penempatan ternaga kerja melalui Informasi pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	56 orang	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	257	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	CPMI/CTKI tidak ada yang lolos seleksi sehingga tidak ada CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi
	258	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	1 orang	DPMPTSP & Tenaga Kerja	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		(CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata			
	259	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	Tidak CPMI/CTKI yang dipulangkan ke Pangkalpinang
	260	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	CPMI/CTKI tidak ada yang lolos seleksi sehingga tidak ada CPMI/CTKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja
	261	Data pemberdayaan pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	Tidak ada pemberdayaan PMI/TKI purna di Pangkalpinang
	262	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentukan	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	LTSA diperuntukkan bagi daerah kantong TKI, Pangkalpinang bukan merupakan kantong TKI
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	263	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kab/Kota yang telah dilatih PUG	34 lembaga	DPPPAKB	
	264	Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kab/Kota	9 program	DPPPAKB	
	265	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemerintah Kab/Kota (Dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	**4 media** Radio Prima FM, Radio Palupi FM, Radio Sonora FM dan Radio Motion FM	DPPPAKB	
	266	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	0	DPPPAKB	Pada tahun 2021, sudah ada lembaga layanan anak tetapi belum memiliki standar pelayanan minimal. Hal ini karena keterbatasan anggaran pada DPPPAKB Tahun 2021
	267	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	$\frac{30}{30}\ x\ 100\% = 100\%$	DPPPAKB Polres Pangkalpinang	
	268	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	0	DPPPAKB	Selama tahun 2021 tidak ada lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan karena keterbatasan anggaran
	269	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemerintah kab/kota (APBD Kab/Kota)	0	DPPPAKB	Selama tahun 2021 tidak ada lembaga layanan anak yang mendapat bantuan keuangan/ fasilitas oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang karena keterbatasan anggaran
	270	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang	3 lembaga	Badan Kesbangpol	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		bergerak dalam bidang perempuan tingkat kab/kota yang mendapat pelatihan			
	271	Jumlah kader perempuan tingkat kab/kota yang sudah dilatih	0	DPPPAKB	Selama tahun 2021 tidak ada kader perempuan yang dilatih karena keterbatasan anggaran
	272	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	0	DPPPAKB	Selama tahun 2021 tidak terdapat lembaga layanan pemberdayaanperempuan yang mendapatkan pelatihan karena keterbatasan anggaran
	273	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kaB/kota	0	DPPPAKB	Selama tahun 2021 tidak terdapat lembaga layanan pemberdayaanperempuan yang mendapatkan bantuan keuangan karena keterbatasan anggaran
	274	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	1 program	DPPPAKB	
	275	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	**3 lembaga** Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pangkalpinang, PUSPAGA, Gugus Tugas Kota Layak Anak	DPPPAKB	
	276	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	$\frac{17}{17}\ x\ 100\% = 100\%$	DPPPAKB	
PANGAN	277	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada	Dinas Pangan & Pertanian	
	278	Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Tidak ada	Dinas Pangan & Pertanian	Tidak adanya penyaluran bahan pokok pada tahun 2021 karena tidak ada permintan dari masyarakat
	279	Tersedianya regulasi harga minimum daerah pangan lokal	Tidak ada	Dinas Pangan & Pertanian	Tidak ada regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal karena belum adanya dasar hukum dari peraturan di atasnya
	280	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada 3 kegiatan : Monitoring & evaluasi P2L, Pembagian Srapras P2L dan Gelar Pangan	Dinas Pangan & Pertanian	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	281	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	Dinas Pangan & Pertanian	
	282	Tertanganinya kerawanan pangan	Tidak Ada	Dinas Pangan & Pertanian	Tidak adanya penyaluran bahan pokok pada tahun 2021 karena tidak ada permintan dari masyarakat
	283	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Tidak Ada	Dinas Pangan & Pertanian	Tidak adanya penyaluran bahan pokok pada tahun 2021 karena tidak ada permintan dari masyarakat
	284	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada, kegiatan Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan Tahun 2021	Dinas Pangan & Pertanian	
PERTANAHAN	285	SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota	0	Dinas PUPR	Tahun 2021 tidak terdapat penerbitgan izin lokasi
	286	SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat TOL di Kota Pangkalpinang
	287	Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat tanah kelebihan maksimum/absentee di Kota Pangkalpinang tahun 2021
	288	Dokumen izin membuka tanah	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat pengajuan izin membuka lahan pada tahun 2021
	289	Dokumen perencanaan penggunaan tanah Kab/kota	0	Dinas PUPR	Belum ada dokumen perencanaan penggunaan tanah Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2021
LINGKUNGAN HIDUP	290	Hasil perhitungan kab/kota terhadap : - Indeks Kualitas Air (IKA)	47,2555	Dinas Lingkungan Hidup	
		- Indeks Kualita Udara (IKU)	86,7132		
		- Indeks Tutupan Hutan	52,696		
	291	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kab/Kota	Data tersedia : **3** jenis a. 104 unit pengangkut, kapasitas angkutan 510 m^3 / hari b. Kapasitas TPA : 216.000 m^3 c. Jumlah TPST : 1 kapasitas 216.000 m^3	Dinas Lingkungan Hidup	
	292	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbikan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	141 izin	Dinas Lingkungan Hidup	
	293	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di provinsi terhadapusaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	0	Dinas Lingkungan Hidup	Beluma adanya JFT pengawasa lingkungan di Kota Pangkalpinang

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		yang diterbitkan pemerintah kab/kota			
	294	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kab/kota	0	Dinas Lingkungan Hidup	Belum ada masyarakat hukum adat yang diakui secara resmi di Kota Pangkalpinang
	295	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH, Jumlah lembaga adat yang diberikan diklat	0	Dinas Lingkungan Hidup	Belum ada masyarakat hukum adat yang diakui secara resmi di Kota Pangkalpinang
	296	Jumlah lembaga adat yang diberikan diklat	0	Dinas Lingkungan Hidup	Belum ada masyarakat hukum adat yang diakui secara resmi di Kota Pangkalpinang
	296	Penanganan pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kab/kota yang ditangani	$\frac{3}{5}\ x\ 100\% = 60\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
ADMNISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	298	Penerbitan akta perkawinan	$\frac{244}{244}\ x\ 100\% = 100\%$	Disdukcapil	
	299	Penerbitan akta perceraian	$\frac{38}{38}\ x\ 100\% = 100\%$	Disdukcapil	
	300	Penerbitan akta kematian	$\frac{1.602}{1.602}\ x\ 100\% = 100\%$	Disdukcapil	
	301	Penyajian data kependudukan	$\frac{2}{2}\ x\ 100\% = 100\%$	Disdukcapil	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	302	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa (persentase pengentasan desa tertinggal)	0	DPPPAKB	Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang
	303	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya (persentase pengentasan desa tertinggal)	0	DPPPAKB	Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang
	304	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan (persentase pengentasan	0	DPPPAKB	Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		desa tertinggal)			
	305	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (persentase pengentasan desa tertinggal)	0	DPPPAKB	Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang
	306	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa (persentase peningkatan status desa mandiri)	0	DPPPAKB	Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang
	307	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya (persentase peningkatan status desa mandiri))	0	DPPPAKB	Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang
	308	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan (persentase peningkatan status desa mandiri))	0	DPPPAKB	Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang
	309	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan (persentase peningkatan status desa mandiri))	0	DPPPAKB	Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	310	Tersedianya Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang diperdakan	Ada	DPPPAKB	
	311	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21 tahun	DPPPAKB Susenas BPS	
	312	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	8,26	DPPPAKB Susenas BPS	
	313	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	$\frac{2.546}{3.024} x\ 100\% = 84{,}19\%$	DPPPAKB	
	314	Jumlah stake holders / pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	30 orang	DPPPAKB	
	315	Persentase fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	$\frac{17}{20} x\ 100\% = 85\%$	DPPPAKB	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	316	Persentase peserta KB Aktif (PA) metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	$\frac{3.513}{18.618}$ x $100\% = 18{,}87\%$	DPPPAKB	
	317	Pemerintah daerah kab/kota yang memiliki kelompok kerja KKBPK yang efektif	179 kelompok	DPPPAKB	
	318	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	48,85%	DPPPAKB	
	319	Persentase kepesertaan KB di kab/kota dengan kersertaan rendah	55,38%	DPPPAKB	
	320	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	0	DPPPAKB	Pada tahun 2021 tidak ada kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)
PERHUBUNGAN	321	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C	$\frac{(74:3)}{64}$ x $100\% = 38{,}5\%$	Dinas Perhubungan	
	322	Terlaksananya pelayanan uji berkala	$\frac{4.093}{5.198}$ x $100\% = 78{,}74\%$	Dinas Perhubungan	
	323	Penetapan tarif angkutan orang dalam kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	0	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang tidak melayani ASDP di Kota Pangkalpinang
	324	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	59,65%	Dinas Perhubungan	
KOMUNIKASI & INFORMATIKA	325	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	$\frac{7}{33} x\ 100\% = 21{,}21\%$	Diskominfo	
	326	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	$\frac{3}{33}\ x\ 100\% = 9\%$	Diskominfo	
	327	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	YA	Diskominfo	
	328	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan public pada pemerintah daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan	$\frac{54}{54}\ x\ 100\% = 100\%$	Diskominfo	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Koninfo No. 5/2015			
	329	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	$\frac{30}{33}\ x\ 100\% = 90\%$	Diskominfo	
	330	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	$\frac{33}{33}\ x\ 100\% = 100\%$	Diskominfo	
	331	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	$\frac{9}{11} x\ 100\% = 81{,}81\%$	Diskominfo	
	332	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	$\frac{5}{11} x\ 100\% = 45{,}45\%$	Diskominfo	
	333	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{102}{102} x\ 100\% = 100\%$	Diskominfo	
	334	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintahan	$\frac{24}{42}\ x\ 100\% = 57{,}14\%$	Diskominfo	
	335	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	$\frac{33}{33} x\ 100\% = 100\%$	Diskominfo	
	336	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	$\frac{31}{33}\ x\ 100\% = 93{,}94\%$	Diskominfo	
	337	Persentase perangkat daerah yang memperbarui datanya sesuai siklus jenis data	$\frac{33}{33}\ x\ 100\% = 100\%$	Diskominfo	
	338	Persentase data yang dapat berbagi pakai	$\frac{216}{216}\ x\ 100\% = 100\%$	Diskominfo	
	339	Persentase perangkat daerah yang mengimplentasi inovasi yang mendukung smart city	$\frac{6}{33}\ x\ 100\% = 18{,}18\%$	Diskominfo	
	340	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah	$\frac{13}{13}\ x\ 100\% = 100\%$	Diskominfo	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pengelolaan Dinas Kominfo			
	341	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	Ada, 1 Raperda SPBE	Diskominfo	
	342	Persentase komunitas masyarakat/mitra stategis pemerintah daerah kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota	$\frac{11}{50} x\ 100\% = 22\%$	Diskominfo	
	343	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (strakom)	$\frac{5}{10} x\ 100\% = 50\%$	Diskominfo	
	344	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan stategi komunikasi (strakom) dan SOP yang telah ditetapkan	$\frac{2}{6}\ x\ 100\% = 33{,}33\%$	Diskominfo	
KOPERASI & UMKM	345	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam yang diterbitkan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0	Diskopdag & UKM	Tidak ada koperasi yang mengajukan penerbitan izin
	346	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0	Diskopdag & UKM	Tidak ada koperasi yang mengajukan penerbitan izin
	347	Persentase pemeriksaan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	$\frac{7}{119} x\ 100\% = 5{,}88\%$	Diskopdag & UKM	
	348	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	$\frac{20}{119} x\ 100\% = 16{,}80\%$	Diskopdag & UKM	
	349	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	$\frac{46}{119} x\ 100\% = 38{,}65\%$	Diskopdag & UKM	
	350	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	$\frac{50}{17.016} x\ 100\% = 0{,}29\%$	Diskopdag & UKM	
	351	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan	$\frac{2}{119} x\ 100\% = 1{,}68\%$	Diskopdag & UKM	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota			
	352	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	-	Diskopdag & UKM	TIDAK PERLU DIISI
	353	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	$\frac{46}{119} x\ 100\% = 38{,}66\%$	Diskopdag & UKM	
	354	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0	Diskopdag & UKM	Tidak ada koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan
	355	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasiitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0	Diskopdag & UKM	Tidak ada koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran
	356	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dngan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	$\frac{66}{119} x\ 100\% = 55{,}46\%$	Diskopdag & UKM	
	357	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kab/kota	0	Diskopdag & UKM	
	358	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	$\frac{1.449}{6.991} x\ 100\% = 20{,}72\%$	Diskopdag & UKM	
	359	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	$\frac{24.471}{30.776} x\ 100\% = 79{,}51\%$	Diskopdag & UKM	
	360	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	$\frac{85}{30.776} x\ 100\% = 0{,}276\%$	Diskopdag & UKM	
	361	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	$\frac{7}{54} x\ 100\% = 12{,}96\%$	Diskopdag & UKM	
	362	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	0	Diskopdag & UKM	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	363	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	$\frac{80}{30.776} x\ 100\% = 0{,}26\%$	Diskopdag & UKM	
	364	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	$\frac{40}{30.776}\ x\ 100\% = 0{,}13\%$	Diskopdag & UKM	
PENANAMAN MODAL	365	PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kab/kota	5 fasilitas/insentif penanaman modal menurut Perda Nomor 15 Tahun 2019 : - Pengurangan pajak daerah - Pengurangan atau pembebasan retribusi daerah - Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi - Pemberian advokasi - Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	366	Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	Ada , 1 SOP	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	367	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	Belum ada pengajuan untuk pemberian fasilitas/insentif penanaman modal di tahun 2021
	368	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	Sesuai Renstra DPMPTSP & Tenaga Kerja, kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada tahun 2023
	369	Kegiatan pameran penanaman modal	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	Sesuai Renstra DPMPTSP & Tenaga Kerja, kegiatan ini direncanakan dilaksanakan pada tahun 2023
	370	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	0	DPMPTSP & Tenaga Kerja	Belum pernah menerima kunjungan penanam modal dari luar negeri ke Kota Pangkalpinang selama tahun 2021
	371	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	498	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	372	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	4.197	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	373	Laporan realisasi penanaman modal	438.146.631.380	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	374	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kab/kota	110 orang	DPMPTSP & Tenaga Kerja	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	375	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	20 perusahaan	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	376	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan kab/kota	$\frac{10}{10}$ x $100\% = 100\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	377	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0	Dinas Pemuda & OR	Belum tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan kewirausahaan di tahun 2021
	378	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0	Dinas Pemuda & OR	Belum tersedia anggaran untuk bantuan kewirausahaan bagi pemuda di tahun 2021
	379	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	0	Dinas Pemuda & OR	Belum tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan manajemen organisasi kepemudaan
	380	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	0	Dinas Pemuda & OR	Belum tersedia anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan manajemen organisasi kepemudaan
	381	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan	121 orang	Dinas Pemuda & OR	
	382	Jumlah penyelenggaraan event olah raga prestasi tingkat daerah	1 *event* KOSN	Dinas Pemuda & OR	
STATISTIK	383	Tersedianya buku profil daerah	0	Diskominfo	Tidak ada di RENSTRA Diskominfo
	384	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	1 survey	Diskominfo	
	385	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	33 kompilasi	Diskominfo	
	386	Jumlah survei statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	1 survey	Diskominfo	
	387	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS	1 kompilasi	Diskominfo	
	388	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	0	Diskominfo	Belum dilakukan pada tahun 2021 karena pelatihan metadata dari BPS baru akan dilaksanakan di tahun 2021 dan kegiatan metadata akan diselenggarakan di tahun 2022
	389	Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	0	Diskominfo	Belum dilakukan pada tahun 2021 karena pelatihan metadata dari BPS baru akan dilaksanakan di tahun 2021 dan kegiatan metadata akan diselenggarakan di tahun 2022

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
PERSANDIAN	390	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	0	Diskominfo	Belum dilakukan pengamanan kegiatan strategis karena keterbatasan anggaran, sarana & prasarana serta pegawai fungsional Sandiman belum ada
	391	Persentase 106ystem elektronik yang telah menerapkan prinsip 106ystem manajemen keamanan informasi dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah 106ystem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	$\frac{102}{102}\ x\ 100\% = 100\%$	Diskominfo	
	392	Persentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	0	Diskominfo	Belum dilaksanakan tahun 2021 karena keterbatasan anggaran dan SDM
	393	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	0		Belum dilaksanakan tahun 2021 karena keterbatasan anggaran dan SDM
KEBUDAYAAN	394	Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaa, penyelamatan dan publikasi)	145 objek	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	395	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyeberluaskan, pengkajian, pengayaan keberagaman)	7 objek	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	396	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	7 objek	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	397	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	472 orang	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	398	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	23 cagar budaya	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	399	Perlindungan cagar budaya kab/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	10 cagar budaya	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	400	Layanan perizinan membawa cagar	0	Dinas Pendidikan &	Tidak terdapat pemohonan izin

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		budaya kab/kota ke luar kab/kota dengan dukungan data		Kebudayaan	membawa keluar benda cagar budaya oleh pemiliknya atau pemerintah
	401	Pengembangan cagar budaya kab/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	10 cagar budaya	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	402	Pemanfaatan cagar budaya kab/kota (dalam hal agama, sosial,pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata)	23 cagar budaya	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	403	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemafaatan koleksi museum	0	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	404	a. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan	0	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
		b. Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kab/kota	0	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	405	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	12 orang	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	406	Pembentukan tim ahli cagar budaya kab/kota	7 orang	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	407	Fasilitasi sertifikasi tim ahli cagar budaya	0	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	408	Pemetaan SDM cagar budaya dan permuseuman	20 orang	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	409	Peningkatan kompetensi SDM cagar budaya dan permuseuman kab/kota	0	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	410	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	0	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
	411	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	
PERPUSTAKAAN	412	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	$\frac{569.714}{222.298} x\ 100\% = 2{,}56\%$	- Dinas Perpustakaan dan Arsip - Disdukcapil	
	413	Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	$\frac{19.573}{222.298} x\ 100\% = 0{,}088\%$	- Dinas Perpustakaan dan Arsip - Disdukcapil	
	414	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	0,06	- Dinas Perpustakaan dan Arsip - Disdukcapil	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	415	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	$\frac{14}{114}\ x\ 100\% = 12{,}28\%$	Dinas Perpustakaan & Arsip	
	416	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	3 kegiatan : SOLUSI BUDAK, mobil keliling perpustakaan, kunjungan perpustakaan	Dinas Perpustakaan & Arsip	
	417	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi) / terdaftar yang ada di wilayahnya	0	Dinas Perpustakaan & Arsip	Belum ditemukannya naskah kuno sehingga tidak ada koleksi naskah kuno yang diakuisisi/alih media/terdaftar di Kota Pangkalpinang
	418	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	0	Dinas Perpustakaan & Arsip	Belum ditemukannya naskah kuno sehingga tidak ada koleksi naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa di Kota Pangkalpinang
	419	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	112 eksemplar	Dinas Perpustakaan & Arsip	
KEARSIPAN	420	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{51.010}{61.050}\ \text{x}\ 100\% = 84\%$	Dinas Perpustakan & Kearsipan	
	421	Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	$\frac{77}{100}\ \text{x}\ 100\% = 77\%$	Dinas Perpustakan & Kearsipan	
	422	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	$\frac{13}{20}\ \text{x}\ 100\% = 65\%$	Dinas Perpustakan & Kearsipan	
	423	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	0	Dinas Perpustakan & Kearsipan	
	424	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakan & Kearsipan	
	425	Perlindungan dan penyelematan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	0	Dinas Perpustakan & Kearsipan	Pada tahun 2021 tidak terdapat OPD yang menyerahkan arsip bencana
	426	Penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab/kota sesuai NSPK di kab/kota	$\frac{2}{5}\ x\ 100\% = 40\%$	Dinas Perpustakan & Kearsipan	
	427	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kab/kota yang sesuai NSPK	88%	Dinas Perpustakan & Kearsipan	
	428	Perncarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah kab/kota yang dinyatakn hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	100%	Dinas Perpustakan & Kearsipan	
	429	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di	76%	Dinas Perpustakan & Kearsipan	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		lembaga kaersipan daerah kab/kota yang sesuai NSPK			
PILIHAN					
KELAUTAN & PERIKANAN	430	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	808 RTP	Dinas Kelautan & Perikanan	
	431	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	$\frac{1}{1}\ x\ 100\% = 100\%$	Dinas Kelautan & Perikanan	
	432	Jumlah Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kab/kota yang diterbitkan	1 izin	Dinas Kelautan & Perikanan	
	433	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan	24 pembudidaya	Dinas Kelautan & Perikanan	
	434	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi	310.443 ekor	Dinas Kelautan & Perikanan	
PARIWISATA	435	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	56 entitas	Dinas Pariwisata	
	436	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata	128 fasilitas	Dinas Pariwisata	
	437	Jumlah daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kab/kota	94 TDUP	Dinas Pariwisata	
	438	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	163 orang	Dinas Pariwisata	
	439	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	7 event	Dinas Pariwisata	
	440	Jumlah event luar negeri yang diikuti kab/kota	0	Dinas Pariwisata	Selama tahun 2021 tidak ada undangan untuk berpartisipasi dalam keikutsertaan pelaksanaan event luar negeri dan masih dalam masa pemulihan pandemi Covid-19
	441	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata dalam negeri	0	Dinas Pariwisata	Selama tahun 2021 tidak ada *event* untuk inndustri pariwisata dan masih dalam pemulihan pandemi Covid-19
	442	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	$\frac{60}{931}\ x\ 100\ \% = 6{,}44\%$	Dinas Pariwisata	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	443	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	$\frac{280}{280}\ x\ 100\% = 100\%$	Dinas Pariwisata	
	444	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	7 lokasi	Dinas Pariwisata	
PERTANIAN	445	Sarana pertanian yang diberikan	6 jenis : 5 pompa air, 5 cultivator MBI/TCL 700, 300 sachet benih sawi manis, 300 sachet benih pokcoy, 6.000 kg kapur dolomit, 12.000 kg pupuk organic padat	Dinas Pangan & Pertanian	
	446	Prasarana pertanian yang digunakan	4 jenis	Dinas Pangan & Pertanian	
	447	Penerbitan izin usaha pertanian	0	Dinas Pangan & Pertanian	Tidak terdapat izin usha pertanian yang diterbitkan di tahun 2021
	448	Persentase sarana yang digunakan	0	Dinas Pangan & Pertanian	Tidak terdapat pembangunan prasarana di tahun 2021
	449	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di kab/kota	0	Dinas Pangan & Pertanian	Tidak terdapatan prasarana pertanian yang dibangun di tahun 2021
	450	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	0	Dinas Pangan & Pertanian	Tidak terdapat kasus/bencana hewan menular di tahun 2021
KEHUTANAN	451	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	N/A	-	Kota Pangkalpinang tidak melaksanakan urusan pemerintahan ini
	452	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	N/A	-	Kota Pangkalpinang tidak melaksanakan urusan pemerintahan ini
	453	Pemulihan ekosistem pada Tahura	N/A	-	Kota Pangkalpinang tidak melaksanakan urusan pemerintahan ini
	454	Menurunnya gangguan kawasan Tahura	N/A	-	Kota Pangkalpinang tidak melaksanakan urusan pemerintahan ini
ESDM	455	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	N/A	-	Kota Pangkalpinang tidak melaksanakan urusan pemerintahan ini
PERDAGANGAN	456	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat Perbelanjaan	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
		b. Toko Swalayan	55 izin	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	457	Persentase penerbitan TDG	$\frac{2}{2}\ x\ 100\% = 100\%$	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	458	Persentase pergudangan yang tidak mempunyai TDG	$\frac{61}{210}\ x\ 100\% = 29{,}05\%$	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	459	Persentase penertbitan STPW yang tepat	0		

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		waktu untuk : a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Selama tahun 2021 tidak terdapat penerbitan STPW baik untuk penerima waralaba dalam negeri maupun luar negeri di Kota Pangkalpinang
		b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Selama tahun 2021 tidak terdapat penerbitan STPW baik untuk penerima waralaba dalam negeri maupun luar negeri di Kota Pangkalpinang
		c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Selama tahun 2021 tidak terdapat penerbitan STPW baik untuk penerima waralaba dalam negeri maupun luar negeri di Kota Pangkalpinang
	460	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kab/kota	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Bagi pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (SIUP B2 bagi PT-B2) merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai Permendag Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009
	461	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sesuai ketentuan Kepmendag Nomor 896 Tahun 2019 tentang Penetapan Instansi penerbit Surat Keterangan Asal, maka kewenangan penerbitan SKA ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Kep. Bangka Belitung
	462	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	(0,5 + 0,5) x 100% = 100%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	463	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	3,4853%	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	464	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$\frac{126}{112,275} x\ 100\% = 1,122\%$	Dinas Pangan dan Pertanian	
	465	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	$\frac{1.119}{1.506} x\ 100\% = 74,,30\%$	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	466	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	$\frac{0}{49}\ x\ 100\% = 0\%$	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
PERINDUSTRIAN	467	Persentase penetapan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Sesuai ketentuan Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012,

Urusan pemerintahan	No	IKK *Output*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota			belum terdapat kawasan industri di Pangkalpinang, baru kawasan peruntukan industri
	468	Persentase terselesaikannya dokumen RIPIK sampai ditetapkannya menjadi PERDA	50% - Tersusunnya naskah akademik (30%) - Tersusunnya *draft* raperda RPIK (20%)	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	469	Persentase jumlah izin yang diterbitkan izin usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	$\frac{2}{2}\ x\ 100\% = 100\%$	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	
	470	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan	0	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	Selama tahun 2021 tidak terdapat permohonan izin IPUI untuk industri kecil dan menengah
	471	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota yang masuk dalam SII Nas terhadap populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kab/kota	$\frac{11}{20}\ x\ 100\% = 55\%$	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil (*Outcome*)

Urusan pemerintahan	No	IKK *Outcome*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
WAJIB TERKAIT LAYANAN DASAR					
PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	$\frac{5.567}{9.443}\ \text{x}\ 100\% = 59{,}05\%$	- Dinas Pendidikan & Kebudayaan - Disdukcapil (smt I 2021)	
	2	Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	$\frac{26.306}{30.457}\ x\ 100\% = 86{,}37\%$	- Dinas Pendidikan & Kebudayaan - Disdukcapil (smt I 2021)	
	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{11.762}{14.223}\ x\ 100\% = 82{,}70\%$	- Dinas Pendidikan & Kebudayaan - Disdukcapil (smt I 2021)	
	4	Tingkat partisipasi warga Negara berusia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan	$\frac{685}{4.069}\ x\ 100\% = 16{,}83\%$	- Dinas Pendidikan & Kebudayaan - Disdukcapil (smt I 2021)	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Outcome*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		kesetaraan			
KESEHATAN	5	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	$\frac{449}{225.162}\ x\ 100\% = 0{,}20\%$	Dinas kesehatan, Disdukcapil	
	6	Persentase RS rujukan kabupaten/kota yang terakreditasi	$\frac{2}{7}\ x\ 100\% = 28{,}57\%$	Dinas Kesehatan	
	7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	$\frac{4.234}{4{,}679}\ x\ 100\% = 90{,}49\%$	Dinas Kesehatan	
	8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	$\frac{4.153}{4.459}\ x\ 100\% = 93{,}14\%$	Dinas Kesehatan	
	9	Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan bayi baru lahir	$\frac{4.107}{4.248}\ x\ 100\% = 96{,}68\%$	Dinas Kesehatan	
	10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{15.930}{16.578}\ x\ 100\% = 96{,}09\%$	Dinas Kesehatan	
	11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	$\frac{32.263}{37.431}\ x\ 100\% = 86{,}19\%$	Dinas Kesehatan	
	12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{133.261}{139.314}\ x\ 100\% = 95{,}66\%$	Dinas Kesehatan	
	13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{15.194}{16.103}\ x\ 100\% = 94{,}36\%$	Dinas Kesehatan	
	14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{38.211}{40.955}\ x\ 100\% = 93{,}30\%$	Dinas Kesehatan	
	15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{5.212}{5.258}\ x\ 100\% = 99{,}13\%$	Dinas Kesehatan	
	16	Persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{362}{370}\ x\ 100\% = 97{,}84\%$	Dinas Kesehatan	
	17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatanTBC	$\frac{397}{397}\ x\ 100\% = 100\%$	Dinas Kesehatan	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Outcome*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		sesuai standar			
	18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	$\frac{6.138}{6.452}\ x\ 100\% = 95{,}13\%$	Dinas Kesehatan	
PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat WS di wilayah Kota Pangkalpinang
	20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan kab/kota	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat WS di wilayah Kota Pangkalpinang
	21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat jaringan irigasi di Kota Pangkalpinang
	22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	$\frac{41.335}{54.438}\ x\ 100\% = 75{,}93\%$	Dinas PUPR	
	23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{39.371}{39.858}\ x\ 100\% = 98{,}78\%$	Dinas PUPR	
	24	Rasio kepatuhan IMB Kab/Kota	$\frac{1.709}{1.709}\ x\ 100\% = 100\%$	Dinas PUPR, DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	25	Tingkat kemantapan jalan kab/kota	$\frac{375{,}279}{403{,}137}\ x\ 100\% = 93{,}09\%$	Dinas PUPR	
	26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	0	Dinas PUPR	Belum dilakukan pendataan
	27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannnya tanpa kecelakaan konstruksi	0	Dinas PUPR	Tidak terdapat kecelakaan konstruksi di tahun 2021
PERUMAHAN RAKYAT	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kab/kota	$\frac{3}{3}\ x\ 100\% = 100\%$	Disperkim	
	29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota	0	Disperkim	Pada tahun 2021 tidak terdapat program pemerintah yang berdampak relokasi

Urusan pemerintahan	No	IKK *Outcome*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibaawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	$\frac{75,69}{150,09}\ x\ 100\% = 50,43\%$	Disperkim	
	31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (rumah tidak layak huni)	$\frac{1.511}{39.858}\ x\ 100\% = 3,79\%$	Disperkim	
	32	Jumlah rumah yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	$\frac{15.222}{39.858}\ x\ 100\% = 38,19\%$	Disperkim	
TRANTIBUMLINMAS	33	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{80}{80}\ x\ 100\% = 100\%$	Satpol PP	
	34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{47}{47}\ x\ 100\% = 100\%$	Satpol PP	
	35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	209.845 orang	BPBD	
	36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1000 orang	BPBD	
	37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	BPBD	
	38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{49}{49}\ x\ 100\% = 100\%$	Bidang Damkar, Satpol PP	
	39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	12 menit	Bidang Damkar, Satpol PP	
SOSIAL	40	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	$\frac{307}{791}\ x\ 100\% = 38,81\%$	Dinas Sosial	
	41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota	$\frac{159}{159}\ x\ 100\% = 100\%$	Dinas Sosial	
WAJIB TIDAK TERKAIT LAYANAN DASAR					
KETENAGAKERJAAN	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	$\frac{46}{18}\ x\ 100\% = 255\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	43	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	$\frac{1.569}{26.036}\ x\ 100\% = 6,02\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Outcome*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	44	Tingkat produktivitas tenaga kerja	$\frac{9.611,88\ mliar}{26.036} x\ 100\% = 36,92\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	45	Persentase perusahaan yang telah menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	$\frac{616}{616} x\ 100\% = 100\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
	46	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kab/Kota	$\frac{702}{6.103} x\ 10\% = 11,50\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	$\frac{7.851.871.432}{330.812.649.589} x\ 100\% = 2,37\%$	DPPPAKB, Bakeuda	
	48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kab/kota	$\frac{17}{75.559} x\ 100\% = 0,02\%$	DPPPAKB, Dukcapil	
	49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	$\frac{17}{111.429}$ x $100.000 = 15,26$	DPPPAKB, Dukcapil	
PANGAN	50	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	$\frac{26.392\ \text{ton}}{74,65\ \text{ton}}$ x $100\% = 35,35\%$	Dinas Pangan & Pertanian	
PERTANAHAN	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0	Dinas PUPR, DPMPTSP & Naker	Selama tahun 2021 tidak terdapat penerbitan izin lokasi
	52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	$\frac{94.290}{96.396} x\ 100\% = 97,82\%$	Dinas PUPR	
	53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	0	Dinas PUPR, DPMPTSP & Naker	Tidak ada kegiatan penyediaan lokasi untuk penananamn modal di tahun 2021
	54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	Dinas PUPR	Tidak ada TOL di Kota Pangkalpinang tahun 2021
	55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	0	Dinas PUPR	Tidak ada kegiatan penyediaan tanah untuk masyarakat pada tahun 2021
	56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	$\frac{3}{3} x\ 100\% = 100\%$	Dinas PUPR	
LINGKUNGAN HIDUP	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	(0,376 x 47,255) + (0,405 x 86,7132)	Dinas Lingkungan Hidup	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Outcome*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kab/Kota	+ (0,219 x 42,60) = **62,216126** (kualitas sedang)		
	58	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	$\frac{430,38}{455} x\ 100\% = 94,51\ \%$	Dinas Lingkungan Hidup	
	59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota	$\frac{10}{38} x\ 100\ \% = 26,32\%$	Dinas Lingkungan Hidup	
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL	60	Perekaman KTP elektronik	$\frac{153.632}{155.054} x\ 100\% = 99,08\%$	Disdukcapil	
	61	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	$\frac{47.883}{70.108}$ x $100\% = 68,30\%$	Disdukcapil	
	62	Kepemilikan akta kelahiran	$\frac{68.577}{71.915} x\ 100\% = 95,36\%$	Disdukcapil	
	63	Jumlah OPD yang telah memanfaatakan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	**7 OPD** Bakeuda, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan & Kebudayaan, Bappeda & Litbang, Kec. Bukit Intan, Dinas Lingkungan Hidup	Disdukcapil	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	DPPPAKB	Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang
	65	Persentase peningkatan status desa mandiri	0	DPPPAKB	Tidak terdapat desa di Kota Pangkalpinang
PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,00	DPPPAKB	
	67	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)	$\frac{18.618}{23.889} x\ 100\% = 77,94\%$	DPPPAKB	
	68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	$\frac{1.830}{23.889} x\ 100\% = 7,66\%$	DPPPAKB	
PERHUBUNGAN	69	Rasio konektivitas kab/kota	((16/17) x 1) x 100% = 94,12%	Dinas Perhubungan	
	70	V/C Ratio di jalan kab/kota	0,27	Dinas Perhubungan	
KOMUNIKASI & INFORMATIKA	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas	$\frac{7}{33} x\ 100\% = 21,21\%$	Dinas Komunikasi & Informatika	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Outcome*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Kominfo			
	72	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	$\frac{17}{30}\ x\ 100\% = 56{,}67\%$	Dinas Komunikasi & Informatika	
	73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kab/kota	$\frac{153.280}{153.280}\ \text{x}\ 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi & Informatika	
KOPERASI & UMKM	74	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	$\frac{29}{119}\ x\ 100\% = 24{,}37\%$	Diskopdag & UMKM	
	75	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	$\frac{1.449}{30.776}\ x\ 100\% = 4{,}7\%$	Diskopdag & UMKM	
PENANAMAN MODAL	76	Persentase peningkatan investasi di kab/kota	$(3.312.974.474.099 - 2.041.393.876.256)/ 2.041.393.876.256\ \text{x}\ 100\% = 62{,}29\%$	DPMPTSP & Tenaga Kerja	
KEPEMUDAAN & OLAHRAGA	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	$\frac{126}{50.469}\ x\ 100\% = 0{,}25$	Dinas Pemuda & OR, Disdukcapil	
	78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	$\frac{430}{50.469}\ x\ 100\% = 0{,}85\%$	Dinas Pemuda & OR. Disdukcapil	
	79	Peningkatan prestasi olah raga	1 medali	Dinas Pemuda & OR	
STATISTIK	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	$\frac{33}{33} x\ 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi & Informatika	
	81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	$\frac{33}{33} x\ 100\% = 100\%$	Dinas Komunikasi & Informatika	
PERSANDIAN	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	$\frac{30}{33} x\ 100\% = 90{,}91\%$	Dinas Komunikasi & Informatika	
KEBUDAYAAN	83	Terlestarikannya cagar budaya	$\frac{45}{45} x\ 100\% = 100\%$	Dinas Pendidikan & kebudayaan	
PERPUSTAKAAN	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	$\frac{36 + 45 + 27}{155.659}\ \text{x}\ 100\% = 0{,}065\%$	Dinas Perpustakaan & Arsip	

Urusan pemerintahan	No	IKK *Outcome*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
	85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	$\frac{622.342}{225.162}$ x $100\% = 2{,}80\%$	Dinas Perpustakaan & Arsip	
KEARSIPAN	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagia bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	56%	Dinas Perpustakaan & Arsip	
	87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	51%	Dinas Perpustakaan & Arsip	
URUSAN PILIHAN					
KELAUTAN & PERIKANAN	88	Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) kab/kota (sumber data : one data KKP)	1.168 ton + 664.89 ton = **1.832,89 ton**	Dinas Kelautan dan Perikanan	
PARIWISATA	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	$\frac{163 - 283}{283} x\ 100\% = -42{,}40\%$	Dinas Pariwisata	
	90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kab/kota	$\frac{195.067 - 133.365}{133.365} x\ 100\% = 46{,}27\%$	Dinas Pariwisata	
	91	Tingkat hunian akomodasi	$\frac{62.942}{291.534} x\ 100\% = 21{,}59\%$	Dinas Pariwisata	
	92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	4,15	- Dinas Pariwisata - BPS	Data PDRB rilis BPS bulan Februari
	93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	$\frac{17.449.027.111}{168.863.503.538{,}32}$ x $100\% = 10{,}33\%$	Dinas Pariwisata	
PERTANIAN	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	$\frac{(4{,}7 + 13{,}9)ton/ha}{(17{,}7 + 6{,}2)ha} 100\% = 77,82\ ha$	Dinas Pangan & Pertanian	
	95	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	0	Dinas Pangan & Pertanian	Tidak terdapat bencana/kasus hewan menular di tahun 2021
KEHUTANAN		-			

Urusan pemerintahan	No	IKK *Outcome*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
ESDM	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota	-	-	Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak melaksanakan urusan ESDM
PERDAGANGAN	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/ IUTS/SIUP Toko Swalayan)	$\frac{96}{116}\ x\ 100\% = 82{,}76\%$	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan	
	98	Persentase kinerja realisasi pupuk	$\frac{126}{353{,}2}\ x\ 100\% = 35{,}67\%$	- Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan - Dinas Pangan & Pertanian	
	99	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	$\frac{1.119}{1.506} x\ 100\% = 74{,}30\%$	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan	
PERINDUSTRIAN	100	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	$\frac{2685 - 2650}{2.650}\ \text{x}\ 100\% = \mathbf{1{,}32}\%$	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan	
	101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	50% - Tersusunnya Naskah akademik - Tersusunnya draft raperda		
	102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha	$\frac{10}{10}\ x\ 100\% = 100\%$	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan	
	103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan	Sesuai Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 tahun 2012, belum ada kawasan industri di Pangkalpinang, baru berupa akawasan peruntukan industri
	104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota	0	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan	Sesuai Perda Kota Pangkalpinang Nomor 1 tahun 2012, belum ada kawasan industri di Pangkalpinang, baru berupa akawasan peruntukan industri
	105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	95%	Dinas Koperasi, UMKM & Perdagangan	

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan	No	IKK *Outcome*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
PERENCANAAN & KEUANGAN	1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	$= \frac{162.555.840.192}{383.499.029.265} x100\% = 42,39\%$	Bakeuda	
	2	Rasio PAD	$\frac{168.864.062.465,32}{15.385.880.000.000} x\ 100\% = 1.1\%$	Bakeuda, BPS	
	3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 2	Inspektorat	
	4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 2	Inspektorat	
	5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	$\frac{676.151.734.733,76}{714.984.855.369,76} x100\% = 94,57\%$	Bakeuda	
	6	Opini Laporan Keuangan	- Tahun 2021 : - Tahun 2020 : WTP - Tahun 2019 : WTP - Tahun 2018 : WTP - Tahun 2017 : WTP - Tahun 2016 : WDP - Tahun 2015 : WDP - Tahun 2014 : WDP - Tahun 2013 : WDP - Tahun 2012 : WDP	- Bakeuda - inspektorat	Data untuk tahun 2021 belum ada (lkjpd masih dalam proses pemeriksaan oleh BPK)
PENGADAAN	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian PBJ	Tidak ada proyek multi years pada tahun anggaran 2021
	8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	$\frac{54}{33} x100\% = 163\%$	Bagian PBJ	
	9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	$\frac{134.373.590.803}{463.982.913.828,75} x100\% = 28,96\%$	Bagian PBJ	
KEPEGAWAIAN	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan		BKPSDMD	

Urusan Pemerintahan	No	IKK *Outcome*	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
		Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{1.245}{319}$x100% = 390,23%		
	11	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{365}{1564}$x100% = 23,34%	BKPSDMD	
	12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	$\frac{132}{1.199}$x100% = 11%	BKPSDMD	
MANAJEMEN KEUANGAN	13	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	$\left(\frac{903.160.689.721,70}{935.086.606.670}\right) - 1$ x 100% = (0,97 − 1)x100% = 0,03%		
	14	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	$\left(\frac{168.864.062.465,32}{137.417.681.044}\right) - 1$x100% = (1,23 − 1)x100% = 0,23%		
	15	Manajemen Aset	a. Apakah ada Daftar Aset Tetap : **YA** b. Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap : **YA** c. Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan: **YA** d. Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran : **YA**	Bakeuda	
	16	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	$\frac{95.812.948.51,89}{887.559.906.542,61}$ x 100% = 1,08%	Bakeuda	
TRANSPARANSI & PARTISIPASI PUBLIK	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	$\frac{2.021.460.564}{2.236.888.970}$ x 100% = 90,37%	Bakeuda	
	18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	$\frac{37}{37}$ x 100% = 100%	Bakeuda	

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Dalam sub bab ini disajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang teruang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Penetapan indicator kinerja pada tingkat sasaran, program dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja suatu daerah. Adanya selisih antara target yang direncanakan di awal dengan realisasi capaian akan dianalisis guna menetapkan strategi peningkatan kinerja ke depannya. Berikut adalah uraian lebih rinci mengenai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang. .

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 20218-2023, maka ditetapkan target tahunan yang akan dicapai oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Target capaian kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2021, telah ditetapkan dalam Rencanan Kerja Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dan dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2021. Target kinerja tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel II.5
Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	LPE Kategori perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,50	2,80
		LPE Kategori Industri Pengolahan	0,50	1,50
2	Meningkatnya Penggalian, Pemanfaatan dan Pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	PAD sektor pariwisata	15.439.823.960	18.682.186.991
3	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai investasi	550	650
4	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,24	4

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2021	TARGET AKHIR RPJMD TAHUN 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	6,74	6,26
6	Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Indeks risiko bencana (IRB)	80,85	77,65
7	Meningkatnya kondisi keamanan daerah	Angka kriminalitas	150	100
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai LPPD	3,2722	3,2723
		Nilai AKIP	63,30	67,70
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84	90
		Indeks Profesionalitas ASN	77,6	78,4
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	69,79	70,16
11	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	82,14	82,64
12	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,16	93,28
13	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	72,50	75
14	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	90	92
15	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Ketersediaan Infrastruktur	54,96	57,89
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	88,72	88,93
		Indeks kualitas air	50,93	51,13
		Indeks Tutupan Lahan	33,62	37,68

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel II.6
Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2021

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	LPE Kategori perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,50	4,78	956	Sangat Berhasil
		LPE Kategori Industri Pengolahan	0,50	29,45	5.890	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya Penggalian, Pemanfaatan dan Pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	PAD sektor pariwisata	15.439.823.960	17.449.027.111	113,01	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai investasi	550.000.000.000	3.312.974.474.099	602,36	Sangat Berhasil
4	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,24	4,76	78,15	Berhasil
5	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	6,74	6,81	98,96	Sangat Berhasil
6	Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Indeks risiko bencana (IRB)	80,85	120,40	148,92	Sangat Berhasil
7	Meningkatnya kondisi keamanan daerah	Angka kriminalitas	150	67	155	Sangat Berhasil
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai LPPD	3,2722	3,2608**	99,69	Sangat Berhasil
		Nilai AKIP	63,30	61,77*	97,58	Sangat Berhasil
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP*	100,00	Sangat Berhasil

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PREDIKAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	84	NA	-	-
		Indeks Profesionalitas ASN	77,6	32,14	41,42	Sangat Rendah
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	69,79	70,30	100,73	Sangat Berhasil
11	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	82,14	80,68	98,22	Sangat Berhasil
12	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,16	93,16	100,00	Sangat Berhasil
13	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	72,50	63,38	87,42	Berhasil
14	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	90	96,21	106,90	Sangat Berhasil
15	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Ketersediaan Infrastruktur	54,96	46,52	84,64	Berhasil
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	88,72	86,71	97,73	Sangat Berhasil
		Indeks kualitas air	50,93	47,25	92,77	Sangat Berhasil
		Indeks Tutupan Lahan	33,62	42,60	126,71	Sangat Berhasil

Ket :

*) Data Tahun 2020

**) Data Tahun 2018

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel II.7
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*	
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	LPE Kategori perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-6,28	100	4,78	956
		LPE Kategori Industri Pengolahan	-4,52	100	29,45	5.890
2	Meningkatnya Penggalian, Pemanfaatan dan Pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	PAD sektor pariwisata	14.036.203.600	100	17.449.027.111	113,01
3	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai investasi	2.041.393.876.256	5.832,55	3.312.974.474.099	602,36
4	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,36 %	100	4,76	78,15
5	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	6,93 %	6,93	6,81	98,96
6	Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Indeks risiko bencana (IRB)	120,4	92,50	120,40	148,92
7	Meningkatnya kondisi keamanan daerah	Angka kriminalitas	34	154,69	67	155
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai LPPD	3,271	99,69	3,2608**	99,69
		Nilai AKIP	61,77	100	61,77*	97,58
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	100	WTP*	100,00

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2020	CAPAIAN TAHUN 2020 (%)	REALISASI TAHUN 2021	CAPAIAN TAHUN 2021 (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*		*(5)*	
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82	NA	NA	-
		Indeks Profesionalitas ASN	53,00	68,65	32,14	41,42
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	69,59	100	70,30	100,73
11	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	82,00	100	80,68	98,22
12	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,12	100	93,16	100,00
13	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	72,25	100	63,38	87,42
14	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	95,65	107,47	96,21	106,90
15	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Ketersediaan Infrastruktur	NA	NA	46,52	84,64
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	88,36	99,71	86,71	97,73
		Indeks kualitas air	56,67	111,49	47,25	92,77
		Indeks Tutupan Lahan	31,58	100	42,60	126,71

Ket :

*) Data Tahun 2020

**) Data Tahun 2018

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Akhir Tahun RPJMD

Tabel II.8
Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Akhir Tahun RPJMD

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2021	PERSENTASE PENCAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	LPE Kategori perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,80	4,78	170,71	melebihi target
		LPE Kategori Industri Pengolahan	1,50	29,45	1.963	melebihi target
2	Meningkatnya Penggalian, Pemanfaatan dan Pengembangan potensi sektor pariwisata daerah	PAD sektor pariwisata	18.682.186.991	17.449.027.111	93,39	masih tersisa 1.233.159.880
3	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai investasi	650.000.000.000	3.312.974.474.099	509,69	melebihi target 2.662.974.474.099
4	Menurunnya tingkat kemiskinan	Angka Kemiskinan	4	4,76	81	masih tersisa 0,76
5	Meningkatnya kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	6,26	6,81	91,21	masih tersisa 0,55
6	Meningkatnya keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Indeks risiko bencana (IRB)	77,65	120,40	155,05	melebihi target 42,75
7	Meningkatnya kondisi keamanan daerah	Angka kriminalitas	100	67	133	melebihi target 33
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah	Nilai LPPD	3,2723	NA	-	-
		Nilai AKIP	67,70	61,77*	91,24	masih tersisa 5,93
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP*	100	sesuai target

NO	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI TAHUN 2021	PERSENTASE PENCAPAIAN	STATUS PENCAPAIAN
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
9	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90	NA	-	-
		Indeks Profesionalitas ASN	78,4	32,14	40,99	masih tersisa 46,26
10	Meningkatnya kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	70,16	70,30	100,20	melebihi target
11	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	82,64	80,68	97,63	masih tersisa 1,96
12	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	93,28	93,16	99,87	masih tersisa 0,12
13	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Persentase peningkatan prestasi pemuda dan olahraga	75	63,38	84,50	masih tersisa 11,62
14	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman layak huni	Rasio rumah layak huni	92	96,21	104,58	melebihi target 4,21
15	Meningkatnya infrastruktur pekerjaan umum	Indeks Ketersediaan Infrastruktur	57,89	46,52	80,40	masih tersisa 11,37
16	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas udara	88,93	86,71	97,50	masih tersisa 2,22
		Indeks kualitas air	51,13	47,25	92,41	masih tersisa 3,88
		Indeks Tutupan Lahan	37,68	42,60	113,06	melebihi target 4,92

Ket :

*) Data Tahun 2020

**) Data Tahun 2018

2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

1. Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Pangklpinang telah menganggarkan pendapatan dan belanja untuk pelaksanaan kegiatannya dalam APBD Tahun 2021. Pendapatan dianggarkan sebesar Rp.915.125.027.188,41 dan realisasi sebesar Rp. 948.303.018.002,38 atau 103,63 %. dibandingkan dengan tahun 2020, terjadi peningkatan realisasi pendapatan daerah sebanyak Rp. 104.925.121.134,46 atau meningkat 12,44%.

Perincian terhadap anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2021, sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah yang bersumber dari PAD Rp. 143.391.826.819,- dengan realisasi anggaran Rp. 168.854.987.020,32 atau 117,75 % dengan perincian :

1) Pajak daerah ditargetkan Rp. 87.160.000.000, terealisasi Rp. 93.461.838.221 atau 107,23%;
2) Restribusi daerah ditargetkan Rp. 11.383.200.000, terealisasi Rp. 11.920.007.986,42 atau 104,72 %;
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan Rp. 6.018.000.000 terealisasi Rp. 6.032.648.895,15 atau 100,24 %;
4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan Rp.38.830.626.819 terealisasi Rp. 57.440.491.917,75 atau 147,93 %.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer ditargetkan Rp. 733.687.210.236. Dari target tersebut terealisasi Rp. 753.843.037.165,06. atau 102,75 % dengan perincian :

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebanyak Rp. 685.437.855.530;
2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebanyak Rp. 68.405.181.635,06.

Secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer mengalami kenaikan/penurunan dari Rp 648.486.135.615,19 pada tahun anggaran 2020 menjadi Rp 753.843.037.165,06 pada tahun anggaran 2021 atau meningkat 102,75 %.

c. Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan yang Sah ditargetkan Rp. 38.045.990.133,41 Dari target tersebut terealisasi Rp. 25.604.993.817 atau 67,30 % dengan perincian :

1) Hibah sebanyak Rp. 655.977.955
2) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebanyak Rp. 24.949.015.862

Dibanding dengan tahun anggaran 2020, realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan dari Rp 53.927.364.580 pada tahun 2020 menjadi Rp 25.604.993.817 pada tahun 2021 atau menurun 47,48 %.

2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Pemerintah Kota Pangkapinang dalam satu tahun anggaran yang menjadi pengeluaran daerah.

Pada tahun anggaran 2021 dialokasikan anggaran sebanyak Rp 1.006.937.975.700,30 Dari anggaran tersebut terealisasi Rp 903.160.689.721,70 atau 89,69 % dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan Rp. 784.303.705.373,3 Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja Pegawai, belanja barang dan jas, belanja hibah, belanja bantuan sosial.Dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 714.749.729.504,76 atau 91,13 %.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan Rp. 220.634.270.327 Anggaran tersebut dialokasikan pada belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan jaringan dan irigasi , belnaja modal aset tetap lainnya. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 188.175.834.351,939 atau 85,29 %.

c. Belanja tak terduga

Belanja tak terduga dianggarkan Rp.2.000.000.000 dan anggaran tersebut terealisasi Rp. 235.125.865 atau 11,76 %.

Secara keseluruhan diketahui bahwa realisasi belanja tahun anggaran 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun anggaran 2020.

3. Komposisi Realisasi Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai di tahun 2021 Rp.383.499.029.265
2. Belanja Barang dan Jasa dari tahun 2021 Rp. 292652705468,76
3. Belanja Modal di tahun 2021 Rp. 33.142.597.043
4. Belanja Bantuan Sosial di tahun 2021 Rp. 5.455.397.728
5. Belanja Modal ditahun 2021 Rp. 188175834351,939

4. Realisasi Belanja Daerah

Realisasi belanja Kota Pangkalpinang Tahun 2021 sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakannya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.9
Realisasi Belanja Kota Pangkalpinang Tahun 2021

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja			
		Stl. Perubahan	Realisasi	Sisa Realisasi	
				Rp	%
5	**BELANJA DAERAH**	**1.006.937.975.700,30**	**903.160.689.721,70**	**103.777.285.978,60**	**10,31**
5 . 1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	**634.012.820.700,30**	**582.460.353.448,70**	**51.552.467.251,60**	**8,13**
5 . 1.01	Pendidikan	213.116.599.800,00	191.701.308.820,94	21.415.290.979,06	10,05
5 . 1.02	Kesehatan	266.892.475.400,30	245.579.833.354,76	21.312.642.045,54	7,99
5 . 1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	106.578.617.400,00	100.631.477.841,00	5.947.139.559,00	5,58
5 . 1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.924.413.900,00	15.514.037.353,00	1.410.376.547,00	8,33
5 . 1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	24.841.058.800,00	23.773.747.230,00	1.067.311.570,00	4,30
5 . 1.06	Sosial	5.659.655.400,00	5.259.948.849,00	399.706.551,00	7,06
5 . 2	**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**	**119.858.203.734,00**	**98.976.011.951,00**	**20.882.191.783,00**	**17,42**
5 . 2.01	Tenaga Kerja	233.255.600,00	229.838.300,00	3.417.300,00	1,47
5 . 2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	460.290.200,00	98.731.600,00	361.558.600,00	78,55
5 . 2.03	Pangan	5.003.419.622,00	4.858.171.466,00	145.248.156,00	2,90
5 . 2.04	Pertanahan	27.877.506.000,00	13.177.813.539,00	14.699.692.461,00	52,73
5 . 2.05	Lingkungan Hidup	26.340.160.200,00	24.473.827.334,00	1.866.332.866,00	7,09
5 . 2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	3.875.251.200,00	3.612.472.238,00	262.778.962,00	6,78
5 . 2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.460.590.800,00	6.815.472.989,00	645.117.811,00	8,65
5 . 2.09	Perhubungan	15.440.505.000,00	14.920.857.144,00	519.647.856,00	3,37
5 . 2.10	Komunikasi dan Informatika	5.567.272.920,00	5.273.601.042,00	293.671.878,00	5,27
5 . 2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.974.300.312,00	6.798.670.253,00	175.630.059,00	2,52
5 . 2.12	Penanaman Modal	8.734.730.400,00	8.276.904.072,00	457.826.328,00	5,24
5 . 2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	6.678.627.800,00	5.675.703.781,00	1.002.924.019,00	15,02
5 . 2.14	Statistik	272.107.350,00	211.676.145,00	60.431.205,00	22,21
5 . 2.15	Persandian	33.760.330,00	25.445.000,00	8.315.330,00	24,63
5 . 2.16	Kebudayaan	703.605.900,00	415.830.450,00	287.775.450,00	40,90
5 . 2.17	Perpustakaan	4.059.497.400,00	3.989.799.348,00	69.698.052,00	1,72
5 . 2.18	Kearsipan	143.322.700,00	121.197.250,00	22.125.450,00	15,44
5 . 3	**Urusan Pilihan**	**19.231.041.866,00**	**18.815.830.168,00**	**415.211.698,00**	**2,16**
5 . 3.01	Kelautan dan Perikanan	4.363.962.000,00	4.282.259.151,00	81.702.849,00	1,87
5 . 3.02	Pariwisata	5.610.209.700,00	5.440.122.050,00	170.087.650,00	3,03
5 . 3.03	Pertanian	1.827.339.178,00	1.746.386.933,00	80.952.245,00	4,43
5 . 3.06	Perdagangan	6.770.843.618,00	6.712.588.764,00	58.254.854,00	0,86
5 . 3.07	Perindustrian	658.687.370,00	634.473.270,00	24.214.100,00	3,68
5 . 4	**Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang**	**233.835.909.400,00**	**202.908.494.154,00**	**30.927.415.246,00**	**13,23**

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Belanja			
		Stl. Perubahan	Realisasi	Sisa Realisasi	
				Rp	%
5 . 4.01	Administrasi Pemerintahan	90.815.487.789,00	84.855.063.390,00	5.960.424.399,00	6,56
5 . 4.02	Pengawasan	7.020.142.700,00	6.734.839.708,00	285.302.992,00	4,06
5 . 4.03	Perencanaan	6.099.203.100,00	5.853.423.728,00	245.779.372,00	4,03
5 . 4.04	Keuangan	45.588.830.380,00	35.617.569.598,00	9.971.260.782,00	21,87
5 . 4.05	Kepegawaian	5.084.329.142,00	4.396.576.445,00	687.752.697,00	13,53
5 . 4.06	Pendidikan dan Pelatihan	885.160.658,00	703.258.400,00	181.902.258,00	20,55
5 . 4.07	Penelitian dan Pengembangan	1.157.401.800,00	1.075.414.146,00	81.987.654,00	7,08
5 . 4.08	Sekretariat DPRD	37.373.397.234,00	34.742.737.473,00	2.630.659.761,00	7,04
5 . 4.11	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	35.064.843.497,00	24.378.650.374,00	10.686.193.123,00	30,48
5 . 4.12	Kesatuan Bangsa dan Politik	4.747.113.100,00	4.550.960.892,00	196.152.208,00	4,13

2.3.6 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Perdagangan Besar Dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

a. Penjelasan

Manfaat pengukuran Laju Pertumbuhan Ekonomi antara lain dapat mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah, melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Angka PDRB dihitung berdasarkan dua pendekatan yaitu produksi dan pengeluaran.

PDRB pendekatan produksi dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. PDRB pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: konsumsi rumah tangga; konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kota Pangkalpinang tahun 2021 ditopang oleh bidang usaha Pengolahan. Kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi tertinggi sebesar 29,45 persen. Sementara laju pertumbuhan ekonomi pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,78 dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -6,28.

b. Analisis Kinerja

Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 11,03 dibandingkan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi ekonomi. Hal ini di sebabkan karena di tahun 2021 pandemi covid-19 yang berimbas pada hampir seluruh lapangan usaha

perekonomian pada tahun sebelumnya perlahan-lahan mengalami pertumbuhan ke arah yang lebih positif.

Realisasi pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sektor perdagangan tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 4,78%. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2020 maka terjadi kenaikan yang signifikan. Demikian juga realisasi sektor jasa lainnya terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan ditahun 2021 yaitu dengan capaian sebesar 24,64% yang meliputi jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan jasa lainnya.

c. Solusi

Dampak sosial dan ekonomi yang melanda Indonesia akibat pandemi ini memaksa semua level pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi terhadap rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Terutama yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran mengingat pada saat menyusun sama sekali tidak memperhitungkan pandemi. Penyesuaian yang tepat dan kebijakan yang terukur dalam menangani wabah corona akan menjadi titik awal untuk pemulihan. Saat ini Pemerintah Kota Pangkalpinang berupaya mempercepat pemulihan ekonomi lokal dan penguatan daya beli masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain itu juga Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbaharui sesuai situasi dan kondisi pandemi Covid-19, kemudian mempertahankan program dimana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan dan masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca Covid-19.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Industri Pengolahan

a. Penjelasan

Manfaat pengukuran Laju Pertumbuhan Ekonomi antara lain dapat mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah, melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Angka PDRB dihitung berdasarkan dua pendekatan yaitu produksi dan pengeluaran.

PDRB pendekatan produksi dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah bruto (NTB) yang dihasilkan oleh seluruh pelaku ekonomi dalam suatu wilayah tertentu. PDRB pengeluaran dihitung dengan menjumlahkan semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: konsumsi rumah tangga; konsumsi lembaga swasta nirlaba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto (ekspor dikurangi impor).

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kota Pangkalpinang tahun 2021 ditopang oleh bidang usaha Industri Pengolahan. Kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi sebesar 29,45 persen, bahkan sektor ini memberikan kontribusi tertinggi setahun terakhir.

b. Analisis Kinerja

Bila dilihat berdasarkan lapangan usaha, maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kota Pangkalpinang tahun 2021 ditopang oleh Perdagangan Besar dan Eceran dan Industri Pengolahan. Kedua kategori lapangan usaha ini memberikan kontribusi masing-masing sebesar 24,58 persen dan 17,19 persen. Sebagai ibukota provinsi, Pangkalpinang menjadi pusat perdagangan di Pulau Bangka. Sebagian besar kantor pusat penjualan mobil dan motor berlokasi di Kota Pangkalpinang. Begitu juga dengan toko grosir berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari yang banyak tersebar di Kota Pangkalpinang. Sehingga wajar apabila lapangan usaha Perdagangan besar dan eceran memberi kontribusi terbesar pada PDRB Kota Pangkalpinang.

PDRB ADHB Kota Pangkalpinang tahun 2021 adalah 15.385,65 miliar rupiah, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang nilainya 13.455,95 miliar rupiah. Demikian juga dengan PDRB ADHK juga mengalami peningkatan dari 8.796,58 miliar rupiah di tahun 2020, menjadi 9.611,88 miliar rupiah di tahun 2021.

Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 9,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pemulihan aktivitas ekonomi di tahun 2021.

3. PAD Sektor Pariwisata

a. Penjelasan

Pembangunan nasional yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dari peran serta daerah dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan daerah secara utuh dan terpadu. Setiap pemerintah daerah berupaya keras meningkatkan perekonomian daerahnya sendiri termasuk meningkatkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam sektor pariwisata. Pembangunan kepariwisata dilanjutkan dan ditingkatkan dengan mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan nasional menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan untuk memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja bagi daerah setempat, mendorong pembangunan, serta memperkenalkan nilai budaya bangsa.

Untuk mendukung sektor pariwisata yang berkembang di Kota Pangkalpinang, diperlukan ketersediaan sarana akomodasi yang memadai. Sampai tahun 2021 terdapat 34 hotel yang terdiri dari 16 hotel/ akomodasi bintang dan 18 hotel non bintang. Kamar di kamar berbintang di Kota Pangkalpinang adalahsebanyak 842 sedangkan di kamar non berbintang ada sebanyak 402 kamar.

b. Analisis Kinerja

Capaian indikator kinerja ini telah melebihi target. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Peningkatan pendapatan daerah sektor pariwisata tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk melakukan pembangunan guna terus meningkatkan jumlah kunjungan yang datang ke Kota Pangkalpinang setiap tahunnya. Beberapa langkah konkrit yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagai upaya pengembangan potensi wisata antara lain dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang objek wisata dalam merawat dan melestarikan lingkungan serta menjalani kerjasama dengan pihak swasta.

4. Pertumbuhan Investasi Daerah

a. Penjelasan

Nilai investasi Kota Pangkalpinang bersumber dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Bidang Penanaman Modal Tahun 2021. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 ditetapkan bahwa setiap perusahaan penanaman modal berkewajiban untuk membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Investor domestik maupun asing diwajibkan untuk menyampaikan LKPM kepada BKPM untuk memotret investasi yang ada di Indonesia. Dengan adanya LKPM tersebut, para pihak bisa mengetahui sektor usaha yang sedang berkembang, hambatan yang tengah terjadi, serta kebijakan yang harus diterapkan agar kegiatan usaha tersebut berjalan lancar. Setiap perusahaan penanaman modal wajib menyampaikan LKPM secara online dengan menggunakan hak akses yang telah diberikan BKPM melalui http://lkpmonline.bkpm.go.id. Untuk perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya masih dalam tahap pembangunan wajib menyampaikan LKPM setiap triwulan, dan untuk perusahaan yang kegiatan penanaman modalnya telah memiliki Izin Usaha, wajib menyampaikan LKPM setiap semester.

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang melakukan pemantauan perusahaan yang berada di wilayah Kota

Pangkalpinang. Pemantuan perusahaan dilakukan dalam rangka mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi investasi. Untuk itu Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang fokus pada pemantauan dan pembinaan adalah agar pelaku usaha tertib dalam menyampaikan LKPM. Selain melakukan pemantuan juga dilakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) kepada perusahaan yang belum mendaftarkan kegiatan usaha melalui OSS atau yang sudah tetapi mengalami kendala sehingga belum mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional.

Perhitungan persentase capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan angka realisasi dengan target dikali 100 persen, dalam pengertian semakin tinggi angka realisasi dibandingkan angka target maka semakin baik nilai kinerjanya.

b. Analisis Kinerja

Investasi yang ada di Kota Pangkalpinang merupakan salah satu variabel yang penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Ada beberapa hal yang mempengaruhi investasi, yaitu suku bunga, PDRB, utilitas, birokrasi, kualitas SDM, regulasi, stabilitas politik dan keamanan serta faktor sosial budaya. Hal ini menimbulkan implikasi kebijakan, yaitu penurunan suku bunga, kebijakan fiskal, perbaikan sarana dan prasarana, perbaikan birokrasi pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelonggaran regulasi, kebijakan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan, penguatan budaya lokal. Berikut ada beberapa faktor yang mempengaruhi investasi di Pangkalpinang dapat tumbuh dan berkembang :

1. Suku bunga merupakan faktor yang sangat penting dalam menarik investasi karena sebagian besar investasi biasanya dibiayai dari pinjaman bank. Jika suku bunga pinjaman turun maka akan mendorong investor untuk meminjam modal dan dengan pinjaman modal tersebut maka ia akan melakukan investasi.
2. Pendapatan per kapita dan PDRB per kapita merupakan cermin dari daya beli masyarakat atau pasar. Makin tinggi daya beli masyarakat suatu negara atau daerah (yang dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita atau PDRB per kapita) maka akan makin menarik untuk berinvestasi.
3. Prasarana dan sarana pendukung tersebut meliputi sarana dan prasarana transportasi, komunikasi, utilitas, pembuangan limbah dan lain-lain. Sarana dan prasarana transportasi contohnya antara lain jalan, terminal, pelabuhan, bandar udara dan lain-lain. Sarana dan prasrana telekomunikasi seperti : jaringan telepon kabel maupun nirkabel, jaringan

internet, prasarana dan sarana pos. Sedangkan contoh dari utilitas adalah tersedianya air bersih, listrik dan lain-lain.

4. Birokrasi perijinan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi investasi karena birokrasi yang panjang memperbesar biaya bagi investor. Birokrasi yang panjang akan memperbesar biaya bagi pengusaha karena akan memperpanjang waktu berurusan dengan aparat. Padahal bagi pengusaha, waktu adalah uang. Kemungkinan yang lain, birokrasi yang panjang membuka peluang oknum aparat pemerintah untuk menarik suap dari para pengusaha dalam rangka memperpendek birokrasi tersebut.
5. Kualitas sumber daya manusia juga merupakan daya tarik investasi yang cukup penting, karena teknologi yang dipakai oleh para pengusaha makin lama makin modern. Teknologi modern tersebut menuntut ketrampilan lebih dari tenaga kerja.
6. Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mendukung antara lain menyangkut peraturan tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), Upah Minimum, kontrak kerja dan lain-lain.
7. Stabilitas politik dan keamanan juga penting bagi investor karena akan menjamin kelangsungan investasinya untuk jangka panjang.

Dibandingkan dengan tahun 2020 terjadi kenaikan dengan target kinerja di tahun 2021 sebesar 550 milyar rupiah dan terealisasi sebesar 3.312.974.474.099 rupiah. Angka tersebut melebihi target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2021. Namun demikian mengalami penurunan persentase capaian investasi dibandingkan tahun 2020, itu dikarenakan target pada tahun tersebut sebesar 35 milyar rupiah. Nilai investasi pada tahun 2021 berasal dari SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dengan jumlah persetujuan ijin investasi sebanyak 164 izin.

c. Solusi

Adapun upaya dan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang diantaranya :

1. Menyediakan Peta Potensi Investasi sebagai informasi kepada para pelaku ekonomi di daerah atau pun di luar daerah, kapan, dimana dan apa saja jenis investasi yang sesuai dengan pembangunan yang akan datang. Dengan cara ini maka pihak pengusaha dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan daerah yang diinginkan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai dasar kegiatan usaha yang akan dikembangkan.
2. Mendorong para investor yang telah mendapatkan izin investasinya agar segera merealisasikan rencana investasi mereka serta melakukan sosialisasi dan pembinaan tentang kewajiban penyampaian Laporan

Kegiatan Penanam Modal (LKPM) melalui kegiatan pengawas dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

3. Agar Pemerintah Daerah dapat menjadikan LKPM sebagai syarat perusahaan untuk membuat izin-izin lainnya (untuk pengembangan usahanya) dikarenakan penyampaian LKPM merupakan kewajiban pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendaian Pelaksanaan Penanaman Modal.

5. Menurunnya Angka Kemiskinan

a. Penjelasan

Tingkat kemiskinan dan ketimpangan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, pandemi COVID-19 membuat penurunan tingkat kemiskanan dan ketimpangan dalam dekade terakhir menjadi kembali meningkat. Oleh karena itu, pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional berupaya memberikan jarring pengaman dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, terutama kelompok penduduk miskin dan rentan. Upaya ini cukup berhasil menahan angka kemiskinan dan ketimpangan untuk tidak meningkat terlalu tinggi pada tahun 2020 dan alokasi bantuan dilanjutkan pada tahun 2021.

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan dapat dicerminkan melalui penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin).

b. Analisis Kinerja

Kota Pangkalpinang merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas wilayah terkecil yaitu hanya 104,405 km2. Meskipun demikian tingkat kepadatan penduduknya berada pada urutan tertinggi. Daerah ini dikepalai oleh seorang Walikota yang secara administratf dibantu oleh Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah yang membawahi tga orang Asisten. Sampai dengan akhir tahun 2021 wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 42 Kelurahan yang tersebar di 7 kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 bahwa Kota Pangkalpinang mempunyai visi yaitu mewujudkan kota Pangkalpinang sebagai kota senyum (Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur). Adapun misi Kota Pangkalpinang yaitu menanggulangi kemiskinan, menanggulangi banjir, menang pelayanan, menang sumber daya manusia dan menang pembangunan.

6. Tingkat Pengangguran Terbuka

a. Penjelasan

Pengangguran terbuka adalah mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang mencari pekerjaan karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari kepala daerah dan menjadi salah satu sasaran ekonomi makro dari pemerintah daerah. Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang usia 15 tahun ke atas atau yang termasuk Penduduk Usia Kerja (PUK) pada tahun 2021 sebanyak 161.793 orang (hasil Survei Angkatan Kerja Nasional [Sakernas], 2021). Sebesar 62,37 penduduk angkatan kerja (bekerja dan/atau mencari kerja).

Tingkat Partsipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Pangkalpinang tahun 2021 sebesar 65,16 persen artinya sebesar 65 persen penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Adapun tingkat pengangguran terbuka untuk Kota Pangkalpinang di tahun yang sama adalah sebesar 6,81 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari 1000 penduduk yang termasuk angkatan kerja, secara rata-rata terdapat 68 orang diantaranya pencari kerja.

b. Analisis Kinerja

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Pangkalpinang mengalami kenaikan menjadi 6,81% pada Tahun 2021 dari target sebesar 6,74%, sehingga persentase pencapaian kinerja sebesar 98,96%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020, terjadi kenaikan sebesar 37,56%. Penyebab utama dari kondisi tersebut

adalah dimana keadaan ekonomi di tengah masa pandemi Covid-19 pada tahun 2021 telah mengalami pertumbuhan ekonomi ke arah yang positif.

c. Solusi

Kendati banyak karyawan yang di PHK dan dirumahkan sepanjang tahun 2020, tetapi disisi ain angka penempatan lowongan kerja di tahun 2020 cukup tinggi. Bahkan ada sekitar 620 tenaga kerja yang terserap. Kondisi tersebut disebabkan oleh banyaknyya perusahaan yang berinvestasi di sektor perdagangan di Kota Pangkalpinang. Banyaknya tenaga kerja yang terserap tersebut tidak terlepas dari peran Walikota yang telah menjadikan Pangkalpinang diirik oleh perusahaan untuk berinvestasi.

Jumlah tersebut belum dihitung dengan retail-retail yang kecil. Jumlah penempatan lowongan kerja di tahun 2020 merupakan jumlah tertinggi selama kurun waktu 5 tahun terakhir.

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam menghadapi kondisi ini dengan melaksanakan program kegiatan sebagai berikut :

1. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja
2. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
3. Program peningkatan kesempatan kerja
4. Program pengembangan hubungan industrial dan jamsostek

7. Indeks Risiko Bencana

a. Penjelasan

Kompleksitas penyelenggaraan penanggulangan bencana memerlukan suatu penataan dan perencanaan yang matang, terarah dan terpadu. Penanggulangan yang dilakukan selama ini belum didasarkan pada langkah-langkah yang sistematis dan terencana, sehingga sering kali terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya penting yang tidak dapat tertangani. Pemanduan dan penyelarasan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu kawasan membutuhkan dasar yang kuat dalam pelaksanaannya. Kebutuhan ini terjawab dengan kajian risiko bencana.

Kajian risiko bencana merupakan perangkat untuk menilai kemungkinan dan besaran kerugian akibat ancaman yang ada. Dengan mengetahui kemungkinan dan besaran kerugian, fokus perencanaan dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi lebih efektif. Dapat dikatakan bahwa kajian risiko bencana merupakan dasar untuk menjamin keselarasan arah dan efektifitas penyelenggaraan penanggulangan bencana pada suatu daerah.

b. Analisis Kinerja

Bersumber dari data sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kota Pangkalpinang terdapat 5 jenis bencana yaitu banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Pada Tahun 2020 untuk telah terjadi bencana banjir, kebakaran hutan dan angin puting beliung.

Indeks Risiko Bencana pada tahun 2021 adalah 120,4 dari target 80,85 sehingga capaian target adalah 148,92. Angka tersebut didapat dari penghitungan yang dilakukan secara mandiri oleh BPBD Kota Pangkalpinang.

Berikut kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2021 untuk memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana :

1. Penguatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Pengembangan sistem pemulihan bencana

c. Solusi

Tahap Pencegahan dan Mitigasi

Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi serta menanggulangi resiko bencana. Rangkaian upaya yang dilakukan dapat berupa perbaikan dan modifikasi lingkungan fisik maupun penyadaran serta peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Tahap pencegahan dan mitigasi bencana dapat dilakukan secara struktural maupun kultural (non struktural). Secara struktural upaya yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) terhadap bencana adalah rekayasa teknis bangunan tahan bencana. Sedangkan secara kultural upaya untuk mengurangi kerentanan (vulnerability) terhadap bencana adalah dengan cara mengubah paradigma, meningkatkan pengetahuan dan sikap sehingga terbangun masyarakat yang tangguh. Mitigasi kultural termasuk di dalamnya adalah membuat masyarakat peduli terhadap lingkungannya untuk meminimalkan terjadinya bencana. Kegiatan yang secara umum dapat dilakukan pada tahapan ini adalah:

1. membuat peta atau denah wilayah yang sangat rawan terhadap bencana
2. pembuatan alarm bencana
3. membuat bangunan tahan terhadap bencana tertentu
4. memberi penyuluhan serta pendidikan yang mendalam terhadap masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.

Tahap Kesiapsiagaan

Tahap kesiapsiagaan dilakukan menjelang sebuah bencana akan terjadi. Pada tahap ini alam menunjukkan tanda atau signal bahwa bencana akan segera terjadi. Maka pada tahapan ini, seluruh elemen terutama masyarakat perlu memiliki kesiapan dan selalu siaga untuk menghadapi bencana tersebut.

Pada tahap ini terdapat proses Renkon yang merupakan singkatan dari Rencana Kontinjensi. Kontinjensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi. Rencana Kontinjensi berarti suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan kontinjensi atau yang belum tentu tersebut. Suatu rencana kontinjensi mungkin tidak selalu pernah diaktifkan, jika keadaan yang diperkirakan tidak terjadi.

Secara umum, kegiatan pada tahap kesiapsiagaan antara lain:

1. menyusun rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan personil.
2. menyusun langkah-langkah pencarian dan penyelamatan serta rencana evakuasi untuk daerah yang mungkin menghadapi risiko dari bencana berulang.
3. melakukan langkah-langkah kesiapan tersebut dilakukan sebelum peristiwa bencana terjadi dan ditujukan untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi.

8. Angka Kriminalitas

a. Penjelasan

Statistik kriminal adalah data tentang kriminalitas yang disusun menurut bentuk kejahatan, frekuensi kejadian dari masing-masing bentuk kejahatan, wilayah kejadian dan tahun kejadian. Lebih lanjut, Mustofa mengemukakan bahwa statistik kriminal dengan pengertian yang dijeaskan di atas merupakan statistik deskriptif, karena memang data tersebut merupakan paparan data numerik tentang kriminalitas. Informasi yang tersaji dalam statistik pada umumnya, mengingat statistik kriminal memang hanya memperhatikan aspek keumuman dari kriminalitas.

Mendasarkan pada pernyataan Walker yang membagi statistik kriminal ke dalam dua bagian, yaitu statistik yang disusun secara berkala atau *routinely collected* dan statistik yang disusun secara khusus atau *specially collected*. Pada umumnya untuk jenis pertama dikenal dengan statistik kriminal resmi dan untuk jenis kedua dikenal dengan statistik kriminal tidak resmi. Statistik resmi dibuat berdasarkan pelanggaran hukum, pelanggaran undang-undang dan standar administratif oleh agen-agen yang mengontrol peraturan itu. Statistik kriminal resmi merupakan dasar dalam pencatatan

bagi semua agen yang termasuk pencatatan resmi terhadap tingkah laku kriminal dan kriminalitas. Sedangkan statistik kriminal tidak resmi diperoleh secara bebas dari catatan pengontrol kejahatan, baik berasal dari pencatatan pribadi, agen-agen investigasi, hasil penelitian dan observasi.

b. Analisis Kinerja

Sebagai Ibu Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kondisi keamanan merupakan satu hal yang wajib dimiliki guna mendukung iklim investasi di Kota Pangkalpinang. Jika dilihat dari capaian kinerja dua terakhir, dimana capaian kinerja lebih dari 100% dari target yang telah ditetapkan.

9. Nilai LPPD

a. Penjelasan

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Laporan ini mengambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Kinerja yang terbaik bukan ditetapkan berdasarkan standar, melainkan melalui proses perbandingan antara Pemerintah Daerah, jadi bisa saja terjadi yang terbaik di antara yang terjelek dalam pengisian realisasi capaian masing-masing.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi Laporan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disampaikan ke DPRD dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) yang disampaikan kepada masyarakat. LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri atas capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Capaian Kinerja Tugas Pembantuan.

b. Analisis Kinerja

Kementerian Dalam Negeri memberikan penilaian terhadap LPPD terakhir kali pada tahun 2018, namun demikian penyampaian LPPD oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang tetap dilakukan sampai dengan saat ini. Adapun maksud dan tujuan dari evaluasi LPPD adalah :

1. Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan;
2. Apresiasi bagi Pemerintah Daerah menyampaikan LPPD tepat waktu dan bahan penetapan peringkat kinerja kabupaten/kota di tingkat Provinsi dan nasional;
3. Masukan kepada Kementrian/LPND untuk pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah.

10. Nilai AKIP

a. Penjelasan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021 dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Walikota Pangkalpinang Nomor 482/KEP/BAPPEDA-LITBANG/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018 – 2023. Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang digunakan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang ini merupakan hasil revisi yang merupakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang disampaikan oleh Tim Evaluator Kementerian PAN RB. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

b. Analisis Kinerja

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan PAN dan RB) memberikan nilai 61,77 atau predikat "B"(Baik) dari hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2020. Jika dibandingkan dengan hasil evaluasi tahun 2019 dengan perolehan nilai 60,72 atau predikat "B" perolehan nilainya mengalami kenaikan sebesar 1,05 point. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Dengan perolehan nilai B (baik) ini pada tahun 2020, Pemerintah Kota Pangkalpinang menerima

penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Hasil evaluasi setelah dilakukan validasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pangkalpinang memperoleh nilai 61,77 atau predikat B (Baik). Penilaian tersebut menunjukkan akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang sudah menggunakan manajemen kinerja, dan perlu perbaikan.

Tabel II.10
Rincian Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2020

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2019	Nilai 2020
a.	Perencanaan Kinerja	30	20.57	22,35
b.	Pengukuran Kinerja	25	13.64	14,26
c.	Pelaporan Kinerja	15	10.03	10.07
d.	Evaluasi Internal	10	5.28	5,80
e.	Capaian Kinerja	20	11.20	9,29
	Nilai hasil evaluasi	**100**	**60.72**	**61,77**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**	**B**

Penjelasan atas hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Pangkalpinang belum melaksanakan hasil rekomendasi terhadap hasil evaluasi tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dan masih rendahnya komitmen pimpinan bersama para kepala perangkat daerah dalam memperbaiki manajemen kinerja.
2. Perencanaan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang telah dilakukan secara terpadu dan melibatkan seluruh perangkat daerah, namun mengalami penurunan kualitas dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu :
   - tujuan belum sepenuhnya menetapkan hal-hal strategis;
   - terdapat redundansi sasaran, dan sasaran terlalu banyak;
   - sasaran RENSTRA masih sangat sederhana dan belum menetapkan hal-hal strategis;
   - target kinerja belum ditetapkan secara baik.
3. Perjanjian kinerja telah disusun, namun masih belum sesuai dengan RENSTRA dan belum menetapkan hal-hal strategis serta menyajikan indikator kinerja utama.
4. Pengukuran kinerja pada level Pemerintah Kota Pangkalpinang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan belum dilakukan

pengukuran secara berjenjang menggunakan teknologi informasi serta belum dilakukan penyusunan indikator kinerja individu.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum memenuhi indikator yang baik (SMART) dan masih sama dengan indikator RENSTRA dan Perjanjian Kinerja. Mutu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perangkat Daerah kurang baik karena kelemahan dari RENSTRA serta belum cukup mengukur hal-hal strategis.
6. Laporan Kinerja sebagian perangkat daerah belum menyajikan informasi pencapaian sasaran, analisis capaian kinerja dan informasi keuangan serta besaran efisiensi.
7. Belum tersedianya sisitem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja terintegrasi pada Pemerintah Kota Pangkalpinang.
8. Inspektorat baru melakukan evaluasi SAKIP terhadap 5 (lima) perangkat daerah dan belum melakukan seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan uraian diatas serta dalam meningkatnya manajemen kinerja, direkomendasikan kepada Walikota Pangkalpinang untuk menindaklanjuti beberapa hal sebagai berikut:

1. Melaksanakan hasil rekomendasi terhadap hasil evaluasi tahun sebelumnya 2019 dan meningkatkan komitmen pimpinan bersam para kepala perangkat daerah dalam peningkatan kinerja.
2. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan memperbaiki tujuan, sasaran beserta indikator dan target kinerja.
3. Menginstruksikan kepala perangkat daerah agar memperbaiki perjanjian kinerja yang telah disusun, menetapkan hal-hal strategis yang menyajikan indikator kinerja utama.
4. Pemerintah Kota Pangkalpinang agar melakukan pengukuran secara berjenjang menggunakan teknologi informasi serta menginstruksikan seluruh pegawai agar menyusun sasaran kinerja pegawai sesuai indikator kinerja individu.
5. Meningkatkan kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Pangkalpinang dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah menjadi indikator yang baik (SMART) yang dapat mengukur hal-hal strategis.
6. Menginstruksi seluruh kepala perangkat daerah agar penyusun laporan kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran, analisis capaian kinerja dan informasi keuangan serta besaran efisiensi.
7. Melakukan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang.

8. Memerintah Inspektur Kota Pangkalpinang agar melakukan evaluasi SAKIP terhadap seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang serta meningkatkan kompetensi evaluator.

Beberapa rekomendasi dari hasil evaluasi tahun 2019 yang sudah dilaksanakan antara lain :

1. Membangun komintmen dan keterlibatan kepala OPD dalam penerapan manajemen kinerja;
2. Pengintegrasian perencanaan terkait prioritas Kepala Daerah yang terdapat dalam RPJMD;
3. Perjanjian kinerja sudah dilaksanakan secara berjenjang sampai level kepala seksi (belum sampai level individu);
4. Perubahan indikator kinerja dan penyelarasan dalam pemilihan program dan kegiatan dilakukan bersamaan dengan perubahan renstra OPD yang akan digunakan dalam perencanaan untuk pelaksanaan tahun anggran 2021;
5. Pemanfaatan teknologi informasi untuk perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dilaksanakan di tahun 2020 untuk perencanaan tahun 2021 melalui sistem *e-planing* "Senyum Pandu".

c. Solusi

Berdasarkan rekomendasi hasil evaluasi LAKIP tersebut, tidak seluruhnya dapat ditindaklanjuti. Pada tahun 2021 telah dilakukan beberapa hal strategis dalam rangka meningkatkan kualitas LAKIP pemerintah Kota Pangkalpinang di masa yang akan datang. Adapun upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Melakukan perubahan terhadap RPJMD Kota Pangkalpinang 2018-2023 dengan melibatkan seluruh *stakeholder* yang berkepentingan.
2. Merumuskan kembali tujuan dan sasaran beserta indikatornya sampai pada tingkatan program kegiatan perangkat daerah
3. Melakukan asistensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan cara *road show* ke Perangkat Daerah untuk memastikan keterlibatan dan komitmen pimpinan Kepala Perangkat Daerah.
4. Melakukan asistensi penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja perangkat Daerah.

11. Opini BPK terhadap LKPD

a. Penjelasan

Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk manajemen sektor publik

untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari trasparansi dan akuntabilitas.

Penyajian laporan keuangan daerah adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dan daerah mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi- transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Sehingga pemerintah dituntut untuk mampu menyajikan laporan keuangan yang secara wajar dan diungkap secara lengkap agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan sehingga terciptalah transparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan sesuai harapan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Kota Pangkalpinang bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Sedangkan tanggungjwab BPK adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka- angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilain risiko salah yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan tersebut diatas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Posisi keuangan Pemerintah Kota Pangkalpinang tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan

tepat, sebagai dasar untuk menyatakan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020.

Sedangkan Opini hasil pemeriksaan dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 belum bisa diperoleh, karena proses penyusunan LKPD Tahun 2021 dilakukan pada tahun kinerja berikutnya (Tahun 2021). Saat ini masih tahapan pengumpulan data pendukung dari seluruh Perangkat Daerah dan Rekonsiliasi realisasi keuangan seluruh Perangkat Daerah.

b. Analisis Kinerja

Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan. Hal ini meliputi penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan dalan dibuat oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang. Juga penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Sebagai bagian penting dari proses pemeriksaan, aspek pengendalian internal juga menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi dan akuntabilitas pemerintah. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kinerja khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata pemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi, mustahil akan terwujud jika tata pemerintahan masih memberikan peluang terhadap praktik-praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Melalui penyelarasan terhadap hasil-hasil pelaksanaan tugas pengawasan, diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan, sekaligus dapat mengisi peran memberikan peringatan dini (early warning system) terhadap potensi penyimpangan/ kecurangan yang terjadi, disebabkan kelemahan dalam sistem maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

12. Indeks Kepuasan Masyarakat

a. Penjelasan

Amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban

melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkala dan berkelanjutan.

Dalam rangka mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan publik, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan Publik dewasa ini yang dilakukan oleh Aparatur Pemerintah masih dijumpai banyak kelemahan, sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat.

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

b. Analisis Kinerja

Pada tahun 2021 kegiatan survei kepuasan masyarakat ditiadakan. Hal tersebut disebabkan oleh pandemi covid-19 dimana kota pangkalpinang ditetapkan sebagai zona merah bahkan diakhir tahun 2021 meningkat menjadi zona hitam. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan antara lain :

- Survei masih dilakukan secara manual melalui pengisian kuesioner dan wawancara secara langsung.
- Keterbatasan anggaran, sehingga anggaran kegiatan survei dialihkan untuk kegiatan penanggulangan covid-19.
- Tingkat ketakutan masyarakat dalam menghadapi covid-19

13. Indeks Profesionalitas ASN

a. Penjelasan

Pada tahun 2021, target kinerja Indeks Profesionalitas ASN adalah dengan nilai 77.60 akan tetapi hanya bisa terealisasi dengan nilai 32,14 dengan tingkat realisasi 41.42%. Hal ini dikarenakan dokumen pendukung untuk penilaian riwayat pengembangan kompetensi masih kurang. Padahal penilaian kompetensi memiliki bobot penilaian paling besar dibandingkan dengan variabel lain yakni 40%.

Untuk penilaian kompetensi, variabel yang diukur antara lain diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar/workshop/ magang/kursus dan sejenisnya. Diklat teknis dan seminar/workshop/ magang/ kursus dan sejenisnya yang diukur disini adalah yang diikuti atau

dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir. Selain itu diklat teknis dan seminar/workshop/magang/kursus dan sejenisnya yang diikuti harus mempunyai bukti otentik yakni disertai dengan bukti fotocopy sertifikat yang dilampirkan dalam dokumen pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Sedangkan untuk lingkup kota, kegiatan seminar/workshop/bimtek/ dan sejenisnya jarang disertai dengan pembagian sertifikat diakhir kegiatan. Padahal hal tersebut dapat mendukung dalam penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

b. Analisis Kinerja

Pada tahun 2021, target kinerja Indeks Profesionalitas ASN adalah dengan nilai 77.60 akan tetapi hanya bisa terealisasi dengan nilai 32.14 dengan tingkat realisasi 41.42%. Hal ini dikarenakan dokumen pendukung untuk penilaian riwayat pengembangan kompetensi masih kurang. Padahal penilaian kompetensi memiliki bobot penilaian paling besar dibandingkan dengan variabel lain yakni 40%.

Untuk penilaian kompetensi, variabel yang diukur antara lain Diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar/ workshop/ magang/ kursus dan sejenisnya. Diklat teknis dan seminar/ workshop/ magang/ kursus dan sejenisnya yang diukur disini adalah yang diikuti atau dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir. Selain itu diklat teknis dan seminar/ workshop/ magang/ kursus dan sejenisnya yang diikuti harus mempunyai bukti otentik yakni disertai dengan bukti fotocopy sertifikat yang dilampirkan dalam dokumen pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Sedangkan untuk lingkup kota, kegiatan seminar/workshop/bimtek/ dan sejenisnya jarang disertai dengan pembagian sertifikat diakhir kegiatan. Padahal hal tersebut dapat mendukung dalam penilaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

14. Indeks Pendidikan

a. Penjelasan

Faktor pendidikan akan menjadi investasi penting untuk meningkatkan daya saing daerah di masa yang akan datang. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah Indeks Pendidikan. Indeks Pendidikan adalah komponen yang menyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Tinggi rendahnya IPM suatu daerah tergantung dari komponennya. Semakin tinggi nilai komponennya maka akan semaikin tinggi pula indeks IPM. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai komponen Indeks Pendidikan di Kota Pangkalpinang lebih rendah dibandingkan dengan indeks kesehatan dan indeks pengeluaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi agar indeks pendidikan di Kota Pangkaping dapat meningkat di masa yang akan datang.

Tujuan kajian ini adalah sebagai berikut: (1) menganalisis pengaruh alokasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan dengan indeks pendidikan, (b) menganalisis faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap indeks pendidikan di Kota Pangkalpinang, (c) merumuskan strategi yang dapat meningkatkan indeks pendidikan di Kota Pangkalpinang.

b. Analisis Kinerja

Capaian Indeks pendidikan di Kota Pangkalpinang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Sampai dengan saat ini Kota Pangkalpinang masih menduduki peringkat pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal capaian Indeks Pendidikan.

c. Solusi

Strategi yang digunakan untuk meningkatkan indeks pendidikan di Kota Pangkalpinang adalah dengan menggunakan metode *Analitycal Hierarchy Process* (AHP). Analisis AHP dilakukan dengan mengambil pendapat ahli dari pejabat Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, pejabat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan anggota DPRD Kota Pangkalpinang komisi E. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda data panel, faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi indeks pendidikan di Kota Pangkalpinang secara positif yaitu variable alokasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan, pendapatan per kapita, angka partisipasi sekolah SMP, angka partisipasi sekolah SMA, dan rasio murid guru tingkat SD. Strategi untuk meningkatkan indeks pendidikan di Kota Pangkalpinang melalui alokasi belanja pemerintah daerah bidang pendidikan berdasarkan metode AHP, yaitu: (a) pemerataan kuantitas tenaga pendidik, (b) beasiswa siswa kurang mampu, (c) rehabilitasi ruang kelas, (d) penambahan jumlah sekolah formal dan non formal, (e) diklat/workshop untuk tenaga pendidik, (f) bantuan biaya operasional pada sekolah non formal.

15. Indeks Kesehatan

a. Penjelasan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 menyatakan secara ringkas arah pembangunan nasional, termasuk pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan upaya semua komponen Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Kesehatan 2015-2019, arah pembangunan kesehatan adalah Program Indonesia Sehat yang

dilaksanakan dengan tiga pilar utama yaitu paradigma sehat, penguatan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan nasional.

IPKM adalah kumpulan indikator kesehatan yang dapat dengan mudah dan langsung diukur untuk menggambarkan masalah kesehatan. Serangkaian indikator kesehatan ini secara langsung maupun tidak langsung dapat berperan meningkatkan umur harapan hidup yang panjang dan sehat. Prinsip umum indikator yang digunakan dalam penyusunan IPKM adalah sederhana, mudah, dapat diukur, bermanfaat, dipercaya, dan tepat waktu. Indikator-indikator terpilih dalam IPKM lebih menunjukkan dampak dari pembangunan kesehatan tahunsebelumnya dan menjadi acuan perencanaan program pembangunan kesehatan untuk tahun berikutnya. IPKM dapat dimanfaatkan untuk:

1. membuat dasar perencanaan program pembangunan kesehatan di kabupaten/kota;
2. menyusun bahan advokasi pemerintah pusat ke pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, agar terpacu memperbaiki peringkat dengan melakukan prioritas program kesehatan beserta sumber dayanya;
3. menjadikan sebagai salah satu kriteria dan pertimbangan penentuan alokasi dana bantuan kesehatan dari pusat ke provinsi atau kabupaten/kota, dan dari provinsi ke kabupaten/kota

b. Analisis Kinerja

Pada tahun 2021 capaian target Indeks Kesehatan di Kota Pangkalpinang terkategorikan sangat berhasil, dengan capaian kinerja 98,22 %. Kondisi tersebut tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan.

16. Indeks Pembangunan Gender

a. Penjelasan

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Indeks Pembangunan Gender digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

b. Analisis Kinerja

Indeks Pembangunan Gender Kota Pangkalpinang menempati posisi teratas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan berada di atas IPG Nasional, yakni 93,16. Sementara itu, IPG tertinggi di Indonesia diraih oleh Provinsi DIY yaitu sebesar 94,80. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari dukungan dan sinergitas dari berbagai pihak. Pemerintah Kota Pangkalpinang saat ini telah berhasil mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender.

17. Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga

a. Penjelasan

Pemberdayaan Pemuda yang diarahkan pada pengelolaan pembangunan dilakukan SDM yang berkualitas, berkompeten dan profesional, peduli dan tanggap terhadap tuntutan inspirasi, partisipasi dan kepentingan pemuda serta dilakukan secara bersama-sama dalam sinergi yang kompak dan harmonis oleh seluruh unsur atau pihak terkait.

Strategi pemberdayaan pemuda dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kemandirian dan profesionalisme, sehingga dapat mendorong berkembangnya pemuda pelaku pembangunan yang handal, mampu bersaing ditingkat regional, nasional dan internasional serta meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menciptakan iklim yang kondusif pada setiap kegiatan pemuda.

Pemberdayaan Olahraga yang diarahkan untuk membangun masyarakat yang memiliki ketahanan fisik dan mental yang sehat dan bugar, serta berbagai perilaku yang positif.

Strategi Pemberdayaan Olahraga dimaksudkan sebagai upaya terciptanya budaya berolahraga yang harus juga diiringi dengan pengelolaan dan penataan semua aspek yang terlibat di dalam tiga kelompok jalur pembinaan olahraga, yaitu Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi dan Olahraga Prestasi. Masyarakat sehat, yang dicapai melalui kegiatan olahraga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja dan daya saing yang

tinggi dengan negara lain, yang pada akhirnya dapat menciptakan prestasi dan citra bangsa di tingkat dunia. Dengan demikian, untuk dapat menjadi masyarakat yang kokoh, aktif, produktif, unggul dan jaya akan terwujud bilamana terdapat sinkronisasi dari ketiga jalur pembinaan tersebut. Kendati dari ketiga jalur tersebut memiliki sasaran dan wadah yang berbeda, namun memiliki keterkaitan yang erat.

b. Analisis Kinerja

Pemberdayaan Pemuda yang diarahkan pada pengelolaan pembangunan. Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga menjadi sasaran dengan indikator rasio prestasi pemuda dan olahraga di tingkat provinsi dan nasional terhadap ajang yang diikuti terealisasi sebesar 63,38% dengan tingkat capaian kinerja 87,42 %. Pada tahun 2021 pemuda dan atlet Kota Pangkalpinang hanya mengikuti Pekan Olahraga Daerah dan Olahraga Tradisional tingkat Provinsi. Hal tersebut dikarenakan oleh pandemi covid-19, sebagai salah satu upaya penanggulangan covid-19.

c. Solusi

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pengembangan pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Pangkalpinang memberikan pembinaan kepada semua pemuda yang bertujuan meningkatkan serta pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah serta dilaksanakan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dan peraturan perundangan yang berlaku. Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran ini merupakan bagian dari upaya membangun kerjasama dan partisipasi pemuda yang tentunya dapat mengefisiensi anggaran dalam satu event, sehingga kegiatan dapat terlaksana melebihi dari yang telah ditargetkan, dan pembinaan terhadap organisasi kepemudaan melalui inventarisasi data organisasi kepemudaan update tahunan, monitoring dan legalitas organisasi kepemudaan.

18. Rasio Rumah Layak Huni

a. Penjelasan

Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. Indikator Rasio Rumah Layak Huni diketahui dengan menghitung jumlah rumah tinggal layak huni terhadap seluruh rumah yang ada di Kabupaten Belitung timur. Dalam perhitungannya, semakin besar persentase rasio akan semakin baik.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi kriteria kehandalan bangunan, menjamin kesehatan serta kecukupan luas minimum di suatu

wilayah kerja, pada waktu tertentu. Kriteria kehandalan bangunan meliputi 1) handal pada struktur bawah/pondasi, 2) handal pada struktur tengah/kolom dan balak(beam) dan 3) handal pada struktur atas. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi. Kecukupan luas minimum adalah luas minimal rumah layak huni antara 7,2 m2/orang sampai dengan 12 m2/orang dengan fungsi utama sebagai hunian yang terdiri dari ruang serbaguna/ruang tidur dan dilengkapi dengan kamar mandi. Kriteria rumah layak huni tidak menghilangkan penggunaan teknologi dan bahan bangunan daerah setempat sesuai kearifan lokal daerah untuk menggunakan teknologi dan bahan bangunan dalam membangun rumah layak huni.

b. Analisis Kinerja

Realisasi rasio rumah layak huni pada tahun 2020 sebesar 95,77% dari target yang ditetapkan sebesar 90,50% sehingga persentase realisasi capaian kinerjanya adalah 105,82%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 9,77%. Target kinerja di tahun 2020 telah tercapai, namun demikian masih ada waktu 3 (tiga) tahun ke depan untuk dapat menuntaskan rumah layak huni sebagaimana yang ditargetkan pada akhir RPJMD sebesar 93,50%.

Realisasi Rasio Rumah Layak Huni tahun 2020 mencapai 95,77% dari rencana target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 93,50% dengan capaian kinerja yakni sebesar 102,42%

19. Indeks Ketersediaan Infrastruktur

a. Penjelasan

Perkembangan pembangunan yang pesat membuat terjadinya perubahan lingkungan, kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Pemerintah daerah dalam hal ini memeiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses layanan infrastruktur yang ada.

Pengukuran Indeks Ketersediaan Infrastruktur secara berkala (1 tahun sekali) merupakan sarana evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menilai seberapa baik pembangunan infrastruktur yang sudah berjalan. Pengukuran Ketersediaan Infrastruktur memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat.

b. Analisis Kinerja

Angka Indeks Ketersediaan Infrastruktur Kota Pangkalpinang adalah 46,52 dari target yang ditetapkan 54,96 dengan capaian 84,64 %. Capaian tersebut terkategorikan berhasil, namun demikian Pemerintah Kota

Pangkalpinang terus melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk merealisasikan target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota pangkalpinang. Kondisi tersebut tidak terlepas dari pandemi covid-19 yang menyebabkan anggaran pembangunan mengalami penurunan yang signifikan.

20. Indeks Kualitas Udara

a. Penjelasan

Indeks Kualitas Udara adalah alat ukur sederhana berupa angka untuk menginformasikan kualitas udara ambien suatu daerah. Indeks kualitas udara diperoleh dari pengolahan data hasil pemantauan kualitas udara tahunan. Pemantauan kualitas udara ambien pada umumnya mencakup nilai beberapa parameter pencemar udara seperti SO2, NO2, O3, CO, PM2.5, PM10, dll. sehingga untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap arti kualitas udara ambien maka kualitas udara tersebut dapat juga diformulasikan dalam bentuk indeks kualitas udara (IKU). Di Indonesia, konsep IKU telah digunakan sejak tahun 2011 sebagai salah satu komponen penyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Pada tahun 2011 sampai saat ini, KLHK melakukan perhitungan IKU Nasional dan IKU provinsi, dimana IKU nasional dihitung berdasar nilai IKU provinsi. Data yang digunakan untuk perhitungan IKU adalah data hasil pemantauan kualitas udara ambien dengan metode manual passive yang dilakukan oleh KLHK bekerjasama dengan daerah.

b. Analisis Kinerja

Indeks Kualitas Udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Untuk Indeks Kualitas Udara Kota Pangkalpinang saat ini diperhitungkan dengan realisasi kinerja sebesar 88,36% dengan persentase capaian kinerja sebesar 92%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 maka terjadi penurunan 3,02%. Intervensi yang diperlukan untuk menghindari pencemaran udara adalah pengkondisian lingkungan hidup. Oleh karena itu kegagalan pencapaian target indeks kualitas udara ini karena keterbatasan anggaran untuk pengelolaan lingkungan hidup.

c. Solusi

Realisasi Indeks Kualitas Udara pada tahun 2020 baru mencapai 88,36% dari rencana target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 97,10% dengan capaian kinerja yakni sebesar 90,9%. Hal ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak baik pemerintah daerah dan masyarakat Pangkalpinang dalam rangka meningkatkan kualitas udara di Kota Pangkalpinang.

Dari data Indeks Kualitas Udara Kota Pangkalpinang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perlu disusun suatu alternatif pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pangkalpinang agar terjadi peningkatan dan perbaikan pada kinerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

a. Melakukan rencana aksi udara bersih setiap tahun;
b. Menambah lokasi sampling udara agar dapat mewakili semua Kecamatan yang ada di Kota Pangkalpinang.
c. Pengujian emisi kendaraan bermotor dengan melihat persentase emisi gas buang yang mempunyai andil dalam menciptakan polusi udara

21. Indeks Kualitas Air

a. Penjelasan

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003, bahwa salah satu metode untuk menentukan indeks kualitas air digunakan metode indeks pencemaran air sungai (PIj). Indeks pencemaran air dapat digunakan untuk menilai kualitas badan air, dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variable antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersedian dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) tingkat erosi dan sedimentasi. Sehingga dalam rangka meningkatkan Indeks Kualitas Air juga harus bersinergi dengan program dan kegiatan unit internal KLHK yang terkait, Kementerian terkait lainnya dan Pemerintah Daerah serta pelaku usaha.

Pemerintah Kota Pangkalpinang sangat berkepentingan untuk mengetahui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di daerah, hal ini sebagai tindaklanjut dalam upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Analisis Kinerja

Indeks Kualitas Air (*Water Quality Index/WQI*) adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter yang mengurangi sejumlah besar informasi ke nomor tunggal, biasanya berdimensi, dengan cara yang mudah direproduksi. Untuk Indeks Kualitas Air di Kota Pangkalpinang saat ini diperhitungkan dengan realisasi kinerja sebesar 56,67% dengan persentase capaian kinerja sebesar 80%. Indeks Kualitas Air pada tahun 2020 telah dapat diperhitungkan nilainya dibandingkan tahun 2019. Indeks Kualitas Air Kota Pangkalpinang pada tahun 2019 belum bisa ditampilkan karena untuk penghitungan Indeks Kualitas Air ini memerlukan 10 parameter, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pangkalpinang pada saat itu hanya memiliki 8 parameter. Jadi pada tahun 2019 indikator ini dinyatakan tidak berhasil.

c. Solusi

Realisasi Indeks Kualitas Air pada tahun 2020 baru mencapai 56,67% dari rencana target RPJMD tahun 2023 yaitu sebesar 73,70% dengan capaian kinerja yakni sebesar 76,89%. Hal ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak baik pemerintah daerah dan masyarakat Pangkalpinang pada umumnya.

Dari data Indeks Kualitas Air Kota Pangkalpinang belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, perlu disusun suatu alternatif pengelolaan lingkungan hidup di Kota Pangkalpinang agar terjadi peningkatan dan perbaikan pada kinerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

a. Memperbaiki kebijakan dan regulasi terkait kualitas air permukaan di Kota Pangkalpinang;
b. Melakukan identifikasi dan analisis sumber pencemar pada air permukaan di Kota Pangkalpinang;
c. Melakukan aksi/program kegiatan pengendalian pencemaran air limbah di Kota Pangkalpinang;
d. Melakukan sosialisasi lebih lanjut dan intensif kepada masyarakat disekitar badan air tentang perilaku hidup bersih dan sehat;
e. Pembangunan IPAL Komunal pada lokasi yang nilai *fecal coli* dan *coliform* melebihi baku mutu;
f. Memperbaharui program dan kegiatan penghijauan atau reklamasi untuk menangani tingkat erosi dan sedimentasi secara khusus di beberapa lokasi badan air yang memiliki tingkat TSS yang tinggi;
g. Adanya upaya peningkatan program/kegiatan penanaman pohon untuk meningkatkan presentase ruang terbuka hijau serta rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kota Pangkalpinang.

22. Indeks Tutupan Lahan

a. Penjelasan

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakukan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Penghitungan Indeks Tutupan Lahan dilakukan dengan membanding luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai IKTL meliputi:

- Tutupan hutan (TH) yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman.
- Belukar dan belukar rawa dalam kawasan hutan (SBKH)
- Belukar dan belukar rawa dalam kawasan berfungsi lindung pada sempadan sungai, danau dan pantai serta lereng >25% (SBL)
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berupa hutan kota atau taman kota,
- Kebun Raya (KR) dan
- Taman keanekaragaman hayati.

b. Analisis Kinerja

Capaian kinerja pada indikator ini telah melebihi target. Hal tersebut tidak terlepas dari kedisiplinan Pemerintah Kota Pangkapinang dalam menerapkan aturan berkenaan dengan kecukupan RTH.

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Urusan pemerintahan yang dilakasanakan berdasarkan tugas pembantuan adalah urusan konkuren. Dengan demikian maka tugas pembantuan didefinisikan sebagai penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian, sedangkan penugasan oleh pemerintah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan gubernur. Tugas pembantuan ini menggunakan anggaran yang disediakan oleh yang menugasi dimana dokumen anggaran tugas pembantuan diserahkan oleh kepala daerah kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian rancangan APBD dalam dokumen yang terpisah agar dapat dilakukan pengawasan dalam pelaksanaannya.

Pertanggungjawaban dalam tugas pembantuan ini pada dasarnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggung jawab pada pemberi penugasan. Akan tetapi bagi daerah kabupaten/kota yang menerima penugasan dari Pemerintah Pusat, selain bertanggung jawab pada pemerintah Pusat, maka bupati/walikota juga harus melaporkan kepada Gubernur selaku wakil dari pemerintah Pusat di daerah.

Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Daerah harus melaporkan capaian kinerja tugas pembantuan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan bahwa pada tahun 2021 Pemerintah Kota Pangkalpinang tidak menerima penugasan baik dari pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka pada bab ini tidak terdapat kegiatan yang dilaporkan seperti halnya laporan pada tahun sebelumnya.

3.1. TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN

3.1.1 TARGET KINERJA

-

3.1.2 REALISASI

-

Tabel III.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
Yang Dilaksanakan Oleh Kota Pangkalpinang

No	Bidang Urusan	K/LPNK	Dasar Penugasan	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
				N	**I**	**H**	**I**	**L**				

3.2. TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN

3.2.1 TARGET KINERJA

-

3.2.2 REALISASI

-

Tabel III.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi
Yang Dilaksanakan Oleh Kota Pangkalpinang

No	Bidang Urusan	Prov	Dasar Penugasan	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
				N	**I**	**H**	**I**	**L**				

3.3. PERMASALAHAN DAN KENDALA

-

3.4. SARAN DAN TINDAKLANJUT

-

BAB IV
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. URUSAN PENDIDIKAN

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal. Sedangkan standar teknis pelayanan minimal pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan jenjang dan jalur pendidikan.

Dalam penerapannya, SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip : a). kesesuaian kewenangan, yaitu bahwa SPM Pendidikan diterapkan sesuai dengan kewenangan daerah menurut pembagian urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; b). ketersediaan, yaitu bahwas SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan dalam ranga menjamin tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal; c). keterjangkauan, yaitu bahwa SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan dalam rangka menjamin barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; d). kesinambungan, yang berarti bahwa SPM pendidikan ditetapkan dan diterapkan untuk memberikan jaminan tersedianya barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara terus menerus; e). keterukuran, dimana SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan dengan barang dan/atau jasa yang terukur untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara; dan f). ketepatan sasaran, yaitu SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan untuk pemenuhan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal dan pemenuhan oleh Pemerintah Daerah ditujukan kepada warga negara dengan memprioritaskan bagi keluarga miskin atau tidak mampu.

4.1.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang selaku pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Pendidikan anak usia dini

   Kategori penerima layanan untuk jenis layanan ini adalah peserta didik yang berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan dasar

   Kategor penerima layanan untuk jenis layanan ini adalah peserta didik usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan kesetaraan
Kategori penerima layanan untuk jenis layanan ini adalah peserta didik dengan usia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan mutu SPM Pendidikan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang mencakup :

a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, yang meliputi :
   - Standar satuan pendidikan, yang terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.
   - Standar biaya pribadi peserta didik , yang terdiri atas perlengkapan dasar peserta didik dan pembiayaan pendidikan

b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, yang meliputi :
   - Jenis pendidik dan tenaga kependidikan
   - Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
   - Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan

c. Tata cara pemenuhan standar

Tata cara pemenuhan standar SPM Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal yang didalamnya mengatur hal-hal sebagai berikut.

1. Pemenuhan perlengkapan dasar

SPM Pendidikan berupa pemenuhan perlengkapan dasar ditujukan untuk peserta didik yang belum terlayani perlengkapan dasar peserta didik serta berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dimana pemenuhan perlengkapan dasar tersebut dilaksanakan untuk satu tahun serta diberikan dari awal tahun. Adapun tata cara pemenuhan perlengkapaan dasar tersebut oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sebagai berikut :

- ✓ Pemenuhan perlengkapan peserta didik pada Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan dengan pemberian 6 (enam) buah buku gambar dan 1 (satu) set alat mewarnai dalam kondisi baru per peserta didik per semester untuk setahun.
- ✓ Pemenuhan perlengkapan peserta didik pada Sekolah Dasar dilaksanakan dengan pemberian 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum dan 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.
- ✓ Pemenuhan perlengkapan peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan dengan pemberian 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum dan 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.
- ✓ Pemenuhan perlengkapan peserta didik pada Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan dengan pemberian 1 (satu) paket modul belajar sesuai

dengan kurikulum dan 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per peserta didik per semester.

- ✓ Selain pemenuhan perlengkapan peserta didik berupa perlengkapan dasar, Pemerintah Daerah juga dapat memberikan uang tunai kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu tersebut.

2. Pemenuhan pembiayaan pendidikan

Pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dengan cara pembebasan biaya pendidikaan pada satuan pendidikan. Hal ini berlaku sama untuk semua jenjang pendidikan. Untuk pelaksanaan pemenuhan pembiayaan pendidikan bagi Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dilaksanakan dengan cara pemberian uang tunai langsung kepada penyelenggara satuan pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Adapun Perhitungan pemenuhan pembiayaan pendidikan dari Peserta Didik oleh satuan pendidikan dilaksanakan dengan cara menghitung jumlah Peserta Didik yang berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu dikali 12 (dua belas) bulan dikali pembiayaan pendidikan.

3. Pemenuhan standar satuan pendidikan

Standar satuan pendidikan yang harus dipenuhi oleh semua jenjang pendidikan meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sapras, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

4. Pemenuhan jumlah pendidik sesuai rombongan belajar

Pemenuhan rombongan belajar di seluruh jenjang pendidikan harus memperhatikan kebutuhan minimal rombongan belajar berbanding dengan jumlah murid yang ada.

5. Pemenuhan kepala satuan pendidikan

Untuk seluruh jenjang pendidikan, masing-masing harus memenuhi 1(satu) Kepala di setiap Satuan Pendidikan, dengan kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV.

6. Pemenuhan tenaga penunjang (tenaga kependidikan) per satuan pendidikan

Untuk jenjang pendidikan dasar, minimal harus memenuhi 1 (satu) Tenaga Penunjang (Tenaga Kependidikan dengan kualifikasi SMA/sederajat per satuan pendidikan. Sedangkan untuk jenjang kesetaraan , minimal harus memenuhi 1 (satu) Tenaga Penunjang (Tenaga Kependidikan) dengan kualifikasi S1/D-IV per satuan pendidikan. Sementara untuk jenjang PAUD tidak diwajibkan.

4.1.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL OLEH DAERAH

Dalam tabel berikut disampaikan target pencapaian SPM Pendidikan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

Tabel IV.1
Target Pencapaian SPM Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2021

No	Jenis Layanan	Target SPM	Indikator	Target Indikator
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	8.347
2.	Pendidikan Dasar	100%	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	36.857
3.	Pendidikan Kesetaraan	100%	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	1.444

4.1.3 ANGGARAN

Upaya pemenuhan SPM Pendidikan Tahun 2021 di Kota Pangkalpinang dilakukan melalui pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang dan DAK Non Fisik, dengan total anggaran Rp. 67.435.357.810,53 yang terealisasi Rp. 50.359.548.571,- atau sebesar 74,68%.

4.1.4 DUKUNGAN PERSONIL

Pelaksanaan SPM Urusan Pendidikan berdasarkan jenis layanan dilaksanakan oleh tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sebagai berikut :

Tabel IV.2
Dukungan Personil Pelaksana SPM Pendidikan Kota Pangkalpinang Tahun 2021

No	Jenis Layanan	Jumlah Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Pendidik
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Kepala Sekolah Yang berkualifikasi S1/DIV = 84	Yang berkualifikasi S1/DIV = 249
2.	Pendidikan Dasar	Kepala Sekolah Yang berkualifikasi S1/DIV = 126 Admin Yang berkualifikasi SMA/ sederajat = 689	Yang berkualifikasi S1/DIV = 1.712
3.	Pendidikan Kesetaraan	Kepala Sekolah Yang berkualifikasi S1/DIV = 8 Admin Yang berkualifikasi S1/DIV sederajat = 5 orang	Yang berkualifikasi S1/DIV = 31

4.1.5 HASIL CAPAIAN

Dari target penerima SPM Urusan Pendidikan berdasarkan jumlah penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2021, maka dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

Tabel IV.3
Realisasi SPM Urusan Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 – 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dibagi jumlah anak usia 5-6 Tahun	$\frac{5.579}{8.347}$	100%	66,80%
2	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-15 tahun	$\frac{44.790}{36.857}$	100%	121,52%
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan dibagi penduduk usia 7-18 tahun	$\frac{1.444}{1.444}$	100%	100%

- Pada layanan pendidikan dasar terdapat kelebihan penduduk 7-15 tahun yang dilayani sejumlah 7.933 yang merupakan penduduk dari kabupaten lain dan mendapat layanan pendidikan dasar yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang

4.1.6 KENDALA, PEMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam penerapannya, upaya pemenuhan SPM Pendidikan menemui beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Capaian SPM layanan pendidikan PAUD di Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 belum mencapai target, yaitu terdapat 2.771 orang penduduk 5-6 tahun yang belum dilayani pada jenjang pendidikan anak usia dini. Capaian tersebut menunjukkan masih sebesar 33,20 persen penduduk Kota Pangkalpinang usia 5-6 tahun yang belum/tidak berpartisipasi pada jenjang pendidikan paud. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Salah satunya adalah kurangnya motivasi orangtua murid untuk mengikutersertakan anaknya pada jenjang pendidikan PAUD dan lebih memilih langsung mengikutsertakan anaknya pada jenjang pendidikan dasar pada saat waktunya tiba. Selain itu, masalah Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia tak terkecuali Kota Pangkalpinang yang menjadi bagian tak terpisahkan di dalamnya juga turut memberikan dampak sosial maupun ekonomi yang berpengaruh terhadap keikutsertaan penduduk usia PAUD pada jenjang pendidikan PAUD. Banyak orang tua yang khawatir menyekolahkan anaknya di tengah situasi pandemi dan banyak orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya karena turut terdampak pandemi dari segi ekonomi, sehingga tidak mampu lagi membiayai pendidikan anaknya

b. Satuan pendidikan anak usia dini yang terakreditasi minimal C baru sebanyak 70 persen
c. Kepala sekolah PAUD yang berkualifikasi S1/D-IV baru sebesar 79 persen.
d. Tenaga pendidik berkualifikasi S1/D-IV yang tersedia untuk jenjang PAUD baru sebesar 58 persen dan pendidikan kesetaraan baru sebesar 67 persen.
e. Upaya pemenuhan biaya personil peserta didik untuk masing-masing jenjang pendidikan tahun 2021 belum terpenuhi
f. Upaya pemenuhan penyediaan perlengkapan belajar siswa jenjang pendidikan dasar masih belum terlaksana
g. Penyediaan modul bagi peserta pendidikan kesetaraan belum terlaksana.

Sedangkan solusi yang bisa diupayakan atas beberapa permasalahan di atas adalah melalui penambahan anggaran/ refocusing angaran, dimana perlu adanya strukturisasi ulang APBD untuk memfokuskan penambahan anggaran pada perangkat daerah yang diserahi tanggung jawab standar pelayanan minimal. Selain itu, pemenuhan standar pelayanan minimal kiranya didukung pula oleh peran swasta melalui program CSR.

4.2. URUSAN KESEHATAN

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar SPM Kesehatan dilaksanakan pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan baik itu milik pemerintah maupun swasta.

4.2.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Pada urusan kesehatan terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar yang harus dipenuhi, sebagai berikut :

a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
d. Pelayanan kesehatan balita;
e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis;
l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

4.2.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR MINIMAL

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ditetapkan bahwa target capaian untuk

seluruh jenis layanan SPM Kesehatan adalah 100%. Dalam tabel berikut, dapat dilihat target dari masing-masing indikator SPM Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

Tabel IV.4
Target Capaian dan Indikator SPM Kesehatan Kota Pangkalpinang tahun 2021

No	Jenis Layanan	Target SPM	Indikator	Target Indikator
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	4.679
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	4.459
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	4.248
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	16.578
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100%	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	37.431
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100%	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	139.314
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100%	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	16.103
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	Jumlah Warga Negara penderitahipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	40.954
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	5.258
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	370
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	100%	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	5.807
12	Pelayanan Kesehatan Orang yang terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	100%	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	6.452

4.2.3 ANGGARAN

Alokasi anggaran dalam upaya pemenuhan SPM Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 728.374.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 489.259.838,- atau sebesar 67,17 persen.

4.2.4 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 standar jumlah dan kualitas personil/Sumber Daya Manusia Kesehatan yang terdiri dari data keseluruhan Tenaga Kesehatan di Kota Pangkalpinang sesuai dengan jenis pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.5
Dukungan Personil Penerapan SPM Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021

No	Jenis layanan	Dukungan Personil	Jumlah
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	➢ Dokter Spesialis Kebidanan ➢ Bidan ➢ Perawat	13 orang 248 orang 670 orang
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	➢ Dokter spesialis kebidanan ➢ Bidan ➢ Perawat	13 orang 248 orang 670 orang
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	➢ Dokter Spesialis Anak ➢ Bidan ➢ Perawat	8 orang 248 orang 670 orang
4	Pelayanan Kesehatan Balita	➢ Dokter ➢ Bidan ➢ Perawat ➢ Gizi	283 orang 248 orang 670 orang 37 orang
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	➢ Dokter ➢ Bidan ➢ Perawat ➢ Gizi ➢ Tenaga Masyarakat	283 orang 248 orang 670 orang 37 orang 74 orang
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	➢ Dokter ➢ Bidan ➢ Perawat ➢ Gizi ➢ Tenaga Kesehatan Masyarakat	283 orang 248 orang 670 orang 37 orang 74 orang
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	➢ Dokter ➢ Bidan ➢ Perwat ➢ Gizi ➢ Tenaga Kesehatan Masyarakat	283 orang 248 orang 670 orang 37 orang 74 orang
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	➢ Dokter ➢ Bidan ➢ Perawat ➢ Gizi ➢ Tenaga Kesehatan Masyarakat	283 orang 248 orang 670 orang 37 orang 74 orang
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	➢ Dokter ➢ Bidan ➢ Perawat ➢ Gizi ➢ Tenaga Kesehatan Masyarakat	283 orang 248 orang 670 orang 37 orang 74 orang
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	➢ Dokter terlatih jiwa ➢ Perawat terlatih jiwa	7 orang 9 orang
11	Pelayanan Kesehatan Orang	➢ Dokter Spesialis Penyakit Dalam	9 orang

No	Jenis layanan	Dukungan Personil	Jumlah
	Terduga Tuberkolosis	➢ Dokter Spesialis Paru ➢ Perawat ➢ Analis Teknik Laboratorium Medik ➢ Penata Rontgen ➢ Tenaga Kesehatan Masyarakat	3 orang 670 orang 98 orang 34 orang 74 orang
12	Pelayanan Kesehatan Orang yang terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	➢ Dokter Spesialis Penyakit Dalam ➢ Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin ➢ Perawat ➢ Bidan ➢ Analis Teknik Laboratorim Medik ➢ Tenaga Kesehatan Masyarakat	9 orang 5 orang 670 orang 248 orang 98 orang 74 orang

4.2.5 HASIL CAPAIAN

Capaian penerapan SPM Kesehatan Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.6
Realisasi SPM Kesehatan Kota Pangkalpinang Tahun 2021

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil dibagi target jumlah ibu hamil di Kota	$\frac{4.234}{4.679}$	100%	90,49%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi target Jumlah ibu bersalin di kota	$\frac{4.153}{4.459}$	100%	93,14%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai stndar dibagi target Jumlah bayi baru lahir di Kota	$\frac{4.107}{4.248}$	100%	96,68%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah balita di Kota Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	$\frac{15.930}{16.578}$	100%	96,09%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia sekolah dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah anak usia pendidikan dasar di kota	$\frac{32.263}{37.431}$	100%	86,19%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah orang usia 15 – 59 tahun di Kota	$\frac{133.261}{139.314}$	100%	95,66%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah orang usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standardibagi Jumlah target orang usia 60 tahun keatas di Kota	$\frac{15.194}{16.103}$	100%	94,36%

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah penderita hipertensi	$\frac{38.211}{40.954}$	100%	93,30%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi target Jumlah penderita DM	$\frac{5.212}{5.258}$	100%	99,13%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penderita ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dibagi target Jumlah penderita ODGJ Berat	$\frac{362}{370}$	100%	97,84%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	Jumlah penderita TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar dibagi target Jumlah penderita TBC di Kota	$\frac{3.106}{5.807}$	100%	53,49%
12	Pelayanan Kesehatan Orang yang terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV susuai standar dibagi target Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV	$\frac{6.138}{6.452}$	100%	95,13%

4.2.6 KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Seluruh indikator standar pelayanan minimal (SPM) Tahun 2021, belum bisa mencapai target 100%. Adapun alasan umum tidak tercapainya target indikator standar pelayanan minimal disebabkan oleh data penyebut (sebagai pembanding) dalam data capaian merupakan angka perhitungan estimasi bukan angka real, sedangkan angka pembilang merupakan angka real dan juga karena adanya faktor penurunan kunjungan pasien karena adanya *Covid-19*. Berikut kami sampaikan SPM yang tidak mencapai target sebagai berikut :

❖ ***Permasalahan***

a. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2021 sebesar 90,49% dari target sebesar 100%. Berdasarkan Permenkes RI nomor 4 Tahun 2019 pelayanan antenatal sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama hamil atau dikenal dengan istilah Kunjungan ke 4 (K4). Belum tercapainya target Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kota Pangkalpinang dikarenakan :

   1) Masih ada ibu hamil yang K1 (kontak pertama ibu hamil dengan tenaga kesehatan) tidak dari awal kehamilan, namun sudah masuk di Trimester II dan Trimester III, sehingga ibu hamil yang baru K1 di Trimester II dan Trimester III sudah tidak dapat memenuhi syarat kunjungan K4 (kontak ke IV ibu hamil dengan tenaga kesehatan dengan syarat 1x di Trimester I, 1x di trimester II dan 2x ditrimester III) dikarenakan sudah melahirkan.

2) Hal ini juga dikarenakan pada masa pandemic covid 19, kunjungan ke Puskesmas yang dibatasi apalagi ibu hamil merupakan salah satu kelompok rentan dan dianjurkan untuk dirumah saja jika tidak ada keluhan.
3) Angka pembagi untuk presentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar adalah sasaran ibu hamil yang merupakan angka estimasi perhitungan bukan merupakan angka real jumlah ibu hamil yang ada

b. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan Persalinan tahun 2021 sebesar 93,14% dari target sebesar 100%. Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 pelayanan persalinan sesuai standart adalah persalinan yang dilakukan oleh bidan dan atau dokter dan atau dokter spesialis kebidanan baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. Stantar persalinan normal adalah acuan persalinan normal (APN) yaitu dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan minimal 2 (dua) orang tenaga penolong yang terdiri dari dokter dan bidan, 2 (dua) orang bidan atau bidan dan perawat. Standart persalinan komplikasi mengacu pada buku saku pelayanan kesehatan ibu di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Belum tercapainya ibu bersalin yang mendapakan pelayanan persalinan dikarenakan :

1) Masih dijumpai adanya ibu bersalin yang persalinannya tidak dilakukan oleh bidan dan atau dokter atau dokter kebidanan pada fasilitas pelayanan kesehatan
2) Dalam definisi opersional disebutkan bahwa denominator pembagi nya adalah sasaran ibu bersalin yang merupakan angka estimasi dari perhitungan statistik. Sehingga walaupun semua ibu bersalin yang ditemukan sudah melakukan persalinan dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, namun dengan pembagi yang merupakan angka estimasi memunculkan cakupan yang masih dibawah target SPM.
3) Masih adanya persalinan oleh didukun sebesar 0,04% (Puskesmas Gerunggang). Hal ini dikarenakan masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap dukun dengan pertimbangan lebih kekeluargaan.

c. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2021 sebesar 96,68% dari target sebesar 100%. Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu pada pelayanan neonatal esensial. Standart kualitas adalah kunjungan minimal 3 (tiga) kali selama periode neonatal dengan ketentuan : Kunjungan *Neonatal* 1 (KN1) 6 - 48 jam, Kunjungan *Neonatal* 2 (KN2) 3 - 7 hari dan Kunjungan *Neonatal* 3 (KN3) 8 - 28 hari. Belum tercapainya presentase bayi baru lahir yang mendapakan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dikarenakan :

1) Di masa pandemi *Covid 19*, beberapa tenaga kesehatan membatasi melakukan kunjungan kerumah untuk melakukan kunjungan *neonatus*.
2) Sebagian besar persalinan di Kota Pangkalpinang banyak di lakukan di fasilitas pelayanan kesehatan swasta (rumah sakit, bidan praktik mandiri),

sedangkan kunjungan *neonatus* banyak dilakukan oleh bidan puskesmas/pustu/ poskesdes, sehingga banyak kunjungan *neonatus* yang ditemukan sudah melebihi batas waktu (usia *neonatus* lebih dari 28 hari).

3) Angka perhitungan untuk sasaran bayi merupakan angka perhitungan estimasi bukan merupakan angka sasaran real.

d. Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar tahun 2021 sebesar 96,09% dari target sebesar 100%. Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 , Pelayanan kesehatan anak balita adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan Buku KIA dan skrining tumbuh kembang meliputi balita usia 0-11 bulan, usia 12-23 bulan dan balita usia 24-59 bulan. Pelayanan kesehatan tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan dokter/ bidan/ perawat/ gizi atau oleh tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yaitu Guru Paud/kader kesehatan yang diberikan pada fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta dan UKBM.

   Pelayanan kesehatan anak balita sesuai standar bilamana telah memenuhi kriteria : penimbangan minimal 8 kali per tahun, pengukuran panjang tinggi badan minimal 2 kali setahun, pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun dan pemberian imunisasi dasar lengkap. Beberapa faktor yang menyebabkan belum tercapainya target tersebut di atas adalah sebagai berikut :

   1) Tingkat Partisipasi Masyarakat, orang tua untuk membawa anak nya ke Fasilitas kesehatan termasuk ke UKBM (posyandu) sudah mulai berkurang bilamana anak sudah berusia 3 tahun (36 bulan).
   2) Selain itu, dimasa pandemi *Covid- 19* beberapa posyandu yang ada di Kota Pangkalpinang tidak dibuka karena pembatasan pelayanan kesehatan. Untuk balita sehat juga tidak dianjurkan untuk ke Puskesmas
   3) Angka pembagi untuk perhitungan dalam presentase pelayanan kesehatan pada anak balita merupakan angka estimasi

e. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2021 sebesar 86,20% dari target sebesar 100%. Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 , Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar adalah penjaringan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar , minimal 1 kali pada kelas I sampai kelas IX yang dilakukan oleh puskesmas. Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 , Presentase Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar , minimal 1 kali per tahun pada seluruh siswa kelas I sampai kelas IX yang dilakukan oleh puskesmas. Cakupan penjaringan kesehatan anak usia pendidikan dasar di tahun 2021 masih belum mencapai target. Dari laporan seluruh Puskesmas yang masuk ke Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang menunjukkan 32.263 murid berhasil dijaring dari sasaran 37.431 murid. Ini artinya capaian program UKS masih rendah, yaitu 86,2 persen dari SPM yang diharapkan sebesar 100 persen. Oleh sebab itu perlu

upaya lebih lanjut dalam peningkatan cakupan penjaringan kesehatan anak usia pendidikan dasar. Permasalahan tidak tercapainya target penjaringan kesehatan usia pendidikan dasar di antaranya adalah karena masih dalam masa pandemi sehingga masih adanya orang tua yang belum mengizinkan anaknya untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Serta adanya kendala dalam pengisian data penjaringan melalui *google drive* oleh orang tua.

f. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar tahun 2021 sebesar 94,36% dari target sebesar 100%. Berdasarkan Permenkes Nomor 4 Tahun 2019, persentase warga usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pelayanan kesehatan sesuai standart meliputi edukasi perilaku hidup bersih dan sehat dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular. Pelayanan skrining faktor risiko pada usia lanjut adalah skrining yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan penyakit tidak menular meliputi :

   - Pengukuran ringgi badan, berat badan dan lingkar perut
   - Pengukuran tekanan darah
   - Pengukuran gula darah
   - Pengukuran gangguan mental
   - Pengukuran gangguan kognitif
   - Pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut
   - Anamnesa perilaku berisiko

   Belum optimalnya capaian SPM ini dikarenakan pada masa pandemi ini, banyak posyandu lansia tidak dibuka dan pelayanan kesehatan di puskesmas juga di batasi apalagi pada kelompok lansia yang merupakan kelompok rentan. Selain itu masih terbatasnya SDM Kesehatan yang memiliki sertifikat pelatihan pelayanan lansia dan geriyatri sehingga pelayanan kesehatan lansia masih belum optimal.

g. Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar belum mencapai target dimana target cakupan yaitu sebesar 100%, sedangkan yang tercapai sebesar 95,66%. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi *Covid-19* sehingga kegiatan skrining di sekolah tidak bias dilaksanakan dengan maksimal.

h. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target dimana target cakupan yaitu sebesar 100 %, sedangkan yang tercapai 93,30%. Hal ini disebabkan karena masih adanya penduduk yang hipertensi belum mau datang ke fasyankes dikarenakan kondisi pandemi *Covid-19*.

i. Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar belum mencapai target dimana target cakupan yaitu sebesar 100%, sedangkan yang tercapai sebesar 99,13%. Hal ini disebabkan karena : pengadaan stik gula terbatas serta masih adanya penduduk yang yang menderita DM belum mau datang ke fasyankes dikarenakan kondisi pandemi C*ovid-19*.

j. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar belum mencapai target dimana target cakupan yaitu sebesar 100%, sedangkan yang tercapai sebesar 88,82%. Hal ini disebabkan karena pasien tidak bisa diajak bekerjasama dan dari pihak keluarga tidak mendukung untuk mengantar pasien ODGJ berobat ke fasyankes.

k. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar belum mencapai target dimana target cakupan yaitu sebesar 100%, sedangkan yang tercapai sebesar 53,49%. Hal ini dikarenakan :
   1) Sebagian masyarakat masih takut untuk datang ke puskesmas karena social distancing dan kejadian *Covid-19*.
   2) Turunnya angka kunjungan pasien ke Puskesmas di karenakan *Covid-19*.
   3) Kemauan masyarakat untuk mengetahui status kesehatannya lebih cepat masih rendah.
   4) Tidak dapat masuk ke Lapas untuk pemeriksaan lebih cepat penyebaran kemungkinan didalam Lapas karena *Covid-19*.

l. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar belum mencapai target dimana target cakupan yaitu sebesar 100%, sedangkan yang tercapai sebesar 92,11%. Hal ini dikarenakan tidak dapat melakukan pemeriksaan kesehatan ke Lapas dikarenakan pandemi *Covid-19*.

❖ ***Solusi***

a. Untuk Pelayanan ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian adalah :
   1) Melaksanakan sweeping terhadap ibu hamil agar dapat kontak pertama dengan tenaga kesehatan pada awal kehamilan oleh bidan puskesmas diwilayah kerjanya
   2) Mengikuti pedoman pelayanan kesehatan ibu hamil di masa pandemic yaitu dengan menyampaikan ke ibu hamil untuk mempelajari Buku Kesehatan Ibu dan Anak dan memantau kesehatan ibu melalui telekomunikasi.
   3) Menyebarkan informasi pentingnya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil melalui media sosial

b. Untuk Pelayanan Persalinan yang mendapat pelayanan sesuai standar, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian adalah :
   1) Penyebarluasan informasi kesehatan kepada masyarakat baik melalui media cetak maupun media sosial tentang perlunya persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.
   2) Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan buku KIA sebagai salah satu sarana kontrol kesehatan ibu pada masa hamil dan persalinan.

c. Untuk Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir yang mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian adalah :

1) Melakukan pemantauan kesehatan bayi baru lahir melalui telekomunikasi
2) Meningkatkan peran tenaga kesehatan khususnya bidan yang menangani persalinan untuk melakukan kunjungan *neonatus*
3) Meningkatkan motivasi para tenaga kesehatan khususnya bidan untuk meningkatkan kinerjanya dalam melakukan kunjungan neonatus sesuai dengan wilayah kerjanya masing masing
4) Optimalisasi peran lintas program dan lintas sektor terkait .
5) Optimalisasi Pendataan , pencatatan dan pelaporan bayi baru lahir dan pemanfaatan buku KIA

d. Untuk Pelayanan Kesehatan Balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian adalah :

1) Melakukan penyebarluasan informasi kesehatan kepada masyarakat baik secara langsung atau melalui media penyuluhan akan pentingnya memantau tumbuh kembang balita setiap bulannya.
2) Melakukan pemantauan kesehatan melalui telekomunikasi dan optimalisasi penggunaan Buku Kesehatan Ibu dan Anak pada orang tua.

e. Untuk Pelayanan Anak Usia pendidikan dasar yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian adalah melakukan sweeping ke rumah atau ke sekolah (bekerja sama dengan guru UKS atau kader kesehatan sekolah).

f. Untuk Pelayanan warga usia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan dalam rangka peningkatan capaian adalah melakukan pemantauan kesehatan lansia melalui telekomunikasi dan pada lansia dan melaksanakan posyandu lansia dengan protokol kesehatan yang ketat.

g. Untuk Pelayanan Kesehatan usia 15-59 tahun, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksanakan untuk meningkatakan capaian ditahun mendatang adalah merencanakan :

1) Membuat inovasi Posbindu PTM mobile dengan ambulans keliling yang terjadwal di tiap Puskesmas Posbindu *mobile* dikelurahan
2) Sosialisasi bahaya PTM tak terkontrol bila terpapar penyakit tidak menular
3) Diharapkan untuk posbindu dilakukan secara *mobile* di kelurahan – kelurahan
4) Aktif melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat.
5) Melakukan kegiatan skrining ke tempat-tempat tertentu.

6) Melakukan kerjasama dengan lapas untuk melakukan skrining pada kesehatan usia produktif, Hipertensi dan Diabetes Melitus

h. Untuk Pelayanan penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksankan untuk meningkatkan capaian ditahun mendatang adalah merencanakan :

1) Memulai sosialisasi pentingnya kontrol PTM
2) Sosialisasi bahaya PTM tak terkontrol bila terpapar penyakit tidak menular
3) Aktif melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat.
4) Melakukan kegiatan skrining ke tempat-tempat tertentu.
5) Melakukan kerjasama dengan lapas untuk melakukan skrining pada kesehatan usia produktif, Hipertensi dan Diabetes Melitus.

i. Untuk Pelayanan penderita Penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, upaya-upaya yang sudah dan akan dilaksankan untuk meningkatkan capaian ditahun mendatang adalah merencanakan :

1) Memulai sosialisasi pentingnya kontrol PTM
2) Sosialisasi bahaya PTM tak terkontrol bila terpapar penyakit tidak menular
3) Aktif melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat
4) Melakukan kegiatan skrining ke tempat-tempat tertentu
5) Melakukan kerjasama dengan lapas untuk melakukan skrining pada kesehatan usia produktif, Hipertensi dan Diabetes Melitus.

j. Untuk persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar, upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian adalah dengan :

1) Sosialisasi pentingnya kesehatan Jiwa dalam masa pandemi *Covid-19*.
2) Melakukan kerjasama lintas program dan lintas sektor yang terkait dalam mengawasi dan mendampingi pasien ODGJ untuk mendapat pelayanan di fasyankes.

k. Untuk persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar, upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian di tahun mendatang adalah :

1) Melakukan pemeriksaan terduga TB terhadap pasien yang datang ke puskesmas dengan gejala batuk lebih dari 2 minggu.
2) Meningkatkan edukasi terhadap masyarakat yang beresiko TB agar mau diperiksa dahak.
3) Melakukan pemeriksaan ke Lapas dan juga Pesantren

l. Untuk persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar, upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian di tahun mendatang adalah melakukan kerjasama dengan lapas untuk melakukan skrining pada orang berisiko terinfeksi HIV.

4.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Terdapat 2 jenis pelayanan dasar dalam penyelenggaraan urusan ini, sebagai berikut:

a. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
b. Penyediaan layanan pengolahan air limbah

4.3.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Target pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.7
Target Capaian dan Indikator SPM Pekerjaan Umum Tahun 2021

No	Jenis Layanan	Target SPM	Indikator	Target Indikator
1.	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	217.752
2.	Penyediaan layanan pengolahan air limbah	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	159.432

4.3.3 ANGGARAN

Alokasi anggaran untuk penerapan SPM Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021 bersumber dari Dana Alokasi Khusus dengan nilai Rp. 7.205.040.000,- dan terealisasi Rp. 7.104.913.000,- atau sebesar 98,61 persen.

4.3.4 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil dalam penerapan SPM Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah sebanyak 14 orang PNS dan 6 orang non PNS.

4.3.5 HASIL CAPAIAN

Capaian penerapan SPM Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.8
Capaian Penerapan SPM Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga yang memperoleh kebutuhan air minum dibagi jumlah warga yang seharusnya memperoleh air minum	$\frac{165.340}{217.752}$ x 100%	100%	75,93%

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
2	Penyediaan layanan pengolahan air limbah	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik dibagi jumlah warga yang seharusnya memperoleh layanan limbah domestik	$\frac{157.484}{159.432}$ x 100%	100%	98,78%

4.3.6 KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Penyelenggaraan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2021 terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

a. Belum maksimalnya pemanfaatan air baku (sungai, kolong) perkotaan untuk kebutuhan pengembangan SPAM
b. Kurangnya koordinasi antara *stake holder* penyelenggara penyediaan kebutuhan air minum
c. SPAM yang ada belum dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sedangkan solusi yang dapat dilaksanakan guna menyelesaikan permasalahan yang tersebut antara lain :

a. Menyusun strategi pengembangan SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan terlindungi
b. Koordinasi antar stake holder serta pembagian tanggung jawab yang jelas dalam pencapaian target SPM
c. Perencanaan dan pembangunan SPAM dikota dan daerah yang merupakan satu kesatuan system fisik (teknik) dan non fisik dari sarana dan prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanan menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum dan hidran kebakaran

4.4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan pada urusan perumahan rakyat ada 2 (dua) sebagai berikut :

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota. Terdapat beberapa istilah dalam penyediaan layanan ini, yaitu :
   1) Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah

2) Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana
3) Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangunkan rumah baru yang berada pada lokasi yang sama
4) Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang
5) Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana dalam hal ini merupakan kegiatan memfasilitasi rumah tangga yang tinggal di rumah sewa yang rusak karena bencana, difasilitasi rumah susun sewa atau rumah sewa umum layak huni yang ada.

Layanan ini dapat diberikan apabila sesuai dengan ketentuan berikut :

1) Pada saat masa pasca bencana
2) Surat penetapan bencana dari Bupati/Walikota, dan/atau
3) Dampak bencana di daerah administrasi kabupaten/kota

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Jenis layanan ini merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mendukung :

1) Pengurangan Kawasan kumuh 5-10 Ha; dan/atau
2) Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang berada dilahan bukan fungsi permukiman dan "tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya".

Adapun dalam pelaksanaannya relokasi perumahan daerah rawan bencana hanya dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan.

4.4.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan bahwa target pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan dan Permukiman untuk semua jenis layanan adalah 100%, sebagai berikut :

Tabel IV.9
Target Capaian dan Indikator SPM Perumahan Rakyat Kota Pangkalpinang Tahun 2021

No	Jenis Layanan	Target SPM	Indikator	Target Indikator
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	3

No	Jenis Layanan	Target SPM	Indikator	Target Indikator
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100%	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	3

4.4.3 ANGGARAN

Alokasi anggaran dalam pelaksanaan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Pangkalpinang Tahun 2021 adalah Rp. 366.348.227,- terealisasi Rp. 282.642.675,- atau sebesar 77,15 persen.

4.4.4 DUKUNGAN PERSONIL

Personil yang terlibat dalam pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan berjumlah 9 (sembilan) orang.

4.4.5 HASIL CAPAIAN

Realisasi penerapan SPM Perumahan Rakyat Kota pangkalpinang Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.10
Realisasi Penerapan SPM Perumahan Rakyat Kota PangkalpinangTahun 2021

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota	Jumlah Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani dibagi jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani	$\frac{3}{3}$ x 100%	100%	100%
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan	n/a	100%	n/a

4.4.6 KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Berdasarkan data realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat di Kota Pangkalpinang pada tahun 2021 dapat dicapai dengan baik pada pelayanan dasar penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota, sedangkan untuk fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota belum tercapai dengan baik, hal ini dikarenakan di Kota Pangkalpinang tidak ada program relokasi dari pemerintah. Adapun realisasi anggaran pada tahun ini digunakan untuk sosialisasi tentang penyediaan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana jika terjadi bencana serta relokasi program yang dilaksanakan pemerintah daerah kabupaten/kota.

4.5. URUSAN TRANTIBUMLINMAS

4.5.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Dalam penyelenggaraan urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terdapat 5 (lima) jenis layanan dasar, sebagai berikut :

1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
2. Pelayanan Reformasi Rawan Bencana
3. Pelayanan pencegahan kesiapsiagaan terhadap bencana
4. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

4.5.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah ditetapkan bahwa target pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk semua jenis layanan adalah 100%, sebagai berikut :

Tabel IV.11
Target Capaian dan Indikator SPM Trantibumlinmas Kota PangkalpinangTahun 2021

No	Jenis Layanan	Target SPM	Indikator	Target Indikator
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	54
2.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	6000
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6000
4.	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	100%	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	400
5.	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota	64

No	Jenis Layanan	Target SPM	Indikator	Target Indikator
			pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap *(response time)* Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah	

4.5.3 ANGGARAN

Penerapan SPM Trantibumlinmas di Kota Pangkalpinang dilaksanakan oleh 2 (dua) perangkat daerah, yaitu :

1) Satpol PP melaksanakan sub urusan ketertiban umum dan pemadam kebakaran, dengan alokasi anggaran Rp. 11.929.791.400,- dan terealisasi Rp. 11.560.523.801,- atau sebesar 96,90 persen
2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan sub urusan kebencanaan dengan alokasi anggaran Rp. 5.427.770.559,- dan terealisasi Rp. 4.783.550.250,- atau sebesar 88,13 persen

4.5.4 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil untuk pelayanan SPM Urusan Trantibumlinmas Kota Pangkalpinang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1) Sub urusan keamanan dan ketertiban umum dilaksanakan oleh 41 orang PNS dan 179 non PNS.
2) Sub urusan kebencanaan dilaksanakan oleh 138 orang yang terdiri dari 23 orang PNS dan 115 non PNS
3) Sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh 7 orang PNS dan 137 non PNS.

4.5.5 HASIL CAPAIAN

Realisasi penerapan SPM Urusan Trantibumlinmas Kota Pangkalpinang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.12
Realisasi Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas Tahun 2021

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada dibagi jumlah warga negara yang seharusnya memperoleh layanan	$\frac{0}{54} x\ 100\%$	100%	0%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara yang seharusnya menerima layanan	$\frac{5.034}{6.000}$ x 100%	100%	83,9%

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumla warga negara uang seharusnya menerima layanan	$\frac{5.034}{6.000}$ x 100%	100%	83,9%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelematan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga negara yang seharusnya menerima layanan	$\frac{384}{400}\ x\ 100\%$	100%	96%
5	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap *(response time)* Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah Dibagi Jumlah Kejadian Kebakaran	$\frac{64}{64}\ x\ 100\%$	100%	100%

4.5.6 KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Pada urusan Trantibum terdapat satu layanan SPM dengan capaian 0%, yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum. Hal ini disebabkan karena tidak adanya warga negara yang terdampak/ dirugikan pada saat melakukan tindakan Penertiban dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selain itu terdapat beberapa permasalahan lain dalam hal penanggulangan bencana sebagai berikut :

Tabel IV.13
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Trantibumlinmas

No	Permasalahan	Penyebab	Solusi
1	Masih minimnya informasi rawan bencana kepada masyarakat khususnya di kawasan rawan bencana	Minimnya sosialisasi kepada penduduk di daerah rawan bencana, belum optimalnya fungsi wahana multimedia, belum adanya rambu evakuasi dan papan informasi	Sosialisasi kepada penduduk di daerah rawan bencana secara berkala, optimalisasi fungsi wahana multimedia dan pentingnya pemasangan rambu evakuasi serta papan informasi di daerah rawan bencana
2	Belum adanya dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB)	Belum adanya dokumen kajian resiko bencana (KRB) yang sah dan legal	Segera disusun Kajian Resiko Bencana (KRB)
3	Penyelamatan dan Evakuasi korban kurang optimal	Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung evakuasi korban bencana	Perlunya segera diadakan pemenuhan sarana dan prasarana untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (perahu karet, armada angkut barang dan penumpang).

4.6. URUSAN SOSIAL

4.6.1 JENIS PELAYANAN DASAR

Terdapat 5 jenis layanan dasar yang harus diterapkan pada penyelanggaraan urusan Sosial, sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti
4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kabupaten/ Kota

4.6.2 TARGET PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, target pencapaian SPM Urusan Sosial adalah 100% untuk seluruh jenis layanan. Berikut adalah target capaian dan indikator SPM Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

Tabel IV.14
Target Capaian dan Indikator SPM Sosial Tahun 2021

No	Jenis Layanan	Target SPM	Indikator	Target Indikator
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%	Jumlah Warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabiitasi sosial di luar panti	100
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	50
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	50
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	Jumlah warga negara / gelandangan dan pengemis tang memperoleh rehabilitasi	88
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/ Kota	100%	Jumlah warga negara korban bencana Kab/ Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	350

4.6.3 ANGGARAN

Anggaran untuk penerapan SPM Sosial Kota Pangkalpinang Tahun 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 276.471.000,- dan terealisasi Rp. 232.738.681,- atau sebesar 84,18 persen.

4.6.4 DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil dalam penerapan SPM Sosila Tahun 2021 secara keseluruhan adalah 151 orang, dengan rician sebagai berikut :

a. PNS

- Bidang Rehabilitasi Sosial : 4 orang
- Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial : 4 orang

b. Non PNS

- Satuan Bhakti Pekerja Sosial : 18 orang
- URC Tagana : 19 orang
- Petugas Posko : 3 orang
- Logistik : 2 orang
- Admin : 1 orang

c. Relawan Sosial

- Pekerja Sosial Masyarakat : 42 orang
- Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan : 7 orang
- Taruna Siaga Bencana : 51 orang

4.6.5 HASIL CAPAIAN

Realisasi penerapan SPM Sosial Kota Pangkalpinang sepanjang tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel IV.15
Realisasi Penerapan SPM Sosial Tahun 2021

No	Jenis Layanan	Perhitungan	Capaian	Persentase	
				Target	Realisasi
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani	$\frac{74}{100}$ x 100%	100%	74%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani	$\frac{6}{50}$ x 100%	100%	12%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani	$\frac{4}{50}$ x 100%	100%	8%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani	$\frac{33}{88}$ x 100%	100%	37,50%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/ Kota	Jumlah Warga Negara yang terlayani dibagi jumlah warga negara yang harus dilayani	$\frac{350}{350}$ x 100%	100%	100%

4.6.6 KENDALA, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

Tabel IV.16
Permasalahan dan Solusi Penerapan SPM Sosial

Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak lanjut
A. Perencanaan 1. Kurang sinkronnya hasil akhir perencanaan Program/Kegiatan Renstra, Renja dengan pembahasan di level KUAPPAS khususnya yang menunjang SPM; 2. Perubahan regulasi dari Pemerintah Pusat yang menuntut percepatan penyesuaian dan penyelarasan terhadap penyusunan Program/Kegiatan termasuk penunjang SPM;	1. Perlunya sinkronisasi antara perencanaan yang sudah termuat dalam Renstra, Renja terhadap hasil pembahasan KUAPPAS; 2. Pemerintah Daerah perlu merespon cepat terhadap perubahan regulasi dengan mengeluarkan juknis terkait disesuaikan kepentingan daerah;	1. Mengusulkan kepada TAPD untuk lebih mengutamakan perencanaan yang sudah termuat dalam Renstra maupun Renja OPD; 2. Mengusulkan kepada Pemerintah Daerah lewat Bappeda untuk lebih cepat merespon perubahan regulasi;
B. Pendanaan Minimnya anggaran yang disediakan untuk melaksanakan Program/Kegiatan penunjang SPM.	Perlunya support anggaran yang memadai untuk Program/Kegiatan yag menunjang SPM.	Mengusulkan kepada TAPD untuk lebih memprioritaskan penganggaran Program/Kegiatan penunjang SPM.

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Selama tahun 2021, program dan kegiatan pendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Tabel IV.17
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Penerapan SPM Tahun 2021

No	Jenis Layanan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	OPD Pelaksana
A	**PENDIDIKAN**	**Program Pengelolaan Pendidikan**	**67.435.357.810,53**	**50.359.548.571**	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1	Pendidikan Anak Usia Dini	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**5.967.812.800**	**4.313.690.728**	
		- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	2.926.212.800	2.581.950.000	
		- Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.041.600.000	1.731.740.728	
2	Layanan Pendidikan Dasar	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**40.809.479.202,17**	**31.202.642.058**	
		- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	13.180.686.979	12.798.456.379	

No	Jenis Layanan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	OPD Pelaksana
		- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	27.628.792.223	18.404.185.679	
		Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**19.148.565.808,36**	**13.452.665.785**	
		- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4.078.328.300	3.959.676.500	
		- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	15.070.237.508	9.492.989.285	
3	Layanan Pendidikan Kesetaraan	**Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan**	**1.509.500.000**	**1.390.550.000**	
		- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	1.509.500.000	1.390.550.000	
B	**KESEHATAN**	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**728.374.500**	**489.259.838**	**Dinas Kesehatan**
		Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**728.374.500**	**489.259.838**	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	132.240.000	130.677.647	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	273.683.200	77.467.080	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	35.641.800	22.328.911	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	25.200.000	24.948.000	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	33.600.000	33.600.000	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	30.095.000	28.510.000	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	58.095.000	56.723.000	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	26.056.700	4.031.200	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	17.180.500	17.155.500	
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	32.925.000	32.925.000	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24.006.800	23.953.000	
12	Pelayanan Kesehatan Orang yang terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh	- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	39.650.500	36.940.500	
C	**PEKERJAAN UMUM**		**7.205.040.000**	**7.104.913.000**	**Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang**
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**	**5,905,040,000**	**5,804,933,000**	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	**5,905,040,000**	**5,804,933,000**	

No	Jenis Layanan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	OPD Pelaksana
		Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
		- Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	5,905,040,000	5,804,933,000	
2	Penyediaan layanan pengolahan air limbah	**Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**	**1,300,000,000**	**1,299,980,000**	
		Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**1,300,000,000**	**1,299,980,000**	
		- Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	1,300,000,000	1,299,980,000	
D	**PERUMAHAN RAKYAT**				**Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman**
		Program Pengembangan Perumahan	**366.348.227**	**282.642.675**	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota	**Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**220.762.700**	**176.836.855,-**	
		- Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	135.499.750	115.507.223	
		- Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum tertangani	49.999.950	37.372.932	
		- Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	35.263.000	23.956.700	
		Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**76.330.100**	**51.200.000**	
		- Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	76.330.100	51.200.000	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	**Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**69.255.427**	**54.605.820**	
		- Identifikasi Lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan	34.819.827	34.819.827	
		- Pendataan Rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	34.435.600	34.435.600	
E	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				
	SUB URUSAN TRANTIBUM				**Satpol PP**
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**7.450.036.600**	**7.260.926.350**	
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam	**6.892.202.600**	**6.735.207.950**	

No	Jenis Layanan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	OPD Pelaksana
		1(satu) Daerah			
		- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Jumlah Kasus pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah	6.817.261.950	6.669.347.950	
		- Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000	5.000.000	
		- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	12.850.650	10.950.000	
		- Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.850.650	10.950.000	
		- Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakkan Peraturan Daerah dan Perkada	7.000.000	0	
		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	**532.834.000**	**525.718.400**	
		- Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	29.300.000	28.168.400	
		- Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	503.534.000	497.550.000	
		Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/ Kota	**25.000.000**	**0**	
		- Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	25.000.000	0	
	SUB URUSAN KEBENCANAAN				**BPBD**
		Program Penanggulangan Bencana			
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	**Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota**	**13.037.500**	**4.405.500**	
		- Sosialisasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	13.037.500	4.405.500	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	**Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**257.051.859**	**251.160.550**	

No	Jenis Layanan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	OPD Pelaksana
		- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/ Kota	257.051.859	251.160.550	
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana	**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	5.157.681.200	4.527.984.200	
		- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	3.329.080.400	2.987.893.100	
		- Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah Penyakit	1.828.600.800	1.540.091.100	
	SUB URUSAN KEBAKARAN				**Bidang Pemadam Kebakaran, Satpol PP**
5	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	**Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Korban**	**4.479.754.800**	**4.299.597.451**	
		Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota	**4.479.754.800**	**4.299.597.451**	
		- Pemadaman dan pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.409.254.800	4.230.876.451	
		- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,Penanggualangan kebakaran dan alat pelindung diri	70.500.000	68.721.000	
F	**SOSIAL**	**Program Rehabilitasi Sosial**	**276.471.000**	**232.738.681**	**Dinas Sosial**
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**56.271.000**	**43.015.974**	
		- Pemberian Layanan Rujukan	56.271.000	43.015.974	
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	**Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**220.200.000**	**189.722.707**	
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	- Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	56.600.000	54.687.407	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	- Pemberian Layanan Kedaruratan	63.400.000	35.831.800	
		- Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	100.200.000	99.203.500	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana Kab/ Kota	Program Penanganan Bencana			
		Kegiatan perlindungan sosial			

No	Jenis Layanan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	OPD Pelaksana
		korban bencana alam dan sosial Kabupaten/ Kota			

BAB V
PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 merupakan pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang ke Pemerintah Pusat sesuai dengan kententuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berisi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama tahun 2021.

Dalam laporan ini disampaikan seluruh capaian penyelenggaraan urusan pemerintahan se-transparan mungkin, baik dari sisi capaian, kendala/permasalahan beserta upaya penyelesaian dari masalah yang timbul selama pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2021 sebagai wujud penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kota Pangkalpinang.

Keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kota Pangkalpinang tidak lepas dari dukungan, koordinasi dan kolaborasi dari seluruh komponen yang ada, baik itu masyarakat, swasta, legislatif, Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun pihak Pemerintah selaku pembina pemerintah daerah. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Pangkalpinang.

Akhirnya, semoga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 dapat memenuhi harapan semua pihak dan dapat menjadi bahan evaluasi serta motivasi dalam bagi penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Kami menyadari bahwa masih banyak hal-hal yang kurang sempurna dalam penyusunan laporan ini, namun kami berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Kota Pangkalpinang dalam meningkatkan kinerja ke depan guna menciptakan masyarakat Pangkalpinang yang lebih sejahtera, nyaman, unggul dan makmur.